

**PERANAN SULTAN HAMENGKU BUWONO IX
PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL
1940-1949**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Sejarah
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta



Disusun Oleh

Caroline Slamet Margiyati
NIM : 021314049

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007**

SKRIPSI

PERANAN SULTAN HAMENGKU BUWONO IX PADA MASA
PERGERAKAN NASIONAL 1940-1949

Oleh:

Caroline Slamet Margiyati
NIM: 021314049

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



(Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.)

Tanggal 24 Januari 2007..

Pembimbing II



(Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R, S.Th)

Tanggal 24 Januari 2007.....

SKRIPSI

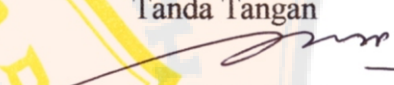
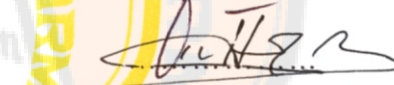
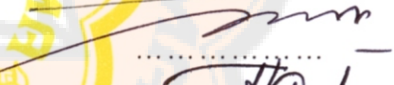
PERANAN SULTAN HAMENGKU BUWONO IX PADA MASA
PERGERAKAN NASIONAL 1940-1949

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Caroline Slamet Margiyati
NIM: 021314049

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 6 Januari 2007
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Sutarjo Adisusilo J.R, S.Th.	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	: Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.	
Anggota	: Drs. Sutarjo Adisusilo J.R, S.Th.	
Anggota	: Drs. A. K. Wiharyanto, M.M.	

Yogyakarta, 6 Januari 2007
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Dekan.



(Drs.T.Sarkim,M.Ed,Ph.D)



Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- *Kedua orang tuaku dan kakak-kakakku yang tercinta*
- *"Seseorang" yang selalu mendampingi*
- *Para pendidik dan para sahabatku*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

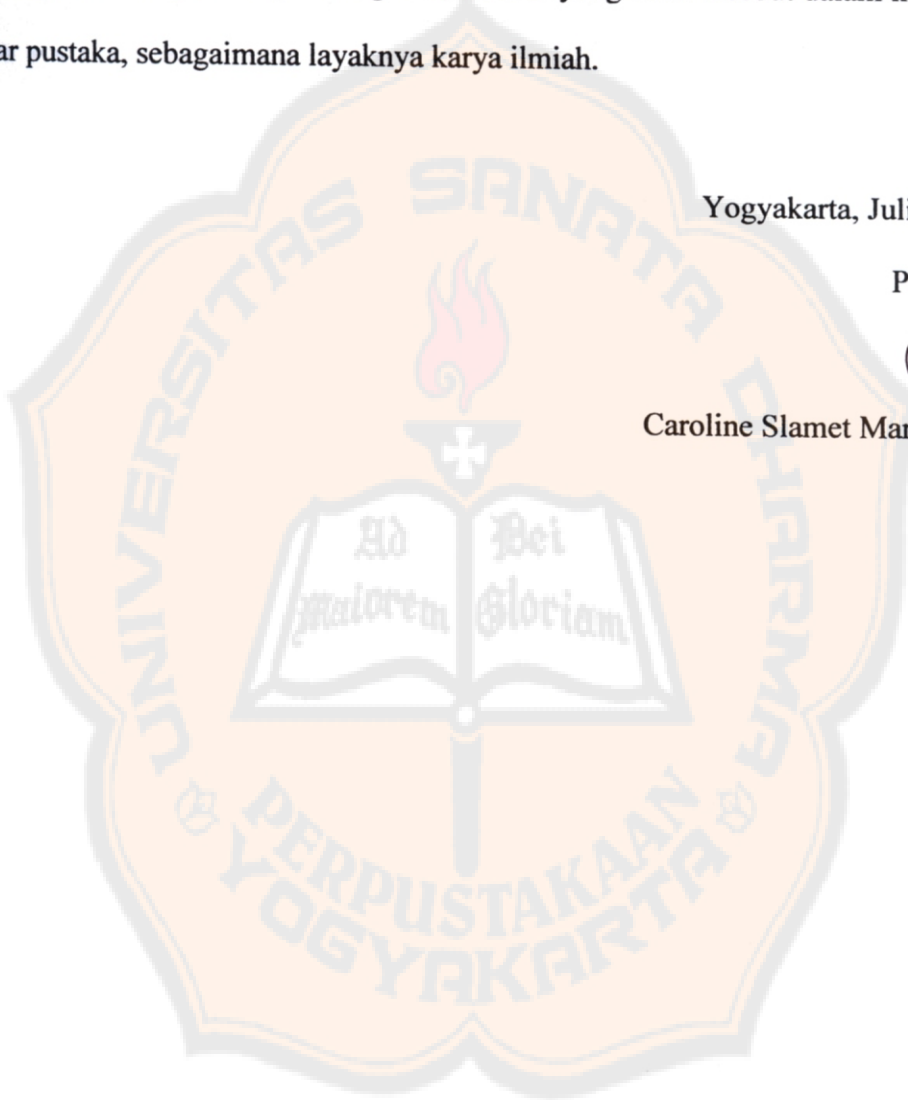
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebut dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, Juli 2006

Penulis



Caroline Slamet Margiyati



MOTTO

- 
- ❖ *Menunda adalah awal dari kegagalan*
 - ❖ *Jadikan kelemahanmu sebagai kekuatan terbesar dalam hidupmu*

ABSTRAK

Judul : PERANAN SULTAN HAMENGKU BUWONO IX PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL 1940-1949.

**Oleh : Caroline Slamet Margiyati
NIM : 021314049**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: pertama, mendiskripsikan dan menganalisis latar belakang keterlibatan Sultan Hamengku Buwono IX dalam pergerakan nasional; kedua, mendiskripsikan dan menganalisis peranan Sultan Hamengku Buwono IX selama pergerakan nasional 1940-1945; ketiga, mendiskripsikan dan menganalisis peranan Sultan Hamengku Buwono IX pada masa awal kemerdekaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang ditulis secara deskriptif- analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, psikologis, politik, sosial-ekonomi dan personal.

Hasil dari penelitian ini adalah: latar belakang Sultan Hamengku Buwono IX terlibat dalam pergerakan nasional didasari oleh beberapa hal diantaranya adalah latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan dan nasionalisme Sultan Hamengku Buwono IX.

Peranan Sultan Hamengku Buwono IX selama pergerakan nasional 1940-1945 dalam bidang politik dan sosial-ekonomi terbagi dalam dua periode yaitu: masa pemerintahan Belanda dan masa pendudukan tentara Jepang di Indonesia. Berbagai macam kebijakan politik dan sosial- ekonomi yang diambil oleh Sultan Hamengku Buwono IX merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala daerah Yogyakarta.

Peranan Sultan Hamengku Buwono IX pada masa awal kemerdekaan 1945-1949 dalam bidang politik dan sosial-ekonomi terbagi dalam tiga periode yaitu setelah proklamasi kemerdekaan RI, Yogyakarta menjadi ibukota RI dan Agresi Belanda. Kebijakan- kebijakan politik dan sosial- ekonomi yang diambil oleh Sultan Hamengku Buwono IX pada masa awal kemerdekaan 1945-1949 bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia.

ABSTRACT

**THE ROLE OF SULTAN HAMENGKU BUWONO IX IN THE
NATIONAL MOVEMENT ERA OF 1940-1949**

By:

Caroline Slamet Margiyati

021314049

This mini thesis writing was aimed, first, to describe and to analyze the background of the involvement of Sultan Hamengku Buwono IX in the national movement; second, to describe and to analyze the roles of Sultan Hamengku Buwono IX during the national movement of 1940-1945; and third, to describe and to analyze the roles of Sultan Hamengku Buwono IX in early independence days.

The method used in this research was historical method and written descriptive-analytically. The approaches used were historical, psychological, political, socio-economic and personal.

The results of this paper were as follows. The involvement of Sultan Hamengku Buwono IX had several bases, namely his familial, educational and nationalism backgrounds.

The roles of Sultan Hamengku Buwono IX during the national movement of 1940-1945 in politic and sosio-economic fields are divided into two periods, namely the period of the Dutch administration and the period of Japanese occupation in Indonesia. Various political and socio-economical policies taken by Sultan Hamengku Buwono IX are the form of Sultan Hamengku Buwono IX responsibilities as the district head of Yogyakarta.

The roles of Sultan Hamengku Buwono IX in early independence days of 1945-1949 in political and socio-economical fields fall into three periods, namely after the proclamation of Republic of Indonesia Independence, the period when Yogyakarta was being the capital of Republic of Indonesia and the period of the Dutch Aggression. The political and socio-economic policies taken by Sultan Hamengku Buwono IX in early days of independence of 1945-1949 were to protect and to defend the Indonesian independence.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas karunia- Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”Peranan Sultan Hamengku Buwono IX Pada Masa Pergerakan Nasional 1940- 1949”**.

Penulis menyadari bahwa dalam mencari dan mengolah sumber untuk skripsi ini melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar- besarnya atas segala bantuan, dorongan, dukungan dalam bentuk apapun yang telah diberikan kepada penulis sejak proses awal penulisan sampai selesainya skripsi ini. Secara khusus penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
2. Ketua Jurusan Ilmu Sosial yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menulis skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberi pengarahan kepada kami.
4. Bapak Prof. Dr. P.J.Suwarno,S.H., sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan semangat, dukungan dan koreksi serta masukan hingga suksesnya skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Bapak Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R, S.Th, sebagai Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan koreksi serta telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs.Hb.Hery Santosa, yang telah memberikan masukan- masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Ibu tercinta dan kakakku yang telah memberikan bantuan moral spiritual pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. “Seseorang” yang setia mendengarkan keluh kesahku selama penulisan skripsi ini.
9. Karyawan perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah dengan sabar memberikan pelayanan peminjaman buku demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Rekan- rekan mahasiswa yang telah membantu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis: Eli, Tyas, Odi, Wiwid, Njoo sipit, Eno, Wawan, Catur, Melky dan semua teman- teman angkatan 2002.
11. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendorong dan membantu penulisan skripsi ini sampai selesai.

Semoga budi baik dari seluruh pihak diatas, diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, Juli 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Tinjauan Pustaka	16
E. Kajian Teori	19
F. Hipotesis	36
G. Metode dan Pendekatan Penelitian.....	36

H. Sistematika Penulisan	42
BAB II LATAR BELAKANG KETERLIBATAN SULTAN HAMENGKU	
BUWONO IX DALAM PERGERAKAN NASIONAL	
A. Latar Belakang Keluarga Sultan Hamengku Buwono IX	44
B. Latar Belakang Pendidikan	47
C. Dorajatun Menuju Tahta	51
D. Nasionalisme Hamengku Buwono IX	58
BAB III PERANAN SULTAN HAMENGKU BUWONO IX SELAMA	
PERGERAKAN NASIONAL 1940- 1945	
A. Bidang Politik	
1. Masa Pemerintahan Belanda	65
2. Masa Pendudukan Jepang	70
B. Bidang Sosial- Ekonomi	
1. Masa Pemerintahan Belanda	77
2. Masa Pendudukan Jepang	79
BAB IV PERANAN SULTAN HAMENGKU BUWONO IX SELAMA	
PERGERAKAN NASIONAL 1945- 1949	
A. Bidang Politik	
1. Setelah Proklamasi Kemerdekaan	88
2. Yogyakarta Ibukota RI	100
3. Agresi Belanda	104
B. Bidang Sosial- Ekonomi	125

BAB V KESIMPULAN.....	129
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN	139



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I. Gambar diri Sultan Hamengku Buwono IX	139
Lampiran II. Surat perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Kasultanan Yogyakarta tertanggal 18 Maret 1940	140
Lampiran III. Amanat Sultan Hamengku Buwono IX tertanggal 5 September 1945	170
Lampiran IV .Silabus dan Sistem Penilaian Berbasis Kompetensi	171

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari pergerakan nasional rakyat Indonesia. Pernyataan ini dipertegas dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.”

Dari pernyataan di atas tampak bahwa terdapat adanya suatu pengakuan secara resmi terhadap peranan perjuangan pergerakan Indonesia, sebagai perintis yang mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan dengan segala pengorbanannya.

Pergerakan nasional muncul berkat pemikiran-pemikiran dari golongan terpelajar. Secara resmi pergerakan nasional Indonesia diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908.¹ Dalam perkembangannya organisasi Budi Utomo diikuti oleh berbagai macam organisasi yang lain, di antaranya: Sarekat Islam, Muhamadiyah, Indische Partij, Taman Siswa, dll. Sebagian besar dari organisasi- organisasi tersebut lahir di Yogyakarta. Sehingga secara tidak langsung munculnya pergerakan nasional tidak terlepas dari kota Yogyakarta.

¹ Pringgodigdo , 1977: *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 7.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kota Yogyakarta merupakan *cikal bakal* dari munculnya pergerakan nasional Indonesia. Dalam perkembangannya, kota Yogyakarta berhasil mendapatkan pemimpin- pemimpin yang mempunyai semangat nasionalisme. Salah satu pemimpin tersebut adalah Sultan Hamengku Buwono IX. Sejarah Yogyakarta maupun sejarah Republik Indonesia tidak terlepas dari peran Sultan Hamengku Buwono IX. Beliau sangat berperan dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan timbul suatu kesan bahwa beliau adalah “ *the right man at the right place and on the right time*”.² Partisipasi Sultan Hamengku Buwono IX dalam pergerakan nasional dimulai pada saat beliau naik tahta pada tahun 1940.

Sultan Hamengku Buwono IX merupakan putera dari Pangeran Haryo Purboyo yaitu Sultan Hamengku Buwono VIII dan Raden Ayu Kustilah. Beliau lahir pada tanggal 12 April 1912 dan diberi nama Gusti Raden Mas Dorojatun. Pada saat Dorojatun berumur empat tahun ia dititipkan oleh ayahnya di rumah keluarga Mulder (seorang Belanda yang berprofesi sebagai kepala sekolah *Neutrale Hollands Javaanse Jongens School*).

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh G.R.M.Dorojatun di antaranya adalah sekolah *Frobel* (Taman Kanak- kanak) milik Juffrouw Willer yang terletak di Bintaran, *Europe Lagere School* (Sekolah Dasar untuk anak Eropa) di Yogyakarta , *Hogere Burger School* (Sekolah gabungan SMP dan SMA)di Semarang dan Bandung, kemudian pada bulan Maret tahun 1931 berangkat ke Belanda untuk

² Sartono Kartodirjo, 1995: *Seputar Yogyakarta dan Beberapa Tokoh Kepemimpinannya*, Ceramah dalam rangka pemberian Anugerah Hamengku Buwono IX, Yogyakarta, hlm. 11.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melanjutkan pelajaran Gymnasium (setingkat SMA) untuk mempersiapkan masuk *Rijkuniversiteit* di Leiden (universitas terkemuka dan berdiri pertama kali di kota Leiden) dan mengambil jurusan Indologi (gabungan dari jurusan ekonomi dan hukum).³

Berbagai macam pendidikan yang pernah ditempuh oleh Dorojatun telah berhasil membentuk karakter dan kepribadian Dorojatun . Pendidikan Barat yang telah ditempuh oleh Dorojatun membuatnya mempunyai dua segi kepribadian yaitu segi tradisional yang berakar pada sejarah dan tradisi dari kerajaan di pulau Jawa dan segi modern yang tampak jelas dalam sikap, pemikiran dan perjuangannya.

Pada tahun 1939 ketika Perang Dunia II meletus, Sultan Hamengku Buwono VIII menyuruh Dorojatun segera pulang ke Indonesia. Dorojatun mengikuti keinginan ayahnya dan segera pulang ke Indonesia dengan menaiki kapal Dempo. Setelah berminggu-minggu menempuh perjalanan dari Belanda menuju Indonesia, pada tanggal 18 Oktober 1939 kapal Dempo sampai di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Di pelabuhan Tanjung Priok, Dorojatun dijemput oleh keluarganya dan Sultan Hamengku Buwono VIII. Sebelum mereka pulang ke Yogyakarta, mereka beristirahat di hotel Des Indes Jakarta. Di hotel Des Indes inilah Dorojatun menerima Keris Kyai Jaka Piturun dari ayahnya.⁴ Tiga hari setelah kedatangan Dorojatun di tanah air, Dorojatun dan keluarganya pulang ke Yogyakarta dengan kereta api. Akan

³ Nurdyanto ,1998: *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwono IX*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, hlm.10.

⁴ Riwayat singkat mengenai Keris Jaka Piturun dapat dibaca dalam Atmakusumah, 1982: *Tahta Untuk Rakyat, Celah- celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, PT Gramedia, Jakarta, hlm.17-130.

tetapi dalam perjalanan menuju Yogyakarta, kondisi kesehatan Sultan Hamengku Buwono VIII melemah. Sehingga sesampainya di Yogyakarta beliau langsung dibawa ke Rumah Sakit *Onder de Bogen* (Panti Rapih). Kondisi kesehatan Sultan Hamengku Buwono VIII semakin melemah hingga akhirnya pada tanggal 22 Oktober 1939 beliau wafat.⁵

Sepeninggal Sultan Hamengku Buwono VIII, Gubernur Belanda, Dr. Lucien Adam mengambil alih kekuasaan *keraton* Yogyakarta sampai diangkatnya pengganti Sultan. Karena Dr. Lucien Adam telah mengetahui bahwa yang akan menjadi pengganti Sultan adalah Dorojatun.⁶ Pada awal November 1939 Dr. Lucien Adam mengajak Dorojatun untuk melakukan perundingan yang membicarakan masalah kontrak politik. Perundingan antara Dr. Lucien Adam dan Dorojatun memakan waktu yang cukup lama. Pada tanggal 12 Maret 1940 kontrak politik antara Pemerintah Hindia-Belanda dengan Kasultanan Yogyakarta ditandatangani oleh Dorojatun.⁷ Setelah perundingan antara pemerintah Belanda dengan Dorojatun selesai maka pada tanggal 18 Maret 1940 Dorojatun dinobatkan menjadi Sultan Yogyakarta yang

⁵ *Ibid*, hlm.38.

⁶ Pada tanggal 26 Oktober 1939 Dorojatun mengumpulkan semua saudara- saudaranya, terutama putera- putera Sultan Hamengku Buwono VII dan VIII. Secara langsung Dorojatun menanyakan kepada mereka siapa yang mempunyai keinginan untuk menjadi Sultan Hamengku Buwono IX. Ternyata semua saudara- saudara Dorojatun mendukungnya untuk menjadi Sultan. Lihat Kustiniyati Mochtar dalam Atmakusumah, *op.cit*, hlm. 40.

⁷ Kontrak politik yang ditandatangani pada tanggal 12 Maret 1940 ini merupakan kontrak politik yang terakhir antara kasultanan Yogyakarta dengan pemerintah Belanda. Soedarisman Poerwokoesomo telah membahas kontrak politik itu dalam bukunya *Kesultanan Yogyakarta*, Gama Press, Yogyakarta, 1985, hlm 64 dst.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bergelar *Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah Kaping IX*.⁸

Gelar Sultan Hamengku Buwono IX ini mempunyai arti bahwa Sultan adalah penguasa sah di dunia dan *Senopati Ing Ngalogo* yang memiliki arti bahwa Sultan mempunyai kekuasaan untuk menentukan perdamaian atau peperangan dan panglima perang pada saat terjadi peperangan. Sultan adalah *Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama* yang berarti penata agama sebab Sultan diakui sebagai *Kalifatullah* yang menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW.

Rakyat Yogyakarta menganggap bahwa Sultan adalah raja yang memiliki kekuasaan politik, militer dan keagamaan yang absolut dan diakui secara tradisional. Kedudukan Sultan berakar dengan kokoh pada struktur masyarakat Yogyakarta sehingga hal ini menyebabkan semua perintah Sultan adalah hukum dan tiap keinginannya adalah perintah bagi rakyatnya.⁹ Tradisi rakyat Yogyakarta yang seperti ini berlangsung secara turun temurun, bahkan sampai sekarang.

Pada saat Belanda menduduki Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX memerintah Yogyakarta berdasarkan kontrak politik dengan pemerintah Belanda yang telah ditandatanganinya. Menurut kontrak politik tersebut, dalam menjalankan pemerintahannya Sultan dibantu oleh *Pepatih Dalem* yang dipilih oleh Gubernur Belanda. Dengan adanya *Pepatih Dalem* ini maka seolah-olah terdapat dua birokrasi

⁸ Atmakusumah, *op.cit*, hlm. 52.

⁹ Selo Soemardjan, 1986: *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 25.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemerintahan di Yogyakarta, yakni birokrasi pemerintahan *karaton* yang berpusat di *Karaton* dan birokrasi pemerintahan nagari yang dikontrol oleh Gubernur Belanda melalui *Pepatih Dalem* dan berpusat di *Kepatihan*.¹⁰

Kekuasaan Belanda di Yogyakarta tidak berlangsung lama, hal ini dikarenakan pada tanggal 5 Maret 1942 Jepang datang ke Yogyakarta dan pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dengan menyerahnya Pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang maka berakhirilah pendudukan Belanda di Indonesia yang sudah berlangsung kurang lebih selama tiga ratus lima puluh tahun. Akan tetapi dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang maka dimulailah periode baru di bawah pemerintahan Jepang.

Ketika Jepang mulai menanamkan kekuasaannya di Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX menyadari bahwa pemerintah militer Jepang tidak berbeda dengan pemerintah kolonial Belanda yang mempunyai keinginan untuk menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Oleh karena itu untuk mengimbangi kekuasaan Jepang, Sultan Hamengku Buwono IX menyusun strategi perjuangan dengan cara diplomasi. Hal ini dilakukan oleh Sultan karena Sultan menyadari bahwa Sultan dan rakyat Yogyakarta belum mempunyai kekuatan untuk melawan pemerintah Jepang secara terang-terangan.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Sultan adalah memberitahu pemerintah Jepang agar segala sesuatu yang berkaitan dengan daerah kasultanan harus

¹⁰ P.J.Suwarno, 1994: *Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 68.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dibicarakan dengannya terlebih dahulu dan Sultan juga menyuruh *Pepatih Dalem* supaya dalam menjalankan tugasnya hanya mendengarkan perintah dari Sultan. Sultan membatasi kekuasaan *Pepatih Dalem* dengan tujuan untuk mengurangi peranan dan kekuasaan dari *Pepatih Dalem*. Hal ini dilakukan oleh Sultan karena dalam prakteknya seringkali *Pepatih Dalem* dijadikan sebagai alat oleh penjajah (Belanda) untuk diadu domba dengan Sultan.¹¹

Beberapa bulan setelah Jepang menguasai Indonesia, Jepang mengadakan perubahan alat pemerintahan. Daerah seluruh Jawa dan Madura, kecuali Kesunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta dibagi atas *Syu*, *Syi* (kota praja), *Ken* (kabupaten) ,*Gun* (kawedanan), *Son* (kecamatan) dan *Ku* (desa). Surakarta dan Yogyakarta disebut sebagai daerah *Koci* (Kasultanan).¹² Sultan Hamengku Buwono IX diangkat sebagai Yogyakarta Ko. Sedangkan mengenai daerah kekuasaan Sultan masih tetap seperti pada jaman pendudukan Belanda, yakni Kabupaten Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo.

Pada saat Jepang menduduki Yogyakarta, Jepang menerapkan sistem kerja *Romusha* untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari daerah Yogyakarta. Tujuan utama Jepang memanfaatkan tenaga rakyat adalah untuk menghasilkan bahan pangan yang lebih banyak. Mereka mengenalkan bibit baru, teknik baru untuk membuat pupuk kompos dari sampah kepada petani. Agar rakyat

¹¹ Soedarisman Poerwokoesomo, 1985: *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 9.

¹² Djamal Marsudi,dkk, 1985: *Sejarah Perjuangan Yogya Benteng Proklamasi*, Badan Musyawarah Musea, Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm.20.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengikuti semua perintah dari Jepang, pemerintah Jepang tidak segan- segan mempergunakan cara- cara kekerasan.¹³

Akan tetapi Sultan Hamengku Buwono IX berusaha melindungi rakyat Yogyakarta agar terhindar dari kerja *Romusha* dengan cara memberikan laporan palsu kepada pemerintah Jepang tentang keadaan Yogyakarta. Usaha yang dilakukan oleh Sultan ini berhasil bahkan Jepang bersedia memberikan bantuan kepada Sultan untuk membangun saluran irigasi yang dikenal dengan nama “ Selokan Mataram “. ¹⁴

Sikap Sultan yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia tampak jelas sehari setelah diselenggarakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mengirimkan ucapan selamat kepada Ir. Soekarno dan Moh. Hatta atas terselenggaranya Proklamasi Kemerdekaan dan pada tanggal 20 Agustus 1945 menyatakan sanggup berdiri di belakang kepemimpinan mereka.

Pemerintah pusat menghargai sikap tegas Sultan Hamengku Buwono IX sehingga pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan Piagam Kedudukan yang berisi penetapan kedudukan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Kepala Daerah Kerajaan Yogyakarta yang merupakan daerah RI dengan tugas mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah

¹³ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁴ Selokan Mataram ini sampai sekarang masih ada dan berfungsi sebagai sarana irigasi bagi petani di daerah Yogyakarta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Yogyakarta sebagai bagian dari RI.¹⁵ Piagam penetapan kedudukan ini merupakan salah satu bentuk kepercayaan pemerintah Republik Indonesia terhadap Sultan Hamengku Buwono IX. Akan tetapi piagam penetapan ini baru diserahkan pada tanggal 6 September 1945 (sehari setelah Sultan mengeluarkan amanat).

Keadaan bangsa Indonesia pada masa-masa awal setelah memproklamasikan kemerdekaannya masih diwarnai dengan berbagai macam terror yang dilakukan oleh tentara NICA, Belanda. Pada bulan Oktober, November dan Desember 1945 Jakarta menjadi ajang terror dan kekerasan. Sehingga pada sidang kabinet tanggal 3 Januari 1946 diambil suatu keputusan untuk memindahkan kedudukan pemerintah pusat Republik Indonesia ke Yogyakarta .¹⁶ Tanggal 4 Januari 1946 pemerintah pusat Republik Indonesia telah berhasil dipindahkan ke Yogyakarta. Perpindahan kedudukan pemerintah pusat ini dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak Belanda.

Dengan adanya perpindahan pemerintah pusat dari Jakarta ke Yogyakarta maka secara otomatis Yogyakarta menjadi ibukota revolusi. Dalam perkembangannya ternyata Yogyakarta di bawah Sultan Hamengku Buwono IX mampu melanjutkan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Pada tahun 1946 untuk pertama

¹⁵ G.Moedjanto, 1994: *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.55.

¹⁶ Dahana,dkk , 1988: *Sri Sultan: Hari- hari Hamengku Buwono IX*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta , hlm.34.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kalinya Sultan Hamengku Buwono IX terpilih sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Syahrir III.¹⁷

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, di berbagai daerah dibentuk laskar rakyat dengan tujuan untuk membantu TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam menanggulangi serangan musuh, tak terkecuali di Yogyakarta. Di Yogyakarta laskar rakyat berhasil dibentuk tanpa didominasi oleh suatu golongan, melainkan merupakan gabungan dari semua unsur rakyat. Panglima laskar rakyat tersebut adalah Sultan Hamengku Buwono IX dibantu oleh Selo Soemardjan (kepala staf). Untuk menghimpun kekuatan, secara teratur diadakan latihan bersama.

Pada tanggal 19 Desember 1948 diadakan latihan bersama yang diikuti oleh unsur kelaskaran, dapur umum dan unit palang merah. Pada pagi hari semua unsur laskar rakyat telah berkumpul dan mempersiapkan diri untuk memulai latihan. Mendadak terdengar rentetan letusan senjata dan pesawat meraung-raung di atas Yogyakarta. Rakyat mengira bahwa suara letusan senjata dan pesawat- pesawat tersebut adalah bagian dari latihan. Akan tetapi lama kelamaan mereka menyadari bahwa suara letusan senjata dan pesawat- pesawat itu adalah serangan dari pihak asing (Belanda). Sejumlah pesawat asing mulai menyerang lapangan terbang Maguwo (Adisucipto).¹⁸ Keadaan pada waktu terjadinya serangan ini sangat tidak seimbang. Di satu pihak Belanda dengan persenjataan yang cukup lengkap dan di lain

¹⁷ Atmakusumah, *op.cit*, hlm. 69.

¹⁸ Pesawat asing ini dikenal dengan sebutan cocor merah dan serangan pasukan Belanda ini dikenal dengan Agresi Militer Belanda II. Riwayat singkatnya dapat dibaca dalam Djamel Marsudi, *op.cit*, hlm.129.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pihak penjagaan keamanan Maguwo dengan persenjataan minim dan kondisi yang tidak siap. Sehingga hal ini mengakibatkan pasukan Belanda dengan cepat menguasai kota Yogyakarta.

Ketika terjadinya serangan oleh pasukan Belanda ini, Presiden Soekarno dengan beberapa orang menteri seperti Ir. Djuanda, Mr. Ali Sastroamidjojo dan Kusnan berada di dalam Gedung Negara. Sedangkan Moh. Hatta dalam perjalanan menuju Kaliurang. Setelah mengetahui terjadinya aksi penyerangan oleh pasukan Belanda, Sultan Hamengku Buwono IX segera menemui Presiden Soekarno dan menyarankan agar segera diadakan sidang darurat. Karena Moh. Hatta sedang tidak berada di tempat, maka Presiden Soekarno menyuruh Sultan Hamengku Buwono IX untuk menjemputnya di Kaliurang.

Dalam perjalanan menuju Kaliurang, Sultan Hamengku Buwono IX berpapasan dengan mobil yang membawa Moh. Hatta menuju kembali ke dalam kota. Setelah mengetahui hal ini Sultan segera menuju kembali ke Gedung Negara. Dalam perjalanan menuju Gedung Negara, pesawat Belanda semakin ganas menjatuhkan granat, sehingga Sultan terpaksa melalui jalan-jalan desa. Sesampainya di Gedung Negara ternyata sidang telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan dua keputusan, yakni: Pemerintah RI tetap di dalam kota Yogya, kekuasaan pemerintahan RI akan dialihkan kepada Pemerintah Darurat RI (PDRI) yang akan dipimpin oleh Sjarifudin Prawiranegara yang berkedudukan di Sumatera.¹⁹

¹⁹ Atmakusumah, *op.cit*, hlm. 71.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Setelah pasukan Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta, para pemimpin Indonesia diberangkatkan ke tempat pengasingan. Presiden Soekarno, Sutan Sjahrir dan Haji Agus Salim diberangkatkan ke Brastagi, sementara Wakil Presiden Moh. Hatta, Mr. Ali Sastroamidjojo dan Mr. Assaat diberangkatkan ke Bangka. Akan tetapi pada akhirnya para pemimpin Indonesia ini dijadikan satu di Bangka.

Menurut pandangan pasukan Belanda, kota Yogyakarta telah vakum karena para pemimpinnya telah disingkirkan sehingga mereka menganggap kekuatan rakyat dan Republik yang baru saja diproklamasikan sudah tidak ada. Akan tetapi pandangan Belanda ini tidak bertahan lama karena pada malam hari sering terjadi penyerangan terhadap pasukan-pasukan Belanda yang dilakukan oleh rakyat Yogyakarta.

Keadaan Yogyakarta yang tidak jelas tetap berlangsung tanpa ada perubahan. Penderitaan dan kekacauan berlangsung dimana-mana. Sultan Hamengku Buwono IX menyadari bahwa keadaan seperti ini menyebabkan menurunnya semangat juang rakyat. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian Sultan menyusun suatu rencana untuk mengembalikan semangat juang rakyat dan memberitahukan kepada dunia Internasional bahwa pemerintah Republik Indonesia masih ada. Pada tanggal 13 Februari 1949 Sultan Hamengku Buwono IX mengadakan pertemuan dengan Letnan Kolonel Soeharto untuk mempersiapkan suatu serangan umum. Kontak-kontak selanjutnya dilakukan dengan mempergunakan bantuan para kurir. Setelah melalui

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berbagai macam pembicaraan, diputuskan pada tanggal 1 Maret 1949 akan diadakan Serangan Umum yang akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto.

Serangan Umum dilaksanakan pada pagi hari dan berlangsung selama enam jam. Ketika serangan ini dilaksanakan, pasukan Belanda berada dalam keadaan yang tidak siap sehingga mudah dikalahkan. Setelah rakyat berhasil menduduki kota Yogyakarta selama enam jam, rakyat kembali ke tempat persembunyian mereka masing-masing. Dengan adanya serangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto ini maka rakyat mempunyai semangat juang kembali dan dunia internasional mengetahui bahwa Republik Indonesia masih ada.²⁰

Adanya serangan umum yang dilakukan oleh rakyat Yogyakarta mengakibatkan dunia internasional menganggap pemerintah Belanda tidak bisa memelihara keamanan di daerah yang telah mereka duduki dan lebih bersimpati kepada pihak Indonesia dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan diplomatik dibawah PBB. Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan antara Mr. Moh. Roem dan Dr. Van- Royen yang dipimpin oleh Cockran (anggota komisi PBB untuk masalah Indonesia). Pada tanggal 7 Mei 1949 ditandatangani Persetujuan Roem Royen yang isinya : penghentian tembak-menembak, penarikan mundur tentara Belanda dari Yogyakarta dan pemimpin- pemimpin RI dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta.²¹

²⁰ Riwayat singkat mengenai jalannya Serangan Umum ini terdapat dalam surat dari Sultan Hamengku Buwono IX yang ditujukan kepada Mr. Sudjono, lihat *ibid*, hlm 84- 87 dan Djamal Marsudi, dkk, op.cit, hlm.145.

²¹ Sartono Kartodirjo, 1977: *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.70.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam percaturan politik dan perjuangan kemerdekaan Indonesia secara lebih jauh dimulai pada tahun 1946. Pada saat terbentuk Kabinet Syahrir III, Hamengku Buwono IX ditunjuk sebagai salah satu Menteri Negara. Sejak saat itu sampai menjelang akhir dasawarsa 1970-an, ia selalu tampil dalam setiap bentuk kabinet dan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mendiskripsikan dan menganalisa mengenai peran Sultan Hamengku Buwono IX pada masa pergerakan nasional 1940-1949. Ada beberapa alasan dipilihnya tahun 1940- 1949 yaitu:

Pertama : Tahun 1940 dijadikan sebagai batasan waktu penulisan karena pada tahun ini, Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi Sultan keraton Yogyakarta.

Kedua : Kedekatan emosional karena penulis merupakan rakyat Yogyakarta

Ketiga : Sampai tahun 1949 karena pada tahun ini pemerintah pusat Republik Indonesia dipindahkan kembali ke Jakarta dan pada tahun ini Belanda menarik tentaranya dari Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Dalam skripsi yang berjudul “ Peranan Sultan Hamengku Buwono IX Pada Masa Pergerakan Nasional 1940-1949 ”, penulis membatasi pada beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang melatarbelakangi keterlibatan Sultan Hamengku Buwono IX dalam pergerakan nasional?

2. Bagaimanakah peranan Sultan Hamengku Buwono IX selama pergerakan nasional 1940-1945 dalam bidang politik dan sosial-ekonomi?
3. Bagaimanakah peranan Sultan Hamengku Buwono IX pada masa awal kemerdekaan 1945-1949 dalam bidang politik dan sosial-ekonomi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis:

- a. Latar belakang keterlibatan Sultan Hamengku Buwono IX dalam pergerakan nasional
- b. Peranan Sultan Hamengku Buwono IX selama pergerakan nasional 1940-1945
- c. Peranan Sultan Hamengku Buwono IX pada masa awal kemerdekaan 1945-1949.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi dunia pendidikan, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang Sultan Hamengku Buwono IX

- b. Bagi mahasiswa sejarah, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang peranan Sultan Hamengku Buwono IX pada masa pergerakan nasional 1940-1949
- c. Bagi pembaca, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memperluas pengetahuan sejarah khususnya tentang Sultan Hamengku Buwono IX.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mempergunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera lain atau dengan alat mekanis atau selanjutnya secara singkat disebut sebagai saksi utama.²²

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumber primer merupakan sumber yang didapat secara langsung oleh orang pertama atau seseorang yang melihat dengan mata kepala sendiri suatu peristiwa yang terjadi. Sumber yang akan digunakan sebagai sumber primer dalam penulisan skripsi ini adalah:

Surat yang ditulis oleh Sultan Hamengku Buwono IX pada tanggal 26 Maret 1949 yang ditujukan kepada Mr. Sudjono di Jakarta, seperti yang tercantum dalam

²² Louis Gottschalk, 1985: *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notokusanto, UI Press, Jakarta, hlm.35.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

buku *Tahta Untuk Rakyat, Celah- Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX* halaman 84-87

Surat ini berisi suatu uraian tentang peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 secara kronologis yang ditulis oleh Sultan Hamengku Buwono IX sendiri.

Surat Perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Yogyakarta tertanggal 18 Maret 1940

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh. Surat perjanjian ini mengatur tentang kontrak politik antara pemerintah Hindia Belanda dengan Kasultanan Yogyakarta yang mengatur kedudukan dari Sultan dan kedudukan dari *pepatih dalem*. Isi lengkap mengenai perjanjian ini terdapat dalam buku yang ditulis oleh Soedarisman Porwokoesomo yang berjudul *Kesultanan Yogyakarta*, Gama Press, Yogyakarta, 1985, hal 64 dst.

Amanat Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kandjeng Sultan Jogjakarta tertanggal 5 September 1945, seperti yang tercantum dalam buku *Tahta Untuk Rakyat, Celah- Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX* halaman 301.

Amanat ini merupakan suatu pernyataan dari Sultan Hamengku Buwono IX yang terdiri dari tiga hal, yaitu: negeri *Ngajogjakarta Hadiningrat* yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia, Sultan Hamengku Buwono IX adalah sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam *Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat*, hubungan antara *Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat* dengan pemerintah pusat Republik Indonesia bersifat langsung.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Selain sumber primer di atas, ada juga sumber lain yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahnya.²³

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dari orang kedua, yaitu sumber yang diperoleh dari seseorang yang tidak langsung menyaksikan peristiwa yang terjadi.

Buku- buku yang akan dijadikan sebagai sumber sekunder adalah:

Tahta Untuk Rakyat, Celah- celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX

Buku ini ditulis oleh Atmakusumah, terbitan Gramedia Jakarta tahun 1982. Buku ini mengisahkan tentang Sultan Hamengku Buwono IX dari latar belakang keluarganya, pendidikannya dan peran beliau pada masa pendudukan Belanda dan Jepang.

Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta Tahun 1942- 1974

Buku ini ditulis oleh P.J.Suwarno, terbitan Kanisius Yogyakarta tahun 1994. Buku ini mengisahkan tentang peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam bidang politik dari tahun 1942- 1974.

Sri Sultan, Hari- hari Hamengku Buwono IX

²³ Ibid, hlm.35.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Buku ini ditulis oleh Dahana,dkk, terbitan PT Pustaka Utama Grafiti Jakarta tahun 1988. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidup Sultan Hamengku Buwono IX dari beliau lahir sampai beliau wafat.

Perubahan Sosial di Yogyakarta

Buku ini ditulis oleh Selo Sumarjan, terbitan Gajah Mada University Press Jakarta tahun 1986. Buku ini mengisahkan tentang kondisi Yogyakarta pada masa pendudukan Belanda, Jepang dan masa kemerdekaan.

Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwana IX

Buku ini ditulis oleh Nurdiyanto,dkk, terbitan Depdikbud Jakarta tahun 1998. Buku ini mengisahkan tentang biografi Sultan Hamengku Buwono IX dan peranan beliau dimulai dari masa kolonial Belanda sampai sumbangan pemikiran beliau.

Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman

Buku ini ditulis oleh G. Moedjanto, terbitan Kanisius Yogyakarta tahun 1994. Buku ini mengisahkan tentang sejarah kasultanan Yogyakarta dimulai dari Pangeran Mangkubumi sampai dengan Sultan Hamengku Buwono IX.

E. Kajian Teori

Sebelum masuk pada pembahasan permasalahan perlu dijelaskan beberapa konsep yang akan digunakan dalam penulisan ini. Konsep- konsep tersebut adalah peranan, pergerakan nasional dan nasionalisme.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Istilah “ peranan “ berasal dari kata dasar “ peran ” yang artinya pemain sandiwara atau aktor, yang berakhiran –an, sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat menjadi bagian yang memegang pimpinan utama.²⁴

Jadi yang dimaksud dengan peranan lebih mengacu pada peran Sultan Hamengku Buwono IX sebagai kepala daerah Yogyakarta.

Sebagai kepala daerah Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX selalu bertanggung jawab terhadap daerah yang dipimpinnya. Ketika di Yogyakarta terjadi kekacauan dan terror akibat penjajahan, Sultan Hamengku Buwono IX mengambil kebijakan- kebijakan politik dan sosial-ekonomi untuk memajukan rakyat. Selain itu sebagai kepala daerah Yogyakarta yang merupakan bagian dari Republik Indonesia, Sultan Hamengku Buwono IX juga ikut serta terlibat dalam perjuangan pemerintah RI untuk mendapatkan kemerdekaan dan rela meminjamkan daerahnya menjadi pusat perjuangan politik dan militer bangsa Indonesia pada tahun 1946- 1949 (Yogyakarta ibukota RI).

Peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam bidang politik dan sosial ekonomi dimulai pada pergerakan nasional periode 1940-1945. Pergerakan nasional periode 1940-1945 ditandai dengan masa pemerintahan Belanda dan masa pendudukan tentara Jepang di Indonesia.

Dalam bidang politik, langkah pertama yang ditempuh oleh Sultan pada masa pemerintahan Belanda adalah dengan cara mengelompokkan keluarga Hamengku

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, 1976: *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.506.

Buwono VIII dan keluarga Hamengku Buwono IX menjadi dua kelompok agar Sultan dapat dengan mudah mengontrol dan melindungi keluarganya.²⁵

Sedangkan pada masa pendudukan tentara Jepang, Sultan tidak berani menentang pemerintah Jepang secara terang-terangan karena Sultan menyadari bahwa kekuatan antara pasukan Jepang dan pasukan Yogyakarta sangat tidak seimbang. Jika Sultan mengadakan perlawanan secara terang-terangan maka pasukan Yogyakarta akan kalah. Sultan hanya memberikan peringatan kepada pemerintah Jepang agar segala sesuatu yang berkaitan dengan daerah kasultanan dibicarakan dengan Sultan.

Selain itu Sultan juga memerintahkan *pepatih dalem* supaya dalam menjalankan tugasnya hanya mendengarkan perintah dari Sultan. Cara ini dilakukan oleh Sultan karena ia ingin membatasi wewenang dari *pepatih dalem*, agar tidak dijadikan sebagai alat oleh penjajah untuk mengadu domba seperti pada masa pemerintahan Belanda.²⁶

Dalam bidang sosial ekonomi, pada masa pemerintahan Belanda, Sultan Hamengku Buwono IX berusaha memajukan ekonomi rakyatnya dengan cara mengambil peranan sebagai wiraswasta. Sultan berusaha menghidupkan kembali perusahaan- perusahaan rakyat (pertanian dan perkebunan) dengan cara mengaktifkan kembali perkebunan tembakau.²⁷

²⁵ P.J.Suwarno, *op.cit*, hlm.68.

²⁶ Nudiyanto, *op.cit*, hlm.21.

²⁷ Selo Soemardjan, *op.cit*, hlm.237.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada masa pendudukan Jepang, untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya, Sultan membuka beberapa sekolah yang diperuntukkan bagi umum. Sekolah-sekolah ini diantaranya adalah Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Tinggi. Selain itu untuk memajukan dan melindungi rakyatnya, ketika pemerintah Jepang sedang gencar-gencarnya mengadakan sistem kerja paksa (*Romusha*), Sultan berhasil membebaskan rakyat Yogyakarta dari kerja *Romusha* karena Sultan berhasil mengelabui tentara Jepang dengan menyembunyikan angka-angka statistik yang sebenarnya di daerah Yogyakarta.

Sultan membuat laporan angka- angka statistik palsu mengenai keadaan Yogyakarta yang menyebutkan bahwa daerah Yogyakarta adalah daerah yang minus karena tanahnya tandus. Dengan kecerdikannya justru Sultan berhasil mendapatkan bantuan dana untuk pembangunan saluran air yang dikenal dengan nama” Selokan Mataram”. Adanya program pembangunan Selokan Mataram telah berhasil membebaskan rakyat Yogyakarta dari kerja *Romusha*. Selain itu dengan dibangunnya saluran irigasi Selokan Mataram ini, hasil pertanian di daerah Yogyakarta mengalami peningkatan sehingga kehidupan rakyat Yogyakarta menjadi lebih baik.²⁸

Untuk memajukan rakyatnya, Sultan mengadakan kunjungan secara langsung ke desa-desa untuk melihat keadaan rakyatnya. Setelah Sultan melihat keadaan rakyatnya, ia kemudian menyusun program-program untuk memajukan ekonomi rakyatnya. Program-program yang disusun terdiri dari program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek difokuskan pada pembangunan

²⁸ Nurdianto, *op.cit*, hlm.27.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

saluran irigasi untuk mencegah banjir dan mengairi sawah. Sedangkan program jangka panjang berupa penghutanan kembali daerah- daerah yang tandus (Gunung Kidul dan Kulon Progo).²⁹

Peranan Sultan Hamengku Buwono IX selama pergerakan nasional periode 1945-1949 terbagi dalam bidang politik dan sosial- ekonomi. Pergerakan nasional periode 1945-1949 ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan RI, Yogyakarta menjadi ibukota RI dan Agresi Belanda.

Dalam bidang politik, beberapa saat setelah diselenggarakannya Proklamasi Kemerdekaan, secara spontan Sultan Hamengku Buwono IX mengirimkan telegram yang berisi ucapan selamat atas terselenggaranya Proklamasi Kemerdekaan kepada Ir.Soekarno. Telegram yang kedua dikirim pada tanggal 20 Agustus 1945 yang isinya secara tegas menyatakan sanggup berdiri di belakang kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh.Hattta.

Pada awal kemerdekaan situasi bangsa Indonesia terutama Jakarta yang pada waktu itu menjadi ibukota Republik masih diliputi ketegangan. Teror dan ancaman pembunuhan terhadap para pemimpin Republik yang baru saja terbentuk terjadi di mana-mana. Mengetahui adanya hal tersebut, Sultan Hamengku Buwono IX tidak tinggal diam dan segera mengirim kurir ke Jakarta dan menyarankan agar pemerintah pusat untuk sementara dipindahkan ke Yogyakarta dengan alasan keadaan kota Yogyakarta lebih aman jika dibandingkan dengan keadaan Jakarta. Pemerintah pusat

²⁹ P.J.Suwarno, *op.cit*, hlm.110.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menyetujui saran Sultan dan pada tanggal 4 Januari 1946 pemerintah pusat secara resmi dipindahkan ke Yogyakarta.³⁰

Ketika Belanda melakukan aksi militernya yang pertama (Agresi Belanda I) tanggal 21 Juli 1947 untuk kembali menguasai Republik Indonesia, dengan penuh keberanian Sultan membantu menjaga dan mempertahankan kemerdekaan RI. Untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas keamanan di daerah Yogyakarta, Presiden Soekarno mengangkat Sultan sebagai Gubernur Jenderal dengan pangkat Letnan Jenderal untuk memperkuat pertahanan di Yogyakarta.

Pada tanggal 18 Desember 1948, pasukan Belanda kembali melakukan aksi militernya yang dikenal dengan nama Agresi Belanda II. Secara membabi buta pasukan Belanda menjatuhkan bom dan menembaki beberapa daerah di Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo (Adisucipto) dijadikan sebagai sasaran utama kekejaman Belanda. Saat terjadinya serangan pasukan Belanda itu, kondisi kesehatan Sultan Hamengku Buwono IX sedang terganggu. Akan tetapi karena Republik dalam keadaan terancam maka Sultan segera bertindak dengan memanggil K.R.T.Honggowongso agar segera berangkat ke Gunung Kidul dan mempersiapkan segala sesuatu karena jika keadaan di dalam kota Yogyakarta sudah tidak aman lagi maka pusat pemerintahan akan dipindahkan disana.

Selain menghubungi K.R.T.Honggowongso, Sultan juga menghubungi para pamong praja di daerah Yogyakarta dan memberikan instruksi agar mereka harus berusaha mempertahankan kedudukannya agar jangan sampai diperalat oleh pihak

³⁰ Dahana,dkk, *op.cit*, hlm.34.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Belanda dan mereka harus tetap berada di dalam wilayahnya masing- masing untuk memimpin dan melindungi rakyatnya.

Sultan juga menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan serangan balasan terhadap pasukan Belanda yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949. Serangan ini dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret. Berkat serangan balasan ini, pada akhirnya pasukan Belanda rela mengakui kedaulatan pemerintah RI dan segera menarik pasukannya dari wilayah Indonesia.³¹

Dalam bidang sosial, pada saat bangsa Indonesia sedang disibukkan oleh berbagai macam perjuangan bersenjata dan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan, di kota Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1946 didirikan balai perguruan tinggi yang diberi nama Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada. Ide pendirian perguruan tinggi ini berasal dari Yayasan Balai perguruan Tinggi Gajah Mada dan dewan pengawas yang diketuai oleh Sultan Hamengku Buwono IX.³²

Untuk kelancaran proses belajar dan mengajar, Sultan Hamengku Buwono IX rela meminjamkan Pagelaran dan SitiHinggil untuk dijadikan sebagai tempat belajar, selain itu Sultan juga meminjamkan ruang- ruang disekitar *keraton*, seperti bangsal Mangkubumen, Pugeran, Mangkuwilayan dan Wijilan.

Dalam bidang ekonomi, untuk membantu perekonomian rakyatnya karena blokade ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, secara sukarela Sultan

³¹ Sejarah singkat serangan umum 1 Maret dapat dilihat dari surat Sultan Hamengku Buwono IX yang ditulis pada tanggal 26 Maret 1949 dan ditujukan kepada Mr.Sudjono. Kutipan surat tersebut terdapat dalam tulisan Kustiniyati Mochtar dalam *Atmakusumah*, *op.cit*, hlm.84.

³² Tentang sejarah pendirian balai perguruan tinggi Gajah Mada lihat tulisan Tjokrosiswojo dalam Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 Tahun, 1956: *Kota Yogyakarta 200 Tahun, 7 Oktober 1756-7 Oktober 1956*, hlm.101-107.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memberikan sebagian tabungan kasultanan untuk membiayai kelangsungan hidup RI. Sultan membagi- bagikan uang pribadinya secara diam-diam untuk menunjang kehidupan para pemimpin maupun pegawai pemerintah yang sudah lama tidak menerima gaji. Selain itu Sultan juga memberikan uang pribadinya untuk membiayai keperluan pasukan gerilya yang berjuang melawan penjajah.³³

Peranan Sultan Hamengku Buwono IX pada masa pergerakan nasional 1940-1949 tidak terlepas dari konsep mengenai kepemimpinannya. Konsep“ kepemimpinan “ menurut Ordway Tead dalam bukunya yang berjudul *The Art of Leadership*, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang- oarng agar bekerjasama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sedangkan menurut Howard H.Hoyt dalam bukunya yang berjudul *Aspect of Modern Public Administration*, kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingakh laku manusia dan kemampuan untuk membimbing orang.

Kimball Young, seorang professor sosiologi Amerika mengartikan kepemimpinan sebagai bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan akseptansi/ penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus.³⁴

³³ Atmakusumah, *op.cit*, hlm.211.

³⁴ Kartini Kartono, 1983: *Pemimpin dan Kepemimpinan*, CV.Rajawali, Jakarta, hlm.40.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok tertentu.

Max Weber membedakan kepemimpinan menjadi tiga bagian yang berdasarkan pada keabsahannya, yakni: kepemimpinan tradisional, kepemimpinan rasional dan kepemimpinan kharismatik. Kepemimpinan tradisional adalah kepemimpinan yang tuntutan keabsahannya didasarkan atas suatu kepercayaan yang telah ada pada kesucian tradisi yang amat kuno. Kepemimpinan rasional adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum yang didasarkan atas kepercayaan terhadap legalitas peraturan-peraturan dan hak bagi mereka yang memegang kekuasaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kepemimpinan kharismatik adalah kepemimpinan yang didapatkan dari pengabdian diri terhadap kesucian, kepahlawanan tertentu atau sifat yang patut dicontoh dari seseorang.³⁵

Kalau dilihat dari tipe kepemimpinan menurut Max Weber, maka kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX termasuk dalam tipe kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan kharismatis. Hal ini dikarenakan kepemimpinan yang diperoleh Sultan Hamengku Buwono IX merupakan kepemimpinan yang diperoleh berdasarkan tradisi turun menurun dalam *keraton* Yogyakarta yang telah memenuhi persyaratan formal untuk diangkat menjadi seorang Sultan. Persyaratan tersebut diantaranya adalah: 1) keturunan raja dan normal lahir batin; 2) putra laki-laki tertua atau satu-satunya putra laki-laki dari permaisuri (*garwapadmi*); putra laki-laki

³⁵ Sartono Kartodirjo, 1984: *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*, Penerbit LP3S, Jakarta, hlm.166.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tertua dari selir (*garwa ampeyan*); atau saudara laki-laki raja, paman atau saudara tua dari ayah raja; 3) mendapat surat kekancingan (ketetapan) dari pendahulunya.³⁶ Sebagai seorang Sultan, Sultan Hamengku Buwono IX telah memenuhi beberapa persyaratan formal untuk diangkat menjadi seorang sultan Yogyakarta.

Selain itu Sultan Hamengku Buwono IX juga memiliki daya tarik dan *perbawa* yang luar biasa sehingga ia mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat banyak. Totalitas kepribadian Sultan Hamengku Buwono IX memancarkan pengaruh dan daya tarik yang besar, sehingga sudah selayaknya kalau Sultan Hamengku Buwono IX digolongkan dalam tipe kepemimpinan kharismatis.

Kedudukan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai kepala daerah Yogyakarta semakin mendukung keterlibatannya dalam pergerakan nasional karena ia merupakan seorang raja yang dihormati. Konsep keagungbinataran melekat erat dalam diri Sultan Hamengku Buwono IX. Hal ini dikarenakan sebagai seorang sultan, ia berhasil menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kewajibannya yang besar. Kekuasaan yang besar di satu pihak dan kewajiban yang seimbang di pihak lain merupakan isi konsep kekuasaan Jawa, seperti yang terlihat dalam kekuasaan raja-raja Mataram.³⁷

Dalam konsep kekuasaan Jawa, pemberian kekuasaan kepada seorang Sultan harus diimbangi dengan ketentuan bahwa seorang sultan harus *wicaksana*(bijaksana), *ber budi bawa leksana*, *ambeg adil para marta* (mempunyai budi luhur mulia dan sifat adilnya terhadap sesama). Di samping itu seorang sultan mempunyai tugas

³⁶ H.T.Sasmito, 1998: *Pemimpin Agung Binatara*, Yayasan Gita Budaya, Jakarta, hlm.54.

³⁷ G. Moedjanto, 1987: *Konsep Kekuasaan Jawa Penerapannya oleh Raja- raja Mataram*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm.78.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

anjaga tata titi tentreming praja (menjaga ketertiban dan ketentraman hidup rakyat supaya tercapai *karta tuwin raharja* (aman dan sejahtera). Adanya konsep keagungbinataraan ini telah menumbuhkan suatu tradisi *ndherek karsa dalem* (terserah kehendak raja) tertanam dalam hati rakyat Yogyakarta.³⁸

Selain itu untuk lebih meyakinkan diri bahwa kedudukannya sah, seorang Sultan harus mempunyai pusaka yang menjadi sumber kesaktian dan kewibawaannya. Untuk keturunan raja Mataram, pusaka ini dikenal dengan nama Kyai Joko Piturun.³⁹

Sultan Hamengku Buwono IX secara sepenuhnya berdiri dan membela RI dengan berbagai macam konsekuensinya Sikap tegas dari Sultan Hamengku Buwono IX ini diikuti oleh rakyatnya karena prinsip *ndherek karsa dalem* tertanam dalam hati rakyat Yogyakarta.

Konsep “ pergerakan nasional “ adalah suatu gerakan yang meliputi berbagai macam aksi yang dilakukan dengan organisasai secara modern ke arah perbaikan hidup bangsa Indonesia.⁴⁰ Jadi yang dimaksud dengan pergerakan nasional adalah suatu gerakan yang dilakukan secara bersama- sama dengan tujuan tercapainya kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur secara modern, yakni telah dikoordinir dan dipersiapkan secara matang. Munculnya pergerakan nasional biasanya dipelopori oleh kaum intelektual yang telah mengenyam pendidikan modern.

³⁸ *Ibid*, hlm.123.

³⁹ H.T.Sasmito, *op.cit*, hlm.55.

⁴⁰ Pringgodigdo, *op.cit*, hlm.8.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pergerakan nasional menunjuk pada seluruh proses terjadinya dan perkembangan nasionalisme Indonesia dalam segala perwujudannya, berdasarkan kesadaran dan keinginan berjuang untuk kebebasan rakyat dalam wadah negara kesatuan.⁴¹

Pergerakan nasional juga dapat diartikan sebagai tindakan kelompok atau aktivitas bersama untuk menghadapi kondisi- kondisi hidup dengan jalan mengadakan reaksi yang sesuai dengan posisi kelompok tersebut. Situasi kolonial merupakan tantangan bagi rakyat di tanah jajahan untuk memusatkan aktivitas kolektif mereka untuk mempertahankan diri dan berusaha mengubah situasi. Hal ini menyebabkan timbulnya kesadaran nasional, perasaan nasional, dan kehendak nasional yang dilakukan dengan berbagai cara.⁴²

Dari pernyataan diatas tampak bahwa tujuan utama dari munculnya pergerakan nasional Indonesia adalah melepaskan diri dari penjajahan. Usaha untuk melepaskan diri dari penjajahan ini tidak hanya meliputi aksi politik akan tetapi juga dapat dilakukan di berbagai bidang kehidupan, misal: melalui aksi sosial, keagamaan dan pendidikan.

Beberapa faktor yang mendorong munculnya pergerakan nasional, di antaranya adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi: rakyat Indonesia merasa senasib sepenanggungan karena sama- sama dijajah oleh Belanda,

⁴¹ Suhartono, 1994: *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, hlm.5.

⁴² Sartono Kartodirjo, 1990: *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*, Gramedia, Jakarta, hlm.230.

adanya pembangunan komunikasi menyebabkan makin mudah dan makin sering bertemunya rakyat diberbagai kepulauan di Indonesia, adanya inspirasi kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Sedangkan faktor ekstern meliputi: masuknya ide-ide barat melalui pendidikan yang modern, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang merupakan bukti bahwa barat juga bisa dikalahkan oleh timur dan perjuangan bangsa lain yang menentang penjajahan (India, Turki,dll).⁴³

Pergerakan nasional yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan terbagi dalam dua periode, yaitu: periode sebelum tahun 1900 dan periode setelah tahun 1900. Pergerakan nasional sebelum tahun 1900 ditandai dengan sistem perjuangan yang bersifat kedaerahan (lokal) dan bersifat irasional, yaitu hanya tergantung kepada kekuatan seorang pemimpin yang karismatis, perlawanan semacam ini akan berakhir apabila pemimpin mereka tertawan atau terbunuh.

Lama kelamaan rakyat Indonesia menyadari bahwa sistem perlawanan yang mereka pakai tidak akan berhasil mewujudkan cita-cita kemerdekaan, sehingga setelah munculnya kaum terpelajar, rakyat mulai memikirkan sistem perlawanan yang lebih tepat. Setelah periode tahun 1900 muncul suatu perlawanan yang bersifat nasional dan lebih terorganisir. Salah satu bentuk perlawanan tersebut adalah munculnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Perlawanan yang dilakukan oleh organisasi Budi Utomo dilanjutkan oleh organisasi-organisasi yang lainnya, di antaranya adalah munculnya organisasi Sarekat Dagang Islam (1912- 1922), Sarekat

⁴³ G. Moedjanto, 1989: *Indonesia Abad ke- 20 jilid I*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.25

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Islam (1912) ,Muhamadiyah (18 Nopember 1912), Indische Partij (6 September 1912), Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia (4 Juli 1927).⁴⁴

Untuk daerah Yogyakarta kegiatan yang menjurus kearah penentangan terhadap kekuasaan Belanda pertama-tama datang dari kalangan kerajaan. Sebagaimana kita ketahui di dalam *keraton* baik Kasultanan maupun Pakualaman telah berdiri sekolah- sekolah sebagai tempat belajar bagi anak keluarga *keraton*, para pejabat *keraton* dan para *abdi dalem*. Melalui pendidikan di sekolah-sekolah ini sedikit demi sedikit ditanamkan perasaan cinta kepada tanah air, rasa kebangsaan dan pengenalan terhadap sejarah nenek moyangnya .⁴⁵ Sehingga secara tidak langsung hal ini akan mengakibatkan munculnya suatu tradisi turun menurun dalam lingkungan *keraton* untuk menentang setiap bentuk penjajahan. Sultan Hamengku Buwono IX adalah salah satu di antara sultan-sultan Yogyakarta yang ikut serta berjuang mengadakan penentangan terhadap kekejaman penjajah.

Konsep “nasionalisme” menurut Hans Kohn merupakan salah satu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan.⁴⁶ Nasionalisme dalam arti lain adalah sebagai sikap politik dan sosial dari sekelompok masyarakat yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa, wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 27.

⁴⁵ Bambang Suwondo, 1978: *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*, Depdikbud, Yogyakarta, hlm.25.

⁴⁶ Hans Kohn, 1961: *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, PT.Pembangunan, Jakarta hlm.11.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ernest Renan mengartikan nasionalisme sebagai suatu paham dari sekelompok orang yang ingin bersatu dan tetap mempertahankan kesatuannya itu dengan cara apapun. Hal demikian menunjukkan bahwa nasionalisme merupakan kekuatan untuk menyatukan semua orang yang senasib sepenanggungan akibat penjajahan dan mempunyai kesamaan cita-cita untuk merdeka.⁴⁷

Munculnya pergerakan nasional di Indonesia karena didasari oleh semangat nasionalisme. Hal ini dikarenakan nasionalisme Indonesia merupakan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme, sehingga sudah selayaknya kalau dominasi sosio-politik kolonial Belanda dan Jepang itu membangkitkan perlawanan dari rakyat Indonesia.

Nasionalisme Indonesia pada jaman penjajahan pada hakekatnya meliputi perjuangan untuk melepaskan wilayah Indonesia dari penjajahan Belanda dengan tujuan mencapai kemerdekaan. Munculnya nasionalisme di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kaum intelektual yang progresif. Adanya nasionalisme progresif yang menghendaki adanya kebebasan politik maka nasionalisme merupakan kekuatan yang menjadi lawan kolonialisme. Jika dilihat dariacamata kolonial, nasionalisme selalu mempunyai orientasi ke masa depan sedangkan ideologi kolonial cenderung pada *status quo* dan melihat masa lampau.

Kaum intelektual yang telah mendapatkan sejumlah wawasan melalui pendidikan telah menjadi penggerak utama pergerakan nasional. Adapun tokoh-tokoh tersebut di antaranya adalah: Budi Utomo, Cipto Mangunkusumo, Ir. Soekarno,

⁴⁷ Ernest Renan, 1986: *Apakah Bangsa Itu ?* (Terjemahan), Erlangga, Djakarta, hlm.35.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Mohamad Hatta, Sultan Hamengku Buwono IX dan sebagainya. Tokoh-tokoh pergerakan nasional tersebut telah mengenyam pendidikan yang modern. Semangat nasionalisme tokoh-tokoh pergerakan nasional tersebut tampak dari sikap mereka yang anti kolonialisme dan bersikap non-kooperatif dengan pemerintah kolonial.

Semangat nasionalisme Sultan Hamengku Buwono IX tampak jelas pada saat diadakan perundingan kontrak politik antara kasultanan Yogyakarta dengan pemerintah Belanda. Dalam perundingan tersebut, Sultan Hamengku Buwono IX berusaha menawarkan ketentuan-ketentuan yang merugikan pemerintah RI.

Paham kebangsaan Sultan Hamengku Buwono IX kembali terlihat pada saat ia dinobatkan menjadi raja Yogyakarta. Paham kebangsaannya tampak jelas dalam dua kalimat dalam pidato penobatannya. Kalimat yang pertama berbunyi: “Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa”. Sedangkan kalimat kedua adalah janjinya sebagai raja Yogyakarta: “Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan Nusa dan Bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya”.

Dua kutipan di atas mempunyai makna yang cukup mendalam. Kutipan pertama memperlihatkan keteguhan kepribadian tanpa kehilangan identitas dari Sultan Hamengku Buwono IX meskipun ia telah mengenyam pendidikan Barat.

Sedangkan kutipan yang kedua mengandung makna tekad perjuangannya untuk nusa dan bangsa.⁴⁸

Semangat nasionalisme Sultan Hamengku Buwono IX kembali terlihat dengan jelas ketika pemerintah Belanda dan Jepang berusaha menduduki Yogyakarta dan menguasai Indonesia. Pada masa pemerintahan Belanda ketika kedudukan Belanda dalam keadaan terancam karena kedatangan bangsa Jepang ke wilayah Indonesia, pemerintah Belanda mengajak Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengungsi ke Australia. Akan tetapi ajakan dari pemerintah Belanda inoi ditolak dengan tegas oleh Sultan dengan menyatakan: “ Apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan Yogya. Justru bila bahaya memuncak, saya wajib berada di tempat demi keselamatan *keraton* dan rakyat”.⁴⁹ Dari pernyataannya tampak jelas bahwa Sultan Hamengku Buwono IX rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan rakyat dan bangsanya.

Wawasan kebangsaan Sultan Hamengku Buwono IX juga terlihat dari sikap tegasnya mendukung Republik Indonesia secara konsekuen. Sikap tegas Sultan Hamengku Buwono IX tampak jelas dari telegram yang dikirimnya pada tanggal 20 Agustus 1945 yang menyatakan sanggup berdiri di belakang kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh.Hatta. Selain itu semangat nasionalisme Sultan Hamnegku Buwono IX tampak jelas dari kerelaannya meminjamkan daerah

⁴⁸ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm.53.

⁴⁹ Atmakusumah, *op.cit*, hlm.56.

kekuasaannya (Yogyakarta) untuk dijadikan sebagai ibukota sementara dari Republik Indonesia.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis inilah yang akan dibuktikan dalam penelitian. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Kalau Sultan Hamengku Buwono IX mempunyai semangat nasionalisme maka dia akan terlibat dalam pergerakan nasional.
2. Kalau Sultan Hamengku Buwono IX sudah menjabat sebagai kepala Daerah Istimewa Yogyakarta maka dia akan terlibat dalam bidang politik dan sosial-ekonomi selama pergerakan nasional 1940-1945 di Yogyakarta.
3. Kalau dari awal kemerdekaan RI sampai terjadinya Agresi Belanda, Sultan Hamengku Buwono IX masih menjabat sebagai kepala Daerah Istimewa Yogyakarta maka dia akan terlibat dalam pergerakan nasional 1945-1949.

G. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penulisan peranan Sultan Hamengku Buwono IX pada masa pergerakan nasional 1940-1949, ada empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Metode adalah cara kerja untuk memahami obyek

yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Hal ini sangat bermanfaat bagi sejarawan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui historiografi.⁵⁰

Tahapan yang pertama adalah heuristik atau proses pengumpulan data yang relevan sesuai dengan keperluan subyek yang diteliti. Sumber data dalam penulisan ini diperoleh dari buku- buku yang ada di perpustakaan yang bersifat primer dan sekunder. Adapun sumber primer dalam penulisan ini adalah surat yang ditulis oleh Sultan Hamengku Buwono IX pada tanggal 26 Maret 1949 yang ditujukan kepada Mr. Sudjono di Jakarta, Surat Perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Yogyakarta tertanggal 18 Maret 1940, Amanat Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kandjeng Sultan Jogjakarta tertanggal 5 September 1945.

Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tahta Untuk Rakyat Celah- celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta Tahun 1942-1974, Sri Sultan Hari- hari Hamengku Buwono IX, Biografi Pahlawan Nasional Sultan

⁵⁰ Louis Gottschalk, *op.cit*, hlm. 35.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hamengku Buwono IX, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dan lain- lain.

Tahap yang kedua adalah kritik sumber, merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menghindari adanya kepalsuan sumber atau untuk mengetahui apakah data yang ada dapat dipertanggungjawabkan keasliannya atau tidak.⁵¹ Kritik sumber terdiri atas kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern dilakukan dengan menilai kebenaran dari isi buku/dokumen. Pada umumnya kritik intern ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang didapat sehingga dapat memperoleh fakta yang jelas. Sedangkan kritik ekstern digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan dalam penulisan. Kritik ekstern ini dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan yang digunakan, sifat bahan, gaya penulisan, bahasa yang dipakai dan jenis huruf yang digunakan untuk membuktikan keaslian sumber. Kritik sumber akan menghasilkan fakta- fakta yang merupakan unsur untuk melakukan rekonstruksi.

Tahap ketiga adalah interpretasi yang merupakan tahap penafsiran terhadap fakta- fakta yang telah diuji kebenarannya dan menganalisis sumber untuk menghasilkan suatu rangkaian peristiwa sejarah yang bermakna. Untuk itu analisis sumber ini dilakukan dengan

⁵¹ Koentowijoyo, 1995: *Pengantar Ilmu Sejarah*, Bentang Budaya, Yogyakarta, hlm.99.

menjelaskan data-data yang ada atau menguraikan informasi dan menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya.

Tahap yang keempat adalah historiografi. Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah. Historiografi adalah suatu proses rekonstruksi dari rentetan peristiwa masa lampau yang merupakan suatu totalitas perjalanan sejarah yang utuh . Penulisan sejarah dilakukan dengan cara menggambarkan semua peristiwa-peristiwa masa lampau secara kronologis.⁵² Adanya penulisan sejarah yang bersifat kronologis akan memberikan suatu pengertian dasar kapan peristiwa itu terjadi sehingga akan memberikan kemudahan dan penjelasan kepada penulis dan pembaca mengenai urutan waktu terjadinya peristiwa. Dalam penulisan skripsi ini menyajikan model penulisan deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan dan melukiskan peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam pergerakan nasional tahun 1940- 1949, sebuah tinjauan dalam perspektif historis-politis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam skripsi yang berjudul "Peranan Sultan Hamengku Buwono IX Pada Masa Pergerakan Nasional 1940-1949" adalah pendekatan historis, psikologis, politik, sosial-ekonomi dan personal. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan

⁵² Louis Gottschalk, *op.cit*, hlm.32.

historis. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui perjuangan bangsa Indonesia dimasa lalu.

Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang berorientasikan pada tingkah laku manusia. Syarat utama dari pendekatan ini adalah tingkah laku manusia yang berorientasi umum. Obyek dalam pendekatan psikologi ini adalah tingkah laku manusia baik tingkah laku dalam maupun tingkah laku luar. Penganalisa dari tingkah laku tersebut harus membuat ketentuan dengan hadirnya suatu organisme atau sebagai penengah antara rangsangan dari luar dan kemungkinan adanya tanggapan. Seperti yang kita ketahui pada dasarnya sifat dari manusia adalah halus dan selalu hidup dalam kebersamaan, namun karena adanya rangsangan dari luar yang tidak sesuai dengan sifat dasar manusia tersebut maka sifat manusia yang semula halus akan mengalami perubahan.⁵³

Dengan demikian pendekatan psikologis penulis gunakan untuk mengkaji biografi Sultan Hamnegku Buwono IX. Melalui pendekatan ini, penulis menguraikan sifat dasar dari Sultan Hamengku Buwono IX yang dapat diketahui dari biografi Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam biografi tersebut, penulis menguraikan sifat- sifat dasar beliau yang mempunyai kepribadian yang tegas dan mandiri serta berjiwa nasionalisme. Sehingga hal inilah yang menjadi latar belakang

⁵³ Robert. F.Berchover, *A Behaviorrial Approach to Historical Analysis*, New York: A Free Press Paperback, hlm.25.

keterlibatannya dalam pergerakan nasional. Selain itu keterlibatan Sultan Hamengku Buwono IX dalam pergerakan nasional juga dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan latar belakang pendidikannya.

Pendekatan politik digunakan untuk melihat peranan Sultan Hamengku Buwono IX pada masa pergerakan nasional sehingga bangsa Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaannya dan untuk mengkaji berbagai aspek yang melandasi kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pemimpin Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus sebagai pemimpin *keraton* Yogyakarta yang mempunyai pengaruh sangat besar pada masa pergerakan nasional. Contohnya adalah dengan melakukan diplomasi dengan pihak kolonial (Belanda dan Jepang) dan mengkoordinir gerakan rakyat Yogyakarta untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan RI, misalnya adalah pada saat terjadinya perebutan kekuasaan dan perebutan senjata yang terjadi di Kotabaru dan Serangan Umum I Maret 1949.

Pendekatan sosial-ekonomi digunakan untuk melihat proses munculnya pergerakan nasional di Yogyakarta yang dilihat dari keadaan rakyat Yogyakarta. Pendekatan sosial- ekonomi ini juga digunakan untuk melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Sultan Hamengku Buwono IX untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kepentingan rakyatnya. Dalam hal ini Sultan melakukan kunjungan dan pendekatan kepada rakyat pribumi khususnya kaum buruh dan tani yang merupakan

sumber penindasan dari pihak kolonial. Tindakan ini dilakukan oleh Sultan untuk mengetahui keadaan rakyatnya sehingga dapat dengan mudah menyusun program- program untuk memajukan rakyatnya.

Pendekatan personal digunakan untuk melihat latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan dan watak serta kepribadian Sultan Hamengku Buwono IX. Jadi pendekatan ini digunakan untuk mengetahui perilaku dan latar belakang kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “ Peranan Sultan Hamengku Buwono IX Pada Masa Pergerakan Nasional 1940-1949 “ mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, hipotesis, metode dan pendekatan serta sistematika penulisan

Bab II. Bab ini akan menyajikan uraian tentang latar belakang keterlibatan Sultan Hamengku Buwono IX dalam pergerakan nasional

Bab III. Bab ini akan menyajikan uraian tentang peranan Sultan dalam bidang politik dan sosial- ekonomi pada tahun 1940-1945

Bab IV. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam bidang politik dan sosial ekonomi pada tahun 1945-1949

Bab V. Bab ini akan menyajikan kesimpulan dari penelitian permasalahan yang telah diuraikan pada Bab II, III, dan IV.

Demikianlah sistematika penulisan skripsi ini, dari uraian di atas dapat dicermati bahwa penulis ingin menguraikan tentang” Peranan Sultan Hamengku Buwono IX Pada Masa Pergerakan Nasional 1940-1949 “.



BAB II

LATAR BELAKANG KETERLIBATAN SULTAN HAMENGKU BUWONO IX DALAM PERGERAKAN NASIONAL

A. Latar Belakang Keluarga Sultan Hamengku Buwono IX

Sultan Hamengku Buwono IX lahir pada hari Sabtu Pahing tanggal 12 April 1912 atau menurut hitungan Jawa jatuh pada tanggal 25 Rabingulakir tahun Jumangkir 1842 di Sompilan, jalan Ngasem 13 Yogyakarta yang sekarang dikenal dengan nama Pakuningratan. Beliau merupakan putera dari Pangeran Haryo Purboyo (Sultan Hamengku Buwono VIII) dengan Raden Ayu Kustilah, *garwapadmi*.⁵⁴

Setelah berumur lima hari atau *separas* diberi nama Gusti Raden Mas Dorojatun.⁵⁵ Nama ini mengandung makna bahwa kedua orang tuanya mempunyai harapan kelak di kemudian hari sang anak mampu memiliki derajat yang tinggi, dapat mengemban kedudukan yang luhur dan selalu memiliki budi pekerti yang baik meskipun memegang kekuasaan yang besar. Nama itu ternyata memenuhi harapan orangtuanya karena ternyata sebelum Dorojatun berusia tiga tahun pangeran Haryo Purboyo diangkat menjadi putera mahkota *keraton* Yogya dengan gelar *Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara* yang pada akhirnya dinobatkan menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono VIII dan R.A. Kustilah menyandang gelar *Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom*.

⁵⁴ Garwapadmi disebut juga dengan permaisuri.

⁵⁵ Nurdianto ,1998: *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwono IX*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, hlm.5.

Dorojatun hidup bersama- sama dengan ayah, ibu dan saudara- saudaranya di Purubayan. Akan tetapi belum sempat Dorojatun melampui usia balitanya, kedua orang tuanya berpisah. Ibu Dorojatun dipulangkan kembali ke rumah ayahnya, K.G.P.A.Mangkubumi. Sepeninggal ibunya, Dorojatun menjadi putera tunggal sang permaisuri dan diasuh di *Keputran*.⁵⁶ Akan tetapi karena Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara ingin mendidik putera- puteranya agar menjadi pribadi yang disiplin, tegas dan mandiri maka ketika berusia empat tahun, Dorojatun dikeluarkan dari *keraton* dan dititipkan di rumah keluarga Mulder, seorang Belanda yang menjabat sebagai kepala sekolah *Neutrale Hollands Javaanse Jongens School*.⁵⁷ Saudara-saudara Dorojatun yang lainnya juga dititipkan pada keluarga Belanda.

Keputusan K.G.P.A.A.Hamengku Negara yang akan menitipkan putera- puteranya pada keluarga Belanda membuat para kerabat *keraton* maupun masyarakat feodal yang masih memegang tradisi terkejut karena mereka khawatir putera- putera beliau akan menjadi *netherlandisme* (kebelanda-belandaan). Akan tetapi K.G.P.A.A.Hamengku Negara tetap bersikukuh untuk menitipkan putera- puteranya di dalam keluarga Belanda.

K.G.P.A.A.Hamengku Negara menitipkan putera- puteranya pada keluarga di luar *keraton* agar putera- puteranya dididik secara sederhana, tidak diistimewakan , hidup secara disiplin agar berani menghadapi tantangan hidup yang penuh dengan

⁵⁶ Keputran merupakan bagian dalam kompleks kraton yang menjadi tempat tinggal dari putera- putera raja. Sedangkan tempat tinggal untuk puteri- puteri raja dikenal dengan sebutan keputren.

⁵⁷ Dahana,dkk , 1988: *Sri Sultan: Hari- hari Hamengku Buwono IX*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,hlm.17.

perjuangan. Hal ini dilakukan oleh beliau karena beliau menganggap kehidupan di dalam *keraton* yang penuh dengan sanjungan tidak akan menguntungkan bagi kemajuan putera- puteranya.

Setelah Dorojatun dititipkan di rumah keluarga Mulder, Dorojatun diangkat menjadi anggota keluarga Mulder dan diberi nama Henkie.⁵⁸ Nama Henkie ini dipakai pada masa- masa sekolahnya khususnya bagi teman- teman dekatnya. Pada saat Dorojatun dititipkan di rumah keluarga Mulder, tidak seorangpun *abdi dalem* diperkenankan menengoknya. Selain itu K.G.P.A.A.Hamengku Negara juga melarang puteranya mendapat perlakuan yang istimewa dari keluarga Mulder dan menganjurkan agar puteranya dididik secara disiplin seperti kehidupan orang- orang Belanda pada waktu itu. Dalam keluarga Mulder, Dorojatun hanya dilayani oleh pembantu keluarga Mulder dan selebihnya Dorojatun harus mengurus dirinya sendiri.

Pada saat Dorojatun tinggal dalam keluarga Mulder, ia langsung diajak berkomunikasi dengan mempergunakan bahasa Belanda. Sehingga lama- kelamaan Dorojatun kecil terbiasa berbicara dalam bahasa Belanda. Meskipun Dorojatun sudah pandai berbicara dalam bahasa Belanda akan tetapi ia tidak lupa terhadap bahasa Jawa. Hal ini dikarenakan Dorojatun sesekali pulang kerumah ayahnya didalam *keraton*.

⁵⁸ Nama Henkie diambil dari nama Pangeran Hendrik suami Ratu Wilhelmina dari negeri Belanda. Lihat tulisan Kustiniyati Mochtar dalam Atmakusumah, 1982: *Tahta Untuk Rakyat, Celah- Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Gramedia , Jakarta, hlm.26.

Ketika berada di dalam lingkungan *keraton*, Dorojatun harus menyesuaikan diri dengan tradisi didalam keraton dan ketika kembali ke keluarga Mulder ia juga harus bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan yang modern. Sehingga hal inilah yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian Dorojatun.⁵⁹

B. Latar Belakang Pendidikan

Dorojatun pertama kali mengenal pendidikan pada saat memasuki sekolah *frobel* (taman kanak- kanak) milik Juffrow Willer yang terletak di Bintaran Kidul. Dorojatun berangkat dan pulang sekolah diantar jemput dengan kereta berkuda milik *keraton*.

Setelah Dorojatun berusia enam tahun ia dimasukkan di Sekolah Dasar *Eerste Europese Lagere School B* atau dikenal dengan nama *Eerste School B* atau *Een B* yang terletak di jalan Panembahan Senopati. Sekolah Dasar *Eerste Europese Lagere School B* biasa disebut dengan *Sekolah Kidul Ngloji*.

Sekolah Kidul Ngloji merupakan sekolah dasar terbaik pada waktu itu. Setiap siswa yang bersekolah di sana akan dikenakan syarat- syarat tertentu dan tidak sembarang orang pribumi yang dapat bersekolah di sekolah ini. Di sekolah ini terdapat diskriminasi atau perbedaan perlakuan antara anak orang pribumi dan anak orang asing, Belanda khususnya. Kelemahan atau kekurangan anak pribumi biasanya

⁵⁹ Pendidikan barat yang telah ditempuh oleh Dorojatun pada akhirnya membuatnya mempunyai dua segi kepribadian, yaitu segi tradisional yang berakar pada sejarah dan tradisi dari kerajaan di pulau Jawa dan segi modern yang tampak jelas dalam sikap, pemikiran dan perjuangannya.

dibesar- besarkan sementara anak Belanda yang bodoh sekalipun dapat diterima di sekolah ini.

Keadaan semacam ini semakin memperjelas adanya diskriminasi dalam masyarakat antara masyarakat pribumi dengan orang- orang Eropa sehingga mengakibatkan timbulnya kesadaran akan adanya ketidaksetaraan hak dan keadaannya yang terjajah. Adanya kesadaran dari masyarakat pribumi inilah yang pada akhirnya akan memunculkan suatu semangat/ keberanian untuk menentang penjajah.⁶⁰ Situasi ini juga disadari oleh Dorojatun yang kelak berhasil menerobos diskriminasi tersebut melalui perjuangan- perjuangannya dalam memerdekakan bangsa Indonesia.

Sebelum Dorojatun menyelesaikan pendidikan dasarnya di sekolah *Kidul Ngloji*, Dorojatun pindah ke *Neutrale Eurppese Lagere School* yang terletak di Pakemweg(Jalan Pakem yang kemudian dinamakan Jalan Kaliurang). Dorojatun menamatkan Sekolah Dasarnya di sekolah ini. Pada saat Dorojatun bersekolah di *Neutrale Eurppese Lagere School*, Dorojatun pindah kost dari rumah keluarga Mulder ke rumah keluarga Cook. Ketika ia duduk di kelas 3, Dorojatun ikut dalam klub kepanduan NIPV(*Nederland Indische Padvinders Club*).⁶¹

Pada saat Dorojatun duduk di kelas 3 Sekolah Dasar (tahun 1921) ada sebuah peristiwa penting, ayahnya dinobatkan menjadi Sultan Hamengku Buwono VIII. Akan tetapi meskipun ayahnya telah dinobatkan menjadi Sultan, kehidupan

⁶⁰Nurdiyanto, *op.cit*, hlm.8.

⁶¹ Atmakusumah, *op.cit*, hlm.27.

Dorojatun tidak mengalami perubahan. Dorojatun bersekolah, menempuh ujian, bersepeda dan bermain sama seperti murid- murid yang lainnya.

Seperti anak- anak sekolah yang lainnya, kenakalan juga ada dalam diri Dorojatun. Dorojatun suka bermain dan berkelahi sehingga sering *distrap* (di hukum) oleh gurunya. Sifat Dorojatun yang suka berpetualang dan bandel ini terbawa hingga dewasa. Sifat pembawaan pada masa kanak- kanak ini tampak jelas pada keberaniannya melawan penjajah. Selain gemar bersepeda, Dorojatun juga suka bermain sepak bola. Setiap Dorojatun liburan sekolah, ia pulang ke *keraton* dan mengumpulkan anak- anak *abdi dalem* untuk diajak bermain sepak bola. Akan tetapi liburan Dorojatun tidak hanya diisi dengan bermain sepak bola saja, Dorojatun harus belajar dan menari. Hal ini dikarenakan semua putera- puteri Sultan Hamengku Buwono VIII harus bisa menari. Tarian- tarian mereka dipentaskan pada saat pesta keluarga, misalnya adalah kisah Mahabarata dan Ramayana. Setiap mementaskan epos Mahabarata, Dorojatun selalu memerankan tokoh Gathotkaca.⁶²

Dorojatun berhasil menamatkan pendidikan dasarnya pada usia 13 tahun dan melanjutkan ke HBS (*Hogere Burger School*) yang terletak di Semarang. Di kota ini Dorojatun tinggal bersama keluarga Tj. Voskuil yang bekerja sebagai seorang kepala penjara yang terletak di Mlaten. Akan tetapi karena keadaan iklim Semarang yang cukup panas dan tidak memungkinkan bagi kesehatan Dorojatun, maka ayahnya memutuskan untuk memindahkannya ke HBS yang terletak di kota Bandung. Ketika

⁶² Dahana,dkk.,*op.cit*,hlm.21.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dorojatun bersekolah di Bandung, ia dititipkan pada keluarga De Boer dan di kota Bandung inilah Dorojatun menyelesaikan pendidikan HBS.

Setelah Dorojatun menyelesaikan pendidikannya di HBS, ayahnya memerintahkan agar melanjutkan studinya di negeri Belanda. Pada bulan Maret 1930 Dorojatun berangkat menuju ke Holland bersama dengan B.R.M.Tinggarto⁶³ dan ditemani oleh keluarga Hofland (seorang administrateur pabrik gula Gesikan di Yogyakarta). Di Belanda ia memasuki sekolah gymnasium yang terletak di Haarlem. Dorojatun tinggal di rumah keluarga Ir.W.C.G.H. Mourik Broekman, direktur sekolah tersebut. Pada tahun 1934 Dorojatun berhasil menyelesaikan sekolah Gymnasium ini.

Setelah Dorojatun menamatkan pendidikannya di sekolah Gymnasium (setingkat dengan Sekolah Menengah Atas) ia melanjutkan kuliah di *Rijksuniversiteit* (salah satu universitas terkemuka di kota Leiden) dan mengambil jurusan Indologi yaitu jurusan yang merupakan gabungan dari bidang hukum dan ekonomi. Selama Dorojatun menempuh pendidikan di *Rijksuniversiteit*, Dorojatun aktif terlibat dalam kegiatan- kegiatan kemahasiswaan. Ia menjadi anggota *Leidee Studentencorps* yang masuknya harus melalui proses seleksi dan *ontgroening* atau perpeloncoan. Dorojatun juga menjadi anggota perkumpulan mahasiswa *Verenigde Faculteiten* dan pernah menjabat sebagai ketua dalam perkumpulan ini. Ia juga pernah menjabat sebagai komisar dalam perkumpulan mahasiswa *Minerva*. Keaktifan Dorojatun mengikuti berbagai macam kegiatan kemahasiswaan ini telah berhasil menambah wawasan dan

⁶³ B.R.M.Tinggarto adalah nama kecil Pangeran Prabuningrat, kakak Sultan Hamengku Buwono IX.

pengalaman Dorojatun. Selain itu Dorojatun juga telah berhasil menyelami cara berpikir orang-orang Eropa yang pada waktu itu menjadi dosen dan temannya.

Selama menjadi mahasiswa di *Rijksuniversiteit*, Dorojatun mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan politik dan ekonomi negara-negara di Eropa. Salah satu bentuk perhatiannya adalah dengan aktif mengikuti diskusi dalam lingkungan universitas yang dipimpin oleh guru besarnya Prof. Schierke. Keaktifan Dorojatun mengikuti kuliah dan aktif dalam berbagai macam organisasi telah berhasil mengantarkannya pada kelulusan dalam *candidaats-examen* tahun 1937. Ia berhasil mendapatkan ijazah *candidaat* Indologi sehingga boleh melanjutkan pada tingkat doktoral. Pada tahap selanjutnya, Dorojatun mengambil jurusan ekonomi sebagai mata kuliah pilihan dan tetap mencurahkan perhatiannya pada pelajaran hukum tata negara (*staatsrecht*).⁶⁴

C. Dorojatun Menuju Tahta

Pada bulan Oktober 1939 ketika Perang Dunia II meletus, Sultan Hamengku Buwono VIII menyuruh Dorojatun yang sedang menempuh pendidikan doktoralnya di Holland agar segera pulang ke Indonesia. Dorojatun mengikuti keinginan ayahnya dan segera pulang ke Indonesia dengan menaiki kapal Dempo, yaitu sebuah kapal pengangkut barang. Setelah berminggu-minggu menempuh perjalanan dari Belanda

⁶⁴ Pada saat Dorojatun menempuh pendidikan di *Rijksuniversiteit* pengalamannya dalam bidang politik, hukum dan ekonomi semakin bertambah luas. Pengalaman – pengalaman inilah yang pada akhirnya menghantarkan Dorojatun menjadi seorang pemimpin yang arif dan bijaksana dengan menjunjung tinggi semangat nasionalisme Indonesia.

menuju Indonesia, pada tanggal 18 Oktober 1939 kapal Dempo sampai di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Di pelabuhan Tanjung Priok, Dorojatun dijemput oleh keluarganya dan Sultan Hamengku Buwono VIII. Saudara- saudara Dorojatun menjemput Dorojatun dengan penuh hormat. Bahkan saudara- saudara yang dulu menjadi teman mainnya menjawab sapaannya dengan bahasa Jawa *krama inggil*.⁶⁵ Dorojatun terkejut melihat perubahan sikap dari saudara- saudaranya terhadap dirinya. Sebelum kepergiannya ke negeri Belanda, ia bersama adik- adik dan saudara- saudaranya suka bercanda dan bermain dengan akrab. Akan tetapi setelah Dorojatun pulang dari Belanda suasana berubah menjadi sangat formal. Semua perubahan yang terjadi atas perintah ayahnya, Sultan Hamengku Buwono VIII.⁶⁶

Sebelum mereka pulang ke Yogyakarta, mereka beristirahat di hotel des Indes Jakarta. Di hotel Des Indes inilah Dorojatun menerima *Keris Kyai Jaka Piturun* dari ayahnya. Penyerahan keris ini menjadi suatu tanda bahwa Sultan Hamengku Buwono VIII menginginkan Dorojatun menjadi Putera Mahkota. *Keris Kyai Jaka Piturun* adalah keris pusaka *keraton* Yogyakarta yang selalu diberikan oleh Sultan kepada seseorang yang diinginkan menjadi penggantinya.

⁶⁵ Dalam bahasa Jawa terdapat tiga tingkat pokok, yaitu: bahasa *ngoko* (kasar) yang dipakai sehari-hari antara teman baik atau oleh atasan terhadap bawahan. Yang kedua adalah bahasa *krama madya* yang tingkatannya sedang. Sedangkan bahasa yang ketiga adalah *krama inggil* yang dipakai oleh rakyat biasa terhadap bangsawan atau orang yang usianya lebih muda terhadap orang yang usianya lebih tua.

⁶⁶ Dahana,dkk.,*op.cit*, hlm.24.

Tiga hari setelah kedatangan Dorojatun di tanah air, Dorojatun dan keluarganya pulang ke Yogyakarta dengan kereta api *Eendaagze*.⁶⁷ Akan tetapi dalam perjalanan menuju Yogyakarta, kondisi kesehatan Sultan Hamengku Buwono VIII melemah karena penyakit diabetesnya semakin parah. Sebelum sampai di kota Cirebon, Sultan Hamengku Buwono VIII pingsan. Setelah sampai di kota Krawang, salah satu kerabat *keraton* menelepon Dr. Royen, dokter pribadi Sultan. Di kota Kroya Dokter Royen baru dapat melakukan pengobatan darurat, sesampainya di Yogyakarta beliau langsung dibawa ke Rumah Sakit *Onder de Bogen* yang sekarang dikenal dengan nama Rumah Sakit Panti Rapih. Akan tetapi dokter- dokter di Rumah Sakit Panti Rapih tidak dapat berbuat banyak karena kondisi kesehatan Sultan Hamengku Buwono VIII sangat parah. Pada pagi harinya , Minggu Kliwon tanggal 22 Oktober 1939 Sultan Hamengku Buwono VIII wafat.⁶⁸

Setelah Sultan Hamengku Buwono VIII wafat, rakyat menyadari bahwa yang akan menjadi penggantinya adalah Dorojatun. Akan tetapi sepeninggal Sultan Hamengku Buwono VIII pemerintahan diambil alih oleh Dr. Lucien Adam dengan dalih agar tidak terjadi kevakuman kekuasaan atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Untuk mengatur pemerintahan di Yogyakarta, Dr. Lucien Adam membentuk panitia yang bertugas mengatur pemerintahan di dalam *keraton*. Panitia ini diketuai oleh Dorojatun yang pada waktu itu berusia 27 tahun. Jika dibandingkan dengan saudara- saudaranya, Dorojatun mempunyai usia yang paling muda, selain itu

⁶⁷ Kereta api cepat pada waktu itu yang berangkat dari stasiun Gambir. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Yogyakarta hanya memerlukan waktu satu hari.

⁶⁸ Atmakusumah,*op.cit*,hlm.38.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dorojatun juga belum mempunyai gelar Pangeran seperti saudara- saudaranya yang lain. Sedangkan yang menjadi anggota dalam kepanitiaan tersebut adalah: G.P.H.Mangkukusumo (kakak Sultan Hamengku Buwono VIII), G.P.H.Tedjokusumo (adik dari G.P.H.Mangkukusumo), Pangeran Hangabehi dan Pangeran Purboyo yang keduanya merupakan kakak Dorojatun.⁶⁹

Pada dasarnya pengganti Sultan Hamengku Buwono VIII secara sah adalah Dorojatun, akan tetapi karena pada saat itu pemerintahan kolonial Belanda sedang berkuasa di Yogyakarta maka proses suksesi Dorojatun untuk menjadi Sultan Hamengku Buwono IX terhambat. Sebelum Dorojatun dinobatkan menjadi Sultan yang baru, Dr.Lucien Adam melakukan pendekatan terhadap Dorojatun dengan cara membicarakan masalah kontrak politik⁷⁰.

Pada awal November 1939 perundingan antara Dr.Lucien Adam dengan Dorojatun secara resmi dimulai. Perundingan ini hanya dilakukan oleh Dr. Lucien Adam dengan Dorojatun dan dilaksanakan secara marathon karena diadakan setiap hari. Perundingan diadakan dalam tiga tahap, pagi hari dimulai pada pukul 08.00 sampai 12.00, siang hari pukul 15.00 sampai 17.00 dan malam hari pukul 20.00 sampai selesai.

Hari demi hari berlalu, perundingan yang membicarakan masalah kontrak politik berjalan *seret* (lambat). Sehingga hal ini mengakibatkan kedua belah pihak merasa bosan. Dalam perundingan ini kedua belah pihak berusaha mempertahankan

⁶⁹ *Ibid*, hlm 39.

⁷⁰ Kontrak politik yang dimaksud disini adalah kontrak politik antara pemerintahan Yogyakarta dengan pemerintahan Hindia Belanda.

pendapat dan keinginan mereka masing-masing sehingga tidak menemukan kata sepakat. Pendidikan barat yang pernah ditempuh oleh Dorojatun serta keaktifannya mengikuti berbagai macam organisasi dan klub diskusi membuatnya sangat berhati-hati dan waspada dalam perundingan.

Proses perundingan yang berjalan lambat mengakibatkan Dr. Lucien Adam kehilangan kesabaran dan mempergunakan bantuan *pepatih dalem* K.P.A.A. Danurejo untuk mempengaruhi Dorojatun. Akan tetapi usaha yang ditempuh oleh Dr. Lucien Adam ini tidak berhasil. Dorojatun tetap mempertahankan pendapatnya untuk menolak campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan *keraton*.

Ada tiga hal yang membuat perundingan berjalan *seret*, diantaranya adalah:

1. Jabatan *Pepatih Dalem*

Peranan *pepatih dalem* pada masa pemerintahan Hindia Belanda mempunyai dwi fungsi dan dwi loyalitas terhadap pemerintah Hindia Belanda dan kasultanan. Seorang *pepatih dalem* mengabdikan kepada pemerintah Hindia Belanda sekaligus sebagai pegawai kasultanan. Dorojatun ingin mengubah peranan dan kedudukan dari *pepatih dalem* ini menjadi pegawai kasultanan yang mempunyai monofungsi dan monoloyalitas hanya kepada Sultan. Akan tetapi Dr. Lucien Adam menolak keinginan dari Dorojatun.

2. Dewan Penasehat

Anggota dewan penasehat pada masa pemerintahan Hindia Belanda separuhnya diusulkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan separuhnya

lagi diusulkan oleh kasultanan, sedangkan pengangkatannya harus disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda. Dorojatun menolak hal ini karena menurutnya prosedur pemilihan semacam ini pada akhirnya akan membatasi kedudukan dan peranan dewan penasehat karena harus tunduk kepada Belanda. Jika hal demikian terjadi maka dewan penasehat tidak dapat menyalurkan aspirasi/ kepentingan rakyat.

3. *Prajurit Keraton*

Pemerintah Hindia Belanda menginginkan prajurit keraton tergabung menjadi satu dan secara hierarkis- struktural berada dibawah komando KNIL. Dorojatun tidak mempunyai wewenang untuk memerintah tetapi Dorojatun harus menggaji dan melatihnya. Hal ini tentu saja ditolak oleh Dorojatun karena Dorojatun menginginkan prajurit yang telah digaji dan dilatihnya berada dibawah komando Sultan.⁷¹

Lamanya proses perundingan menyebabkan Dorojatun menyadari bahwa pemerintah Hindia Belanda akan terus menerus menjajah Sultan dan rakyatnya. Dari isi kontrak politik tampak bahwa Sultan hanya mempunyai peran dalam birokrasi pemerintahan *keraton* dan tidak mempunyai peranan penting dalam pemerintahan diseluruh daerah kekuasaannya karena diawasi oleh pemerintah Hindia Belanda melalui *pepatih dalem*. Adanya kesadaran inilah yang memunculkan semangat perjuangan menentang penjajah dengan tujuan agar Sultan dapat mengambil peran dalam mengadakan transformasi birokrasi pemerintahan di Yogyakarta demi

⁷¹ Atmakusumah, *op.cit.* hlm.43.

kepentingan rakyatnya dan dapat memegang kewibawaan dan kekuasaan yang utuh tanpa campur tangan pihak asing, dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda.⁷²

Pada tanggal 12 Maret 1940 kontrak politik antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Kasultanan Yogyakarta ditandatangani oleh Dorojatun dalam upacara di Tratat Prabayeksa di dalam keraton.⁷³ Hal ini dilakukan oleh Dorojatun karena Dorojatun mendapatkan *wangsit*⁷⁴ dari ayahnya, almarhum Sultan Hamengku Buwono VIII yakni bahwa Belanda akan segera pergi dari Indonesia. Setelah kontrak politik ini ditandatangani maka pada tanggal 18 Maret 1940 Dr.Lucien Adam atas nama pemerintah Hindia Belanda melakukan dua kali penobatan secara sekaligus, yaitu:

- Pertama, pada jam 11.00 Dorojatun dinobatkan sebagai *Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putra Narendra Mataram*, sebagai putra mahkota kesultanan Yogyakarta.
- Kedua, lima menit kemudian Dorojatun dinobatkan menjadi Sultan Yogyakarta dengan gelar *Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Kaping IX*.⁷⁵

⁷² Nurdyanto., *op.cit*, hlm.16.

⁷³ Isi lengkap dari kontrak politik antara pemerintah Hindia Belanda dengan Kasultanan Yogyakarta dapat dilihat dalam buku Soedarisman Poerwokoesomo, 1985: *Kasultanan Yogyakarta*, Gama Press, Yogyakarta, hlm 64 dst.

⁷⁴ Wahyu atau bisikan gaib dari almarhum ayahnya. Biasanya orang yang mendapatkan *wangsit* berada dalam keadaan setengah tidur bahkan ada juga yang mendapatkannya dalam keadaan terjaga.

⁷⁵ Atmakusumah, *op.cit*, hlm.52.

Gelar Sultan Hamengku Buwono IX mempunyai makna bahwa Sultan adalah penguasa sah di dunia dan *Senopati Ing Ngalogo* yang memiliki arti bahwa Sultan mempunyai kekuasaan untuk menentukan perdamaian atau peperangan dan panglima perang pada saat terjadi peperangan. Sultan adalah *Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama* yang berarti penata agama sebab Sultan diakui sebagai *Kalifatullah* yang menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW.

Makna dari gelar Sultan Hamengku Buwono IX dan sultan- sultan sebelumnya ini selalu tertanam dalam hati rakyat Yogyakarta. Rakyat Yogyakarta menganggap bahwa Sultan adalah raja yang mempunyai kekuasaan politik, militer dan keagamaan bagi mereka sehingga hal ini menyebabkan semua perintah Sultan adalah hukum dan tiap keinginannya adalah perintah bagi rakyatnya.⁷⁶ Adanya kepercayaan yang telah tertanam dalam hati rakyat Yogyakarta ini berlangsung secara turun temurun bahkan sampai sekarang. Rakyat Yogyakarta hormat dan menjunjung tinggi setiap Sultannya dan mengikuti setiap perkataannya (*ndherek karsa dalem*).

D. Nasionalisme Hamengku Buwono IX

Pendidikan barat yang telah ditempuh oleh Sultan Hamengku Buwono IX telah berhasil membentuk kepribadiannya. Meskipun Sultan Hamengku Buwono IX lama tinggal di Belanda dan bergaul dengan orang Belanda, ia tidak pernah melupakan tradisi dan budaya bangsanya. Sultan Hamengku Buwono IX selalu

⁷⁶ Selo Soemardjan, 1986: *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 25.

mengingat pesan ayahnya, almarhum Sultan Hamengku Buwono VIII, seperti yang terdapat dalam buku Tahta Untuk Rakyat yang berbunyi:

“ Selama di negeri Belanda bukanlah pintu hatimu seluas- luasnya. Berupayalah agar kau benar- benar menyelami sifat- sifat orang Belanda, karena di masa depan kau akan selalu berurusan dengan mereka”.

Selain berhasil membentuk kepribadian dari Sultan Hamengku Buwono IX, pendidikan barat yang telah ditempuh oleh Sultan Hamengku Buwono IX juga telah berhasil menumbuhkan semangat nasionalisme yang lebih besar dalam dirinya. Nasionalisme Sultan Hamengku Buwono IX mulai tumbuh ketika ia masih kecil. Pada waktu ia menempuh pendidikan dasar di *Sekolah Kidul Ngloji* ia melihat adanya diskriminasi (perbedaan perlakuan yang didasarkan pada warna kulit) antara anak orang pribumi dan anak orang asing (kulit putih). Kelemahan anak pribumi dibesarkan sedangkan anak Belanda yang bodoh sekalipun dapat diterima disekolah ini.⁷⁷

Adanya perbedaan perlakuan antara anak orang pribumi dengan anak orang asing semakin memperjelas adanya perbedaan hak antara orang pribumi dengan orang asing (Belanda). Orang pribumi selalu berada dalam keadaan yang tertindas. Melihat keadaan seperti ini Dorijatun kecil menyadari bahwa orang- orang pribumi di sekitarnya tidak mempunyai suatu kebebasan didaerah mereka. Keadaan yang

⁷⁷ Nurdyanto, *op.cit*, hlm.8.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dilihat oleh Dorojatun kecil tersebut telah berhasil memunculkan suatu benih nasionalisme dalam dirinya.⁷⁸

Pada saat Hamengku Buwono IX menempuh pendidikan tingginya di Belanda, paham nasionalismenya semakin berkembang. Hal ini dikarenakan ketika Hamengku Buwono IX berada di sana, ia aktif mengikuti berbagai macam organisasi dan aktif mengikuti berbagai macam klub diskusi yang membahas masalah politik. Pada saat ia di Belanda ia sudah memasang bendera merah putih di mobilnya.⁷⁹ Pemasangan bendera ini menjadi salah satu tanda bahwa Hamengku Buwono IX bangga menjadi warga negara Indonesia.

Paham kebangsaan Hamengku Buwono IX tampak jelas pada saat diadakan perundingan mengenai kontrak politik dengan pemerintah Belanda. Dalam perundingan tersebut ia berusaha tidak semata-mata menjadi obyek yang tunduk terhadap pemerintah Belanda, ia berusaha menawar ketentuan-ketentuan dalam kontrak politik yang harus ditandatangani. Meskipun pada akhirnya Hamengku Buwono IX menandatangani kontrak politik tersebut tanpa mengetahui isinya. Hal ini dilakukan oleh Hamengku Buwono IX karena ia menuruti keinginan dari almarhum Sultan Hamengku Buwono VIII. Setelah kontrak politik itu ditandatangani, pada tanggal 18 Maret 1940 ia dinobatkan menjadi raja Yogyakarta.

⁷⁸ Sartono Kartodirjo, 1995: *Seputar Yogyakarta dan Beberapa Tokoh Kepemimpinannya*, Ceramah dalam rangka pemberian Anugerah Hamengku Buwono IX, Yogyakarta, hal.12.

⁷⁹ Dahana, dkk., *op.cit*, hlm.23.

Paham kebangsaan Hamengku Buwono IX kembali terlihat pada saat ia dinobatkan menjadi raja Yogyakarta. Paham kebangsaannya tampak jelas dalam pidato penobatannya yang berbunyi sebagai berikut:

“ Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada dipundak saya adalah sulit dan berat, terlebih- lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerjasama dalam suasana yang harmonis, tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama- tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Maka selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam *Keraton* yang kaya akan tradisi ini. Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan Nusa dan Bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya”.⁸⁰

Dari kutipan pidato penobatan di atas, ada dua hal penting yang memperlihatkan paham kebangsaannya. Pertama adalah kalimat yang berbunyi:

“ Walaupun saya telah mengenyam pendidikan pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama- tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa”. Sedangkan yang kedua adalah janjinya sebagai seorang raja Yogyakarta: “Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan Nusa dan Bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya”.

Dua kutipan di atas mempunyai makna yang cukup dalam. Kutipan yang pertama memperlihatkan keteguhan kepribadian, tanpa kehilangan identitas dari Sultan Hamengku Buwono IX meskipun ia telah mengenyam pendidikan Barat.

⁸⁰ Atmakusumah, *op.cit*, hlm. 53.

Sedangkan kutipan yang kedua mengandung makna tekad perjuangannya untuk nusa dan bangsa.⁸¹

Semangat nasionalisme Hamengku Buwono IX kembali terlihat dengan jelas pada saat bangsa asing (Belanda dan Jepang) berusaha menduduki Yogyakarta dan menguasai Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda ketika kedudukan Belanda dalam keadaan terancam karena kedatangan bangsa Jepang ke wilayah Indonesia, pemerintah Belanda mengajak Hamengku Buwono IX untuk mengungsi ke Australia. Akan tetapi ajakan dari pemerintah Belanda ini ditolak oleh Hamengku Buwono IX dengan tegas. Menanggapi ajakan pemerintah Belanda untuk mengungsi ke Australia, Hamengku Buwono IX menyatakan: “ Apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan Yogya. Justru bila bahaya memuncak, saya wajib berada di tempat demi keselamatan *keraton* dan rakyat “. ⁸² Dari pernyataannya tampak jelas bahwa Hamengku Buwono IX rela mengorbankan dirinya demi keselamatan rakyat dan bangsanya.

Wawasan kebangsaan Hamengku Buwono IX juga terlihat dari sikap tegasnya yang mendukung Republik Indonesia dengan konsekuen. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ia bersama dengan Paku Alam VIII mengirim telegram yang berisi ucapan selamat atas terselenggaranya Proklamasi Kemerdekaan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Dua hari kemudian Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mengirimkan telegram kembali yang berisi ucapan selamat atas dipilihnya Bung

⁸¹ G.Moedjanto, 1994: *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.53.

⁸² Atmakusumah, *op.cit*, hlm.56.

Karno dan Bung Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyatakan sanggup berdiri di belakang kepemimpinan mereka. Dari pernyataan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII tampak jelas bahwa mereka berjuang tidak hanya untuk Yogyakarta, akan tetapi juga untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Presiden Soekarno dan Moh. Hatta menghargai sikap tegas dari Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII dengan mengeluarkan Piagam Kedudukan pada tanggal 19 Agustus 1945.⁸³ Piagam Kedudukan ini berisi penetapan kedudukan Hamengku Buwono IX sebagai Kepala Daerah Kerajaan Yogyakarta yang merupakan daerah Republik Indonesia dengan tugas mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia.⁸⁴ Akan tetapi piagam penetapan kedudukan ini baru diserahkan pada tanggal 6 September 1945 (sehari setelah Sultan mengeluarkan amanat).

Setelah diselenggarakannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selain mengirimkan telegram ucapan selamat kepada pemerintah pusat RI, Hamengku Buwono IX juga berpidato melalui radio, bunyinya sebagai berikut:

“ Proklamasi kemerdekaan ini tidak akan hanya diucapkan dengan kata- kata saja, melainkan akan diwujudkan dengan perbuatan. Perbuatan-perbuatan untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya ingin dan

⁸³ Piagam kedudukan ini dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh Presiden Soekarno. Akan tetapi Piagam Kedudukan tersebut baru diserahkan pada tanggal 6 September 1945 oleh Menteri Negara A.A.Maramis dan Sartono sehari setelah Hamengku Buwono IX mengeluarkan Amanat pada tanggal 5 September 1945. Tentang isi lengkap dari Piagam Kedudukan dan Amanat 5 September 1945 lihat tulisan Kustiniyati Mochtar dalam Atmakusumah, *op.cit*, hlm .64-65.

⁸⁴ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm.55.

mau, akan tetapi dapat dan tahan memiliki kemerdekaan. Nasib Nusa dan Bangsa adalah di tangan kita, tergantung kepada kita sendiri.

Maka tiada kecualinya kita harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing- masing untuk kepentingan kita bersama ialah menjaga, memelihara dan membela kemerdekaan Nusa dan Bangsa. Tiap- tiap golongan harus sanggup mengesampingkan kepentingan, sanggup untuk mencapai persatuan yang bulat dan kokoh, sehingga bangsa Indonesia bisa mendapatkan senjata untuk mempertahankan republiknya; agar dapat mempertanggung jawabkannya pada generasi- generasi bangsa Indonesia yang akan datang dan agar dapat membuat sejarah yang gemilang.....”⁸⁵

Dari berbagai macam sikap Sultan Hamengku Buwono IX tersebut, tampak jelas bahwa ia mempunyai semangat nasionalisme yang begitu besar. Hamengku Buwono IX tidak hanya memperjuangkan Yogyakarta sebagai daerah kekuasaannya akan tetapi ia juga memperjuangkan keutuhan Republik Indonesia.

⁸⁵ Atmakusumah, *op.cit*, hlm.66.

BAB III

PERANAN SULTAN HAMENGKU BUWONO IX SELAMA PERGERAKAN NASIONAL 1940-1945

A. Bidang Politik

Pergerakan Nasional periode 1940-1945 diawali dengan pendudukan pemerintah Belanda dan diakhiri dengan penyerahan tanpa syarat pasukan militer Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Secara kronologis, pergerakan nasional periode 1940-1945 terbagi dalam dua masa, yaitu:

1. Masa Pemerintahan Belanda

Pada tahun 1940 ketika pemerintah Belanda masih berkuasa di Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX mulai tampil dalam dunia politik untuk pertama kalinya. Keterlibatan Sultan Hamengku Buwono IX dalam percaturan politik dimulai pada saat ia mengadakan perundingan kontrak politik dengan Gubernur Lucien Adam.

Dalam perundingan tersebut, Sultan Hamengku Buwono IX telah menunjukkan wawasannya dalam dunia politik. Sewaktu berunding dengan Gubernur Lucien Adam untuk pertama kalinya terlihat jelas bahwa ada usaha yang gigih dari calon Sultan untuk meniadakan pasal-pasal kontrak politik yang menjamin kekuasaan pemerintah Hindia Belanda atas birokrasi pemerintahan kasultanan Yogyakarta.⁸⁶ Kegigihan dari

⁸⁶ P.J.Suwarno, 1994: *Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.22.

calon Sultan untuk mempertahankan pendapatnya membuat perundingan berlangsung lama. Lamanya proses perundingan mengakibatkan kedua belah pihak merasa jenuh. Hingga pada akhirnya Gubernur Lucien Adam merasa kewalahan menghadapi calon Sultan Hamengku Buwono IX dan meminta dukungan dari *Pepatih Dalem* K.P.A.A.Danurejo untuk mempengaruhi Hamengku Buwono IX.

Akan tetapi usaha dari Gubernur Lucien Adam ini tidak berhasil, calon Sultan tetap mempertahankan pendapatnya yang berpegang teguh pada kepentingan dan keselamatan rakyatnya. Dalam perundingan kontrak politik ini, ada tiga hal yang membuat perundingan menjadi *seret*, yaitu: masalah *Pepatih Dalem*, Dewan Penasehat Kerajaan dan *Prajurit Keraton*. Akan tetapi Sultan Hamengku Buwono IX pada akhirnya menandatangani kontrak politik itu berkat *wangsit*(bisikan gaib dari almarhum ayahnya) yang mengisyaratkan agar ia segera menandatangani kontrak politik itu karena Belanda akan segera pergi.⁸⁷

Setelah kontrak politik antara kasultanan Yogyakarta dengan pemerintah Belanda ditandatangani maka Sultan Hamengku Buwono IX memimpin Yogyakarta berdasarkan kontrak politik tersebut. Meskipun sebenarnya Sultan Hamengku Buwono IX tidak sepenuhnya menyetujui isi kontrak politik tersebut. Salah satu hal yang tidak disetujui oleh Sultan Hamengku Buwono IX adalah mengenai jabatan *Pepatih Dalem* yang tercantum dalam pasal 13 kontrak politik yang telah ditandatangani oleh Sultan yang berbunyi sebagai berikut:

⁸⁷ Tentang *wangsit* untuk menandatangani kontrak politik 1940 periksa tulisan Kustiniyati Mochtar dalam Atmakusumah, 1982: *Tahta Untuk Rakyat, Celah- Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Gramedia , Jakarta, hlm.44..

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

“ 1) Dalam menjalankan kekuasaannya atas Kasultanan maka Sri Sultan dibantu oleh seorang *Pepatih Dalem* yang setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Sri Sultan, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal. Pejabat tinggi ini dalam melaksanakan tugas- tugasnya bertanggung jawab baik kepada Pemerintah Hindia Belanda maupun kepada Kasultanan” .⁸⁸

Dari isi pasal 13 di atas tampak bahwa jabatan *Pepatih Dalem* mempunyai dwi fungsi dan dwi kesetiaan terhadap Kasultanan dan pemerintah Hindia Belanda. *Pepatih Dalem* mengabdikan kepada Sultan sekaligus mengabdikan kepada pemerintah Hindia Belanda. Adanya dwi kesetiaan ini seringkali dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk diadu domba dengan Sultan. Menyadari akan adanya hal ini maka Sultan berusaha menghilangkan dwi fungsi dan dwi kesetiaan *Pepatih Dalem*. Hal ini dilakukan oleh Sultan agar *Pepatih Dalem* hanya tunduk dan mengabdikan kepada Sultan.⁸⁹

Akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Sultan untuk menghilangkan dwi fungsi dan dwi kesetiaan ini tidak berhasil. Sehingga Sultan mempergunakan cara lain agar kedudukannya sebagai kepala daerah Yogyakarta menjadi kuat. Salah satu usaha yang ditempuh oleh Sultan adalah dengan mengadakan perubahan dalam birokrasi pemerintahan Yogyakarta.

⁸⁸ Soedarisman Poewokoesomo, 1985: *Kesultanan Yogyakarta Suatu Tinjauan Tentang Kontrak Politik(1877- 1940)*, Gama Press, Yogyakarta, hlm.64 dst.

⁸⁹ Sultan Hamengku Buwono IX berusaha memperkuat kedudukannya sebagai Sultan Yogyakarta karena pada waktu pemerintah Belanda datang ke Yogyakarta, kedudukan Sultan hanya menjadi sekedar status belaka. Hal demikian terjadi karena pemerintah Belanda dapat bertindak sesukanya dengan berlindung pada pemerintahan Sultan dengan kata lain seolah- olah rakyat masih menikmati pemerintahan yang lebih baik dibawah Sultannya. Akan tetapi kenyataannya sangat berlainan, kekuasaan Pemerintah Belanda jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kekuasaan Sultan, karena semua tingkah laku Sultan selalu diawasi oleh pemerintah Belanda melalui *Pepatih Dalem* seperti yang telah diatur dalam kontrak politik antara pemerintah Hindia Belanda dengan Kasultanan Yogyakarta.

Langkah pertama yang ditempuh oleh Sultan adalah dengan mengelompokkan keluarga Hamengku Buwono VIII dan keluarga Hamengku Buwono IX. Keluarga Hamengku Buwono VIII dan keluarga Hamengku Buwono IX dikelompokkan menjadi dua yaitu pria dan wanita. Kelompok wanita dibagi menjadi empat golongan yang masing-masing dipimpin oleh seorang *lurah* sedangkan kelompok pria dibagi menjadi dua golongan yang masing-masing dipimpin oleh seorang *pangeran lurah*. Dalam memenuhi kebutuhan pribadinya enam lurah tersebut harus berhubungan dengan Sultan melalui *Kundha Wilapa* (Sekertaris Pribadi) sedangkan untuk urusan resmi melalui *Parentah Luhur*.⁹⁰

Kepala-kepala bagian dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan Sultan dikoordinasikan melalui *Parentah Hageng Karaton* yang dipimpin oleh saudara tertua Sultan, G.P.Hangabehi. Mengenai perbelanjaan barang, setiap bagian tidak berbelanja sendiri-sendiri akan tetapi diatur oleh *Kundha Halpita*. Sehingga bagian pusat dapat mengadakan pengawasan seperti dalam birokrasi modern. Sedangkan mengenai sirkulasi uang diatur oleh *Comptabiliteit* (bagian yang membuat perencanaan anggaran pendapatan dan belanja setiap bagian untuk setiap bulannya).

Bagian *Kanayakan* merupakan bagian yang sedikit berbeda dengan bagian-bagian yang lain dalam *keraton*. Bagian *Kanayakan* dikepalai oleh *Pepatih Dalem* dan tidak termasuk *bendara pangeran*. *Bendara pangeran* menjabat sebagai wakil

⁹⁰ P.J.Suwarno, *op.cit*, hlm.68.

kepala bagian (Pengageng II) yang bertugas mengatur sub- sub bagian *kanayakan* yang bertugas didalam *keraton*.

Pepatih Dalem berhubungan dengan Sultan melalui *Parentah Luhur*. Sebagai kepala bagian *kanayakan*, *Pepatih Dalem* mengatur sub bagian *kanayakan* didalam *keraton* dan *nagari*.⁹¹ Sub bagian dalam *keraton* terdiri atas *Kawedanan Gedhong Kiwa* dan *Kawedanan Gedhong Tengen* yang mengurus hasil bumi dan keuangan; *Kawedanan Keparak Kiwa* dan *Kawedanan Keparak Tengen* yang mengurus yayasan dan pekerjaan umum; *Kawedanan Siti Sewu* dan *Kawedanan Bumija* yang mengurus tanah dan praja; *Kawedanan Maos Enggal* dan *Kawedanan Panumping* yang mengurus masalah pertahanan.⁹²

Di dalam nagari untuk mengatur pemerintahan, *Pepatih Dalem* dibantu oleh *Bupati Patih Kepatihan* (Sekertaris I) dan *Bupati Parentah* (Sekertaris II) yang membawahi Pengadilan Darah Dalem dan kantor nagari yang dibentuk bersama dengan Gubernur, diantaranya adalah: 1) Kantor Keuangan yang meliputi: dinas akuntan, urusan anggaran dan urusan pajak; 2) Kantor Perguruan yang mengatur pendidikan rendah kaum pribumi; 3) Kantor Kesehatan Rakyat yang kepalanya dari Gubernemen; 4) Kantor Kemakmuran yang meliputi dinas pertanian, dinas

⁹¹ Lingkungan kasultanan Yogyakarta terdiri atas *keraton*, yang merupakan pusat wilayah kerajaan, *kutanagara* yang disebut dengan *nagara* atau *nagari* yang merupakan tempat tinggal para *abdi dalem* yang menjalankan tugas atas perintah raja. Lingkungan selanjutnya adalah *nagara agung* yang merupakan wilayah tanah lungguh (tanah jabatan) para abdi dalem yang tinggal di nagara. Lingkungan paling luar adalah *mancanagara* dan *pasisiran* (pantai) yang diperintah oleh bupati yang ditunjuk oleh Sultan.

⁹² Mengenai sub bagian dalam keraton dapat dilihat dalam P.J.Suwarno, *op.cit*, hlm 69 dan tulisan K.R.T.Dipodiningrat dalam Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 Tahun, 1956: *Kota Yogyakarta 200 Tahun, 7 Oktober 1756- 7 Oktober 1956*, hlm.39- 40.

kehewanan, dinas kerajinan dan dinas kehutanan yang semuanya dipimpin oleh Gubernur; 5) Kantor Pekerjaan Umum yang bersifat lokal, gubernemen hanya mengurus masalah bangunan; 6) Kantor Penghasilan Negeri yang mengurus air ledeng, pasar dan perusahaan. Sedangkan untuk mengatur kehidupan rakyat biasa (*kawula dalem*) dibentuk kabupaten, distrik, onderdistrik dan kalurahan serta kampung.⁹³

Dari birokrasi pemerintahan Yogyakarta di atas tampak bahwa sebenarnya wewenang Sultan untuk mengatur pemerintahan sehari-hari diambil oleh *Pepatih Dalem*. Pemerintahan *Pepatih Dalem* dikontrol oleh Gubernur Belanda dan Sultan hanya menjadi simbol didalam *keraton* yang tidak bisa mengatur rakyatnya secara langsung. Sehingga hal ini mengakibatkan Sultan tidak dapat mengatur dan melindungi rakyatnya secara bebas.

2. Masa Pendudukan Jepang

Pada tanggal 8 Desember 1941 tentara Jepang membombardir pangkalan angkatan laut Amerika Serikat yang terletak di Pearl Harbour, sehingga meletuslah apa yang dinamakan dengan Perang Dunia II. Setelah menghancurkan Pearl Harbour, pasukan Jepang menyerang beberapa negara Asia yang pada saat itu masih berada di bawah penjajahan bangsa-bangsa barat. Indonesia termasuk dalam salah satu target serangan Jepang. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia kaya akan bahan mentah.

⁹³ P.J.Suwarno, *op.cit*, hlm.70.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berita penyerangan Jepang terhadap Pearl Harbour ini juga didengar oleh pemerintah Belanda yang pada waktu itu masih menguasai wilayah Indonesia. Setelah mendengar berita penyerangan ini, pemerintah Hindia Belanda segera mengambil langkah- langkah untuk memperkuat kedudukannya di Indonesia. Langkah yang ditempuh oleh Belanda adalah dengan cara mempersenjatai rakyat Indonesia agar membantu Belanda apabila Jepang telah masuk ke wilayah Indonesia.

Akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Belanda ini tidak berhasil karena rakyat pribumi merasa enggan untuk membantu Belanda yang selama ini telah merampas hak- hak mereka. Pada tanggal 5 Maret 1942 Jepang datang ke Yogyakarta. Pasukan pertahanan yang dibentuk oleh pasukan Belanda ternyata tidak berhasil menahan serangan dari pasukan Jepang, sehingga pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Jawa Barat.⁹⁴

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang maka berakhirilah pendudukan Belanda di Indonesia yang sudah berlangsung kurang lebih selama tiga ratus lima puluh tahun. Akan tetapi dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang maka dimulailah periode baru di bawah pemerintahan Jepang.

Ketika Jepang menduduki Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX menyadari bahwa Jepang juga mempunyai tujuan yang sama dengan Belanda, yakni berusaha menguasai bangsa Indonesia dan mengambil keuntungan yang sebesar- besarnya dengan menghalalkan berbagai macam cara.

⁹⁴ Djamal Marsudi, 1985: *Sejarah Perjuangan Yogya Benteng Proklamasi*. Badan Musyawarah Musea, Yogyakarta, hlm.19.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Setelah Sultan Hamengku Buwono IX menyadari bahwa Jepang sama dengan pemerintah Belanda maka untuk mengimbangi kekuasaan Jepang, Sultan Hamengku Buwono IX menyusun strategi untuk membatasi ruang gerak pemerintah Jepang. Langkah ini diambil oleh Sultan karena ia menyadari bahwa kekuatan antara pasukan Jepang dan pasukan Yogyakarta sangat tidak seimbang. Jika Sultan mengadakan perlawanan secara terang-terangan maka pasukan Yogyakarta akan kalah.

Usaha yang ditempuh oleh Sultan adalah dengan cara memberitahu pemerintah Jepang agar segala sesuatu yang berkaitan dengan daerah kasultanan hendaknya dibicarakan dengan Sultan terlebih dahulu dan Sultan juga memerintahkan *Pepatih Dalem* supaya dalam menjalankan tugasnya hanya mendengarkan perintah Sultan.⁹⁵ Hal ini dilakukan oleh Sultan karena ia ingin membatasi wewenang dari *Pepatih Dalem* agar tidak dijadikan sebagai alat oleh penjajah untuk mengadu domba seperti pada saat Belanda menduduki Yogyakarta.

Setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang mengadakan perubahan birokrasi pemerintahan. Daerah seluruh Jawa dan Madura, kecuali Kesunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta dibagi atas *Syu*, *Syi* (kota praja), *Ken* (kabupaten), *Gun* (kawedanan), *Son* (kecamatan) dan *Ku* (desa). Surakarta dan Yogyakarta disebut sebagai daerah *Koci* (Kasultanan).⁹⁶ Sultan Hamengku Buwono IX diangkat sebagai Yogyakarta Ko. Daerah kekuasaan Sultan masih sama seperti

⁹⁵ Nurdyanto, 1998: *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwono IX*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, hlm.21.

⁹⁶ Djamal Marsudi, dkk, *op.cit*, hlm.20.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pada masa pendudukan Belanda, yaitu Yogyakarta, Bantul, gunung Kidul dan Kulon Progo.

Pada tanggal 1 Agustus 1942, Hamengku Buwono IX dilantik untuk kedua kalinya menjadi Sultan Yogyakarta oleh Panglima Besar Tentara Pendudukan Jepang, Mayor Jenderal Okasaki di Jakarta.⁹⁷ Sultan mendapat perintah dari pemerintah militer Jepang untuk mengurus pemerintah kasultanan yang diberi nama *Koci*. Untuk melaksanakan perintah tersebut, *Gunseikan* (kepala pemerintah militer Jepang) memberikan petunjuk yang memuat peraturan dasar untuk menjalankan dan memimpin pemerintah kasultanan. Dengan diberikannya petunjuk oleh pemerintah Jepang ini maka Sultan mempunyai peluang untuk lebih aktif memerintah secara langsung di daerahnya.

Adanya kesempatan ini dimanfaatkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengadakan reorganisasi dalam struktur birokrasi pemerintahan Yogyakarta. Dalam mengadakan reorganisasi birokrasi pemerintahan Yogyakarta, Sultan berpegang pada pemikiran yang masih mempertahankan tradisi sekaligus menyesuaikan dengan pemikiran modern.

Dalam birokrasi pemerintahan di dalam *keraton*, pemerintah Jepang tidak mengatur dwi kesetiaan *Pepatih Dalem* seperti pada jaman Belanda. Sehingga hal ini tentu saja akan semakin menguntungkan Sultan karena keinginan Sultan untuk menempatkan *Pepatih Dalem* secara penuh dibawah perintahnya dapat terwujud.

⁹⁷ Hamengku Buwono IX pertama kali dilantik menjadi Sultan Yogyakarta oleh Gubernur Lucien Adam (pemerintah Belanda) pada tanggal 18 Maret 1940 di Siti Hinggil, keraton Yogyakarta.

Meskipun Sultan selalu berada dalam pengawasan pemerintah Jepang , Sultan dapat memusatkan kekuasaan di tangannya dan *Pepatih Dalem* hanya tunduk kepada perintah Sultan. Dengan ditiadakkannya dwi kesetiaan *Pepatih Dalem* maka secara otomatis kekuasaan pemerintahan *karaton* (*Parentah Hageng Karaton*) dan pemerintahan nagari berada dalam tangan Sultan.⁹⁸

Selain itu pada tanggal 22 Oktober 1942 Sultan menggabung *Parentah Luhur* (Sekretaris Pribadi Sultan dalam urusan resmi) dan *Kawedanan Kori* (Penghubung *Parentah Hageng Karaton* dan *Parentah Nagari*) menjadi *Kawedanan Kori Baru* dengan ketuanya B.P.H.Puruboyo, saudara tua Sultan *Kawedanan Kori* dipergunakan oleh Sultan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan birokrasi pemerintahan kasultanan Yogyakarta . *Kawedanan Kori Baru* terdiri atas dua bagian *Kawedanan Kori* (dulu *Parentah Luhur*) dan *Kawedanan Punakawan Kori*. *Kawedanan Kori* mempunyai tugas: 1) mengurus surat menyurat antara Sultan dengan dan nagari, pengadilan *Karaton Darah Dalem* dan menyampaikan surat perintah kepada putera-putra Sultan. Kantor *Kawedanan Kori* disebut dengan *Kori*; 2) mengurus permintaan surat untuk gelar kebangsawanan (*Serat Kekancingan Kedarahan*), kantornya disebut dengan *Kasentanan Darah Dalem*.

Sedangkan *Kawedanan Punakawan Kori* mempunyai tugas ; 1) mengurus surat menyurat antara kantor- kantor didalam *keraton* dengan kantor nagari., pegawainya disebut dengan *Punakawan Kori*; 2) mengembangkan kasusteraan Jawa, pegawainya disebut dengan *Punakawan Kapunjanggan*; 3) mengurus dinas

⁹⁸ P.J.Suwarno, *op.cit*, hlm.102.

Pekabaran *keraton*, pegawainya disebut dengan *Punakawan Dwarawarta*; 4) mengurus taman bacaan *keraton*, pegawainya disebut dengan *Punakawan Banjarwilapa* dan melayani *Pangeran Lurah* yang pegawainya disebut dengan *Pangeranan*.⁹⁹

Selain menggabung *Parentah Luhur* dan *Kawedanan Kori*, pada akhir tahun 1942 Sultan menyusun birokrasi pemerintahan dengan pembagian secara vertikal dan horizontal yang langsung dikoordinasi oleh *Pepatih Dalem* Danurejo VIII. Dalam birokrasi pemerintahan ini Sultan mempunyai jabatan tertinggi yang bertanggung jawab kepada *Saiko Sikikan*. Di bawah Sultan terdapat *Kawedanan Kori* yang dipimpin oleh B.P.H.Puruboyo. *Kawedanan Kori* mempunyai tugas menyampaikan perintah Sultan kepada *Pepatih Dalem* agar segera dilaksanakan.

Dalam menjalankan tugasnya *Pepatih Dalem* dibantu oleh *Agnya Praja* dengan kepala I K.R.T.Notonegoro dan kepala II K.R.T.Honggowongso. Selain itu dalam menjalankan tugasnya *Pepatih Dalem* juga dibantu oleh beberapa biro, diantaranya adalah: 1) *Sana Panitra* (Sekertariat) yang dipimpin oleh K.R.T.Mangundipuro ; 2) *Bale Wisuda* (Urusan Pegawai) dengan wakil kepala R.Ng. Harjopringgoharjo; 3) *Dhatu Wandawa* (Pemberian Gelar Bangsawan) dengan ketuanya K.R.T.Wijil; 4) *Pembuatan Peraturan Negeri* dengan ketuanya Mr. R.Ng.Jody; 5) *Radya Kintaka* (Arsip) dengan ketuanya K.R.T.Sindunegoro; 6) *Bunen Banikarti* (Alat- alat Kantor) dengan ketuanya K.R.T.Sindunegoro; 7) *Sandhi Pura* (Perhubungan Keraton) dengan ketuanya K.R.T.Puspodiningrat dan 8) *Kundha*

⁹⁹ *Ibid*, hlm.103.

Pustaka yang dipimpin oleh Mr.R.Riyo Purbohatmojo.¹⁰⁰ Dengan adanya biro- biro ini maka tugas *Pepatih Dalem* akan semakin ringan karena terdapat pembagian tugas yang sesuai dengan bidang biro masing- masing.

Pembagian tugas secara horizontal mempunyai 12 bagian yaitu; bagian keuangan, bagian pengajaran, bagian pengadilan, bagian pekerjaan tekhnik, bagian perusahaan, bagian kesehatan rakyat, bagian urusan tanah, bagian golongan yang berkantor didalam keraton, bagian yayasan purbakala, bagian penyuluh pertanian, bagian urusan peternakan, dan berbagai keperluan sosial yang lainnya.

Sedangkan pembagian secara vertikal menghasilkan wilayah administratif dari atas ke bawah yang terdiri atas; Daerah Istimewa (*Kooti*), Kabupaten (*Ken*), Kawedanan (*Gun*), Asistenan (*Son*) dan Kalurahan (*Ku*) serta *Kemantren Pangreh Praja*. *Kooti* dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono IX yang membawahi empat kabupaten, yaitu: Kabupaten Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo.

Kabupaten Yogyakarta membawahkan 3 Kawedanan yaitu; 1)Kawedanan Kota yang membawahi 2 Asistenan yang terdiri atas 10 pangreh praja dan 3 kalurahan; 2) Kawedanan Sleman yang membawahi 6 asistenan dan terdiri dari 104 kalurahan; 3) Kawedanan Kalasan yang membawahi 6 asistenan yang terdiri atas 84 kalurahan.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm.105.

¹⁰¹ Nurdyanto, *op.cit*, hlm.25.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kabupaten Bantul membawahi 4 Kawedanan yaitu; 1) Bantul yang membawahi 6 asistenan yang terdiri dari 76 kalurahan; 2) Kotagede yang membawahi 5 asistenan yang terdiri atas 72 kalurahan; 3) Godean yang membawahi 5 asistenan yang terdiri dari 72 kalurahan; 4) Pandak yang membawahi 5 asistenan yang terdiri atas 54 kalurahan.

Kabupaten Gunung Kidul membawahi 3 Kawedanan yaitu; 1) Wonosari yang membawahi 4 asistenan yang terdiri dari 58 kalurahan; 2) Playen yang membawahi 4 asistenan yang terdiri dari 53 kalurahan; 3) Semanu yang membawahi 4 asistenan yang terdiri dari 57 kalurahan.

Kabupaten Kulon Progo yang membawahi 2 Kawedanan yaitu; 1) Nanggulan yang membawahi 4 asistenan yang terdiri dari 62 kalurahan; 2) Sentolo yang membawahi 4 asistenan yang terdiri dari 57 kalurahan.¹⁰²

Adanya pembagian kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan Yogyakarta ini telah menunjukkan bahwa dalam diri Sultan terdapat paham demokrasi yang diwujudkan dalam struktur birokrasi pemerintahan. Dengan adanya pembagian kekuasaan ini maka Sultan dapat dengan mudah mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan di Yogyakarta.

¹⁰² P.J.Suwarno, *op.cit*, hlm.109.

B. Bidang Sosial- Ekonomi

1. Masa Pemerintahan Belanda

Sultan Hamengku Buwono IX merupakan seorang pemimpin yang tanggap terhadap perkembangan situasi terutama perkembangan rakyatnya. Oleh karena itu sekalipun sedang berada dalam masa penjajahan, Sultan juga berusaha memajukan rakyatnya. Meskipun Sultan hanya mempunyai waktu dua setengah tahun karena pemerintah kolonial Belanda digantikan oleh tentara militer Jepang. Usaha dari Sultan ini dimulai dengan memperhatikan masalah kesejahteraan rakyatnya.

Selain memperhatikan masalah pemerintahan, Sultan juga memperhatikan perkembangan ekonomi rakyatnya. Sultan Hamengku Buwono IX mengambil peranan sebagai wiraswasta untuk membangun kembali perekonomian daerahnya. Usaha ini dilakukan oleh Sultan meskipun ia tidak mempunyai pengalaman dalam masalah ekonomi. Akan tetapi berkat dukungan penuh dari rakyatnya, Sultan berhasil memajukan ekonomi rakyatnya. Pada tahap awal Sultan tidak membangun industri baru akan tetapi berusaha menghidupkan kembali perusahaan pertanian dan perusahaan lainnya.

Proyek Sultan yang pertama adalah perkebunan tembakau. Pada masa penjajahan Belanda, tiga buah perusahaan tembakau asing berdiri di daerah bagian timur Sleman dan Bantul. Perusahaan- perusahaan ini menanam tembakau, mengeringkan dan mengawetkan tembakau di tanah- tanah sewaan dan mengekspor tembakaunya ke pasar tembakau di Amsterdam. Untuk mengawasi persaingan di pasar, pemerintah Belanda mengeluarkan suatu peraturan yang dikenal dengan

ordonansi krosok (tembakau yang ditanam dan dikerjakan oleh para petani) yang mengharuskan petani perorangan yang menanam tembakau harus mempunyai ijin resmi dari pemerintah dan membatasi jenis tembakau serta daerah penanaman.

Pada saat Perang Dunia II meletus, perkebunan tembakau asing di daerah Yogyakarta ditutup, akan tetapi sejumlah petani Indonesia meneruskan menanam tembakau untuk pasaran dalam negeri. Sultan merencanakan membentuk suatu organisasi para penanam tembakau di tiap desa, mencarikan pasaran dalam negeri untuk hasil produksinya dan membentuk suatu pusat penjualan tembakau yang berfungsi sebagai perantara untuk produsen dan pembeli.¹⁰³

Tujuan utama dari program- program Sultan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi yang pada waktu itu menderita akibat penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada saat pemerintah kolonial Belanda menduduki Yogyakarta, rakyat Yogyakarta dipaksa untuk bekerja demi kepentingan pemerintah Belanda dengan dalih membantu rakyat pribumi.

2. Masa Pendudukan Jepang

Selain mengadakan pembaharuan dalam bidang pemerintahan, Sultan juga mengadakan pembaharuan dalam berbagai macam bidang, diantaranya adalah bidang sosial- ekonomi dengan tujuan agar rakyat Yogyakarta memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

¹⁰³ Selo Soemardjan, 1986: *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.237.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pembaharuan dalam bidang sosial dimulai dengan menghapus larangan memakai selop, sandal, topi, tongkat dan payung di *Pamengkang Sitihiinggil Utara*, *Kemandungan Selatan* dan *Pamengkang Sitihiinggil Selatan*. Selain itu Sultan juga menghapus aturan pemberian hormat dengan jongkok kepada Sultan ketika berada di luar *keraton*.¹⁰⁴

Setelah menghapus dua aturan di atas, Sultan mulai memperhatikan pendidikan rakyatnya, baik untuk anak- anak *abdi dalem* maupun anak- anak *kawula dalem*. Pada bulan Agustus 1942 Sekolah Rakyat Kaputran yang semula hanya diperuntukkan bagi anak- anak *abdi dalem* mulai menerima anak- anak *kawula dalem*. Selanjutnya Sultan juga membuka beberapa sekolah baru, di antaranya : Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Tinggi (SMT).SMT mempunyai 524 murid dengan 14 guru dan kepala sekolahnya R.J.Katamsi. SMP I mempunyai 549 murid dengan 15 guru dan kepala sekolah S.M.Ondang. SMP II mempunyai 280 murid dengan 8 guru dan kepala sekolah Kasan Basri.¹⁰⁵

Sultan Hamengku Buwono IX memajukan pendidikan rakyatnya dengan tujuan agar rakyat mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tidak mudah diperalat oleh penjajah. Apa yang dilakukan oleh Sultan ini membawa hasil yang cukup memuaskan. Menjelang akhir tahun 1942 keadaan sekolah di Yogyakarta mengalami

¹⁰⁴ Nurdyanto, *op.cit*, hlm.26

¹⁰⁵ Mengenai sejarah pendidikan di Yogyakarta dapat dilihat dalam tulisan Tjokrosiswojo dalam Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 Tahun, 1956: *Kota Yogyakarta 200 Tahun, 7 Oktober 1756- 7 Oktober 1956*, hlm.54-101.

peningkatan yang sangat bagus. Peningkatan ini tampak jelas dari jumlah murid di sekolah negeri, sekolah kasultanan, sekolah Pakualaman dan sekolah partikelir.

Sekolah negeri terdiri dari; 1) 103 Sekolah Rakyat (SR) dengan 12.638 murid; 2) 1 Sekolah Dagang Rendah (SDR) dengan 311 murid; 3) 1 Sekolah Guru Perempuan (SGP) dengan jumlah murid 385 murid; 4) 1 Sekolah Guru Laki- laki (SGL) dengan jumlah murid 385 murid; 5) 2 SMP dengan jumlah murid 829 murid; 6) 1 SMT dengan jumlah murid 524 murid.

Sekolah kasultanan terdiri dari: 1) 3 Sekolah Rakyat dengan jumlah murid 883 murid; 2) 273 Sekolah Pertama dengan jumlah murid 34.293 murid. Sekolah Paku Alaman yang terdiri dari: 1) 35 Sekolah Pertama dengan jumlah murid 3.324 murid. Sekolah Partikelir yang terdiri dari: 1) 109 Sekolah Rakyat dengan jumlah murid 14.326 murid; 2) 231 Sekolah Pertama dengan jumlah murid 21.995 murid; 3) Sekolah Guru dan Sekolah Menengah (milik Muhamadiyah).¹⁰⁶ Dalam mengadakan pembaharuan diberbagai bidang, Sultan Hamengku Buwono IX menjalin hubungan dengan Ki Hajar Dewantara yang merupakan salah satu pejuang nasionalis yang bergerak dalam bidang pendidikan (Taman siswa).

Salah satu hal yang melatarbelakangi keinginan Sultan untuk mengadakan pembaharuan kehidupan rakyatnya adalah adanya penderitaan rakyat akibat dari kekejaman penindasan pasukan militer Jepang. Pasukan Jepang berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar- besarnya dari rakyat pribumi. Rakyat

¹⁰⁶ P.J.Suwarno, *op.cit*, hlm.103.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pribumi dipaksa untuk bekerja tanpa upah dan disiksa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pemerintah Jepang. Sistem kerja paksa ini dikenal dengan sistem *Romusha*.

Akan tetapi dengan kecerdikan yang ia miliki, Sultan berhasil membebaskan rakyat Yogyakarta dari kerja paksa tersebut. Sultan Hamengku Buwono IX berhasil mengelabui tentara Jepang dengan menyembunyikan angka- angka statistik yang sebenarnya di daerah Yogyakarta mengenai jumlah penduduk, hasil panen dan jumlah ternak. Dengan menyusun angka statistik yang palsu ini, Sultan telah berhasil menekan jumlah penduduk, jumlah padi dan ternak yang diminta oleh tentara Jepang, bahkan Sultan telah berhasil meyakinkan tentara Jepang bahwa Yogyakarta merupakan daerah minus.

Selanjutnya dengan alasan agar Yogyakarta dapat memberikan bantuan hasil bumi kepada pemerintah militer Jepang, maka Sultan berdiplomasi dengan pemerintah militer Jepang agar diberi bantuan dana untuk membangun sarana irigasi. Dengan kecerdikan yang ia miliki, Sultan Hamengku Buwono IX berhasil meyakinkan pemerintah militer Jepang hingga pada akhirnya ia berhasil mendapatkan bantuan dari Jepang untuk membangun saluran air. Saluran air ini dikenal dengan nama “ Selokan Mataram “. Dengan adanya proyek pembangunan saluran irigasi ini maka rakyat Yogyakarta berhasil terhindar dari kerja *Romusha*. Selain itu adanya “ Selokan Mataram” telah berhasil meningkatkan perekonomian rakyat Yogyakarta dengan hasil pertanian yang baik.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Nurdyanto, *op.cit*, hlm.27.

Selain berhasil mengelabui tentara militer Jepang dan mendapatkan bantuan pembuatan saluran irigasi, untuk memajukan ekonomi rakyat Yogyakarta, Sultan juga mulai memperhatikan kemajuan ekonomi Yogyakarta. Pada tahun 1943 Sultan mencurahkan perhatiannya pada rakyat dan menyusun rencana serta program-program untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Penyusunan rencana serta program-program untuk memajukan taraf hidup rakyat dimulai dengan mengadakan kunjungan ke desa-desa. Pelaksanaan kunjungan Sultan ke desa-desa sebelumnya telah dijadwal terlebih dahulu. Pada tanggal 6 April 1943 Sultan dan pengiringnya mengunjungi daerah Gunung Kidul, tanggal 7 ke daerah Kulon Progo, tanggal 8 ke Bantul dan tanggal 10 ke Yogyakarta Ken. Kunjungan Sultan ke daerah-daerah tersebut ditemani oleh *Pepatih Dalem*, B.P.H.Puruboyo, Tagauchi dan Sidarto.¹⁰⁸

Dalam melaksanakan kunjungannya tersebut, Sultan selalu ditemani oleh salah satu wakil dari tentara militer Jepang. Sehingga dalam mengadakan kunjungan, pada saat diadakan konferensi, Sultan selalu memulai konferensi dengan pidato pembukaan dilanjutkan uraian mengenai pemerintah Jepang. Setiap Sultan mengadakan kunjungan, ia selalu berusaha membesarkan hati rakyatnya karena Sultan menyadari bahwa rakyatnya hidup menderita dalam penjajahan.

Tujuan Sultan mengadakan kunjungan ke desa-desa tersebut adalah untuk mengamati keadaan rakyatnya. Hasil kunjungan dicatat dan dijadikan sebagai bahan acuan untuk menyusun program-program. Pada tahun 1943, pemerintah Yogyakarta

¹⁰⁸ P.J.Suwarno, *op.cit*, hlm.110.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

merencanakan program pembangunan dalam bidang pertanian, terutama pengairan dan pengenalan bibit unggul serta peternakan dan penghutanan daerah- daerah yang tandus (Gunung Kidul dan Kulon Progo).

Program- program yang telah disusun dibagi dalam dua tahap yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek berupa pembangunan saluran irigasi untuk mencegah banjir dan untuk mengairi sawah yakni dengan memperbaiki tanggul sungai Code. Sedangkan proyek jangka panjang berupa penghutanan kembali daerah- daerah yang tandus (Kulon Progo dan Gunung Kidul). Untuk peningkatan bidang peternakan, Sultan lebih memprioritaskan daerah Kulon Progo kemudian daerah Gunung Kidul. Sultan mengirimkan beberapa jenis ternak di daerah Gunung Kidul dan Kulon Progo. Didaerah Gunung Kidul Sultan mengirim 4 ekor kuda, 49 ekor sapi Benggala dan beberapa kambing jantan.

Program dalam bidang perikanan difokuskan di daerah dalam kota Yogyakarta (Sempu, Pakem dan Ngasem). Sedangkan program dibidang pertanian, Sultan merencanakan penanaman jarak, kapas dan jagung selain penanaman padi. Di daerah istimewa Yogyakarta menurut rencana akan ditanam jarak seluas 3.000 ha, dengan rincian setiap kabupaten akan mendapatkan 750 ha. Akan tetapi di daerah Gunung Kidul ternyata telah ditanam jarak seluas 4.000 ha. Jagung akan ditanam dilahan seluas 2.000 ha dan penanaman kapas akan diuji coba didaerah Kulon Progo.¹⁰⁹ Proses penanaman berbagai macam jenis tanaman dikelola oleh rakyat

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 112. Tanaman jarak lebih diperbanyak karena pada waktu itu jarak merupakan komoditi yang cukup mahal (diambil minyaknya untuk dijadikan sebagai bahan bakar).

BAB IV

PERANAN SULTAN HAMENGKU BUWONO IX SELAMA PERGERAKAN NASIONAL 1945- 1949

A. Bidang Politik

Adanya *ramalan Jayabaya* mengenai kurun waktu pendudukan tentara militer Jepang yang diramalkan hanya seumur jagung ternyata benar- benar terbukti. Hal ini dikarenakan pada tahun 1943- 1944 ketika Perang Asia Raya mengalami titik balik (*turning point*) yang ditandai dengan perubahan sikap tentara militer Jepang dari yang tadinya *ofensif* (menyerang) menjadi bersifat *defensif* (bertahan). Keadaan ini semakin diperparah dengan menyerahnya Jerman dan Italia (teman seporos Jepang) kepada pihak sekutu. Sehingga keadaan ini mengakibatkan Jepang harus berperang sendiri melawan Sekutu (Inggris, Perancis, Amerika Serikat).

Menyadari sedang berada dalam keadaan yang terjepit, pemerintah Jepang berusaha mendapatkan dukungan dari Indonesia dengan cara memberikan janji- janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji- janji kemerdekaan dari pemerintah Jepang ini disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang, Koisho. Akan tetapi usaha dari pemerintah Jepang untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia tidak berhasil dan justru menjadi “senjata makan tuan” bagi pemerintah Jepang.

Adanya janji- janji kemerdekaan ini disikapi secara sungguh- sungguh oleh pemimpin- pemimpin Indonesia. Dalam waktu yang cukup singkat setelah disebarluaskannya janji kemerdekaan tersebut, para pemimpin Indonesia segera

membentuk suatu Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (*Dokuritu Zyumbi Coosakai*) yang diketuai oleh Dokter Radjiman Wedyodiningrat. Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) menjadi perintis dan pencetus ide- ide tentang dasar filsafat negara yang akan didirikan.¹¹⁰ Anggota BPUPKI yang berasal dari Yogyakarta diantaranya adalah: Ki Hajar Dewantara, Ki Bagus Hadikusumo, Dr. Sukiman, Abdul Kahar Muzakkir dan dari dalam kasultanan adalah B.P.H.Puruboyo dan B.P.H.Bintoro.¹¹¹

Keadaan Jepang semakin melemah ketika pasukan Amerika menjatuhkan dua buah bom atom di Hiroshima (tanggal 6 Agustus 1945) dan Nagasaki(tanggal 9 Agustus1945). Adanya kejadian ini telah berhasil mempercepat proses berakhirnya Perang Dunia II karena pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu. Akan tetapi Jepang berusaha menutupi agar berita tersebut tidak sampai ke Indonesia.

Meskipun berita tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu ini dirahasiakan oleh tentara pendudukan Jepang di Indonesia, namun beberapa pemuda Indonesia berhasil mendengar siaran radio luar negeri dan menyamapaikan berita tersebut kepada tokoh- tokoh pergerakan nasional Indonesia. Setelah tokoh- tokoh pergerakan nasional mendengar berita penyerahan Jepang kepada Sekutu, pada tanggal 16 Agustus 1945 mereka segera mengadakan rapat dan membentuk Panitia Persiapan

¹¹⁰ Djamal Marsudi, 1985: *Sejarah Perjuangan Yogya Benteng Proklamasi*. Badan Musyawarah Musea, Yogyakarta, hlm.32.

¹¹¹P.J.Suwarno,1994: *Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*.Kanisius.Yogyakarta, hlm.159.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Kesokan harinya yakni pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia berhasil di proklamirkan oleh bangsa Indonesia sendiri terlepas dari janji yang pernah diberikan oleh Jepang.

Proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta di jalan Pegangsaan Timur No.56 Jakarta. Teks otentik Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta berbunyi sebagai berikut:

“ PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 45
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta”¹¹²

Pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta menandai lahirnya kemerdekaan Indonesia yang selama ini diperjuangkan dan dinantikan oleh bangsa Indonesia.

Peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam bidang politik pergerakan nasional periode 1945- 1949 dapat digolongkan dalam tiga kurun waktu, yaitu: Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Yogyakarta menjadi Ibukota Republik dan Agresi Belanda

¹¹² Ginanjar Kartasmita, dkk, 1986: *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945- 1949*, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, hal.20.

1. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI

Berita telah diselenggarakannya Proklamasi Kemerdekaan langsung menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya pukul 12.00 kantor berita *Domei* di Yogyakarta menerima berita Proklamasi Kemerdekaan dari Kantor *Domei* di Jakarta. Sesaat setelah berita Proklamasi Kemerdekaan sampai ke kantor berita *Domei* di Yogyakarta, muncul berita susulan dari pemerintah Jepang agar berita Proklamasi jangan disebarluaskan kepada masyarakat.

Akan tetapi secara sembunyi- sembunyi berita Proklamasi ini menyebar dari mulut ke mulut terutama di kalangan tokoh- tokoh masyarakat dan pemuda. Selain dari mulut ke mulut, berita Proklamasi menyebar melalui khotbah di Masjid Besar Alun- Alun Utara dan Masjid Paku Alaman karena pada waktu itu hari Jumat sehingga umat muslim sedang menjalankan sholat Jumat.¹¹³

Sultan Hamengku Buwono IX juga mendengar berita Proklamasi Kemerdekaan ini dan berpendapat bahwa Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa yang memberikan jalan untuk melepaskan diri dari penderitaan lahir dan batin sekaligus juga memberikan jalan untuk menentukan kehidupan dimasa yang akan datang.¹¹⁴

Setelah mendengar berita proklamasi, Sultan mengadakan pertemuan dengan Paku Alam VIII dan K.R.T.Honggowongso (staf senior di Kepatihan) dan mereka sepakat untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proklamasi kemerdekaan.

¹¹³ Djamal Marsudi, *op.cit*, hlm.48.

¹¹⁴ Nurdyanto,1998: *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwono IX*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, hlm.31.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sehari setelah proklamasi yakni tanggal 18 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mengirimkan telegram kepada Ir. Soekarno dan Moh. Hatta yang isinya berupa ucapan selamat atas terbentuknya negara Republik Indonesia. Telegram ini merupakan salah satu bentuk dukungan dan perhatian Sultan terhadap negara Republik Indonesia.

Sehari setelah diselenggarakannya proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang dan menghasilkan tiga buah keputusan yang salah satu di antaranya adalah memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Tanggal 20 Agustus, Sultan kembali mengirimkan telegram kepada Presiden dan Wakil Presiden yang isinya secara spontan menyatakan sanggup berdiri di belakang kepemimpinan mereka.¹¹⁵ Selain mengirimkan telegram kepada Ir. Soekarno dan Moh. Hatta, Sultan juga memberikan sambutan tertulis dan dimuat di harian Sinar Matahari yang bunyinya sebagai berikut:

“ Sekarang kemerdekaan telah berada di tangan kita, telah kita genggam. Nasib nusa dan bangsa adalah ditangan kita pula, tergantung kepada kita sendiri. Kita harus menginsyafi bahwa lahirnya Indonesia Merdeka itu dalam masa kegentingan. Maka semua tiada kecualinya harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing- masing untuk kepentingan kita bersama, ialah menjaga, memelihara dan membela kemerdekaan nusa dan bangsa.

Sekarang bukan waktunya mengemukakan dan memperbesar segala pertentangan dan perselisihan faham. Tiap- tiap golongan harus sanggup menyampingkan kepentingannya, sanggup untuk mencapai persatuan yang baru dan

¹¹⁵ Telegram yang dikirimkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tanggal 20 Agustus oleh Sultan dan Paku Alam VIII yang ditujukan untuk Ir. Soekarno dan Moh. Hatta (pemerintah pusat) menunjukan ketegasan sikap dari Sultan dan Paku Alam VIII. Kedua telegram ini bersifat pribadi karena belum mencerminkan kehendak rakyat. Yogyakarta merupakan kota pertama yang memberi ucapan selamat atas terselenggaranya proklamasi dan terpilihnya Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kokoh sehingga bangsa Indonesia mendapatkan senjata untuk mempertahankan kemerdekaannya , buat menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap angkatan-angkatan Bangsa Indonesia yang akan datang dan membikin sejarah yang gemilang”¹¹⁶

Pemerintah pusat menghargai sikap tegas Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VII. Oleh karena itu sejak tanggal 19 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan Piagam Kedudukan yang berisi penetapan kedudukan Hamengku Buwono IX sebagai Kepala Daerah Kerajaan Yogyakarta yang merupakan daerah Republik Indonesia dengan tugas mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian dari RI.¹¹⁷ Akan tetapi piagam ini baru disampaikan pada tanggal 6 September oleh Menteri Negara Sartono dan A.A.Maramis.

Dukungan Sultan Hamengku Buwono IX terhadap bangsa Indonesia tidak hanya sampai di situ saja. Pada tanggal 24 Agustus 1945 Sultan dan Paku Alam memberikan dukungan secara penuh kepada rakyat untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Pembentukan KNID di Yogyakarta ini diprakarsai oleh kelompok nasionalis yang mempunyai hubungan dengan pemimpin-pemimpin nasionalis di Jakarta antara lain Moh. Astar.¹¹⁸ Pembentukan KNID ini dilaksanakan setelah Ir. Soekarno mengeluarkan maklumat pendirian Komite Nasional Indonesia (KNI) pada tanggal 23 Agustus 1945.

¹¹⁶ Djamal Marsudi, *op.cit*, hlm.49.

¹¹⁷ G.Moedjanto, 1994: *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*, Kanisius, Yogyakarta, hlm .55.

¹¹⁸ P.J.Suwarno,*op.cit*, hlm.167.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada awalnya anggota KNID Yogyakarta ini hanya terdiri dari 32 orang. Akan tetapi lama- kelamaan jumlah anggotanya mengalami peningkatan hingga mencapai 84 orang dan 3 penasehat yakni: B.P.H.Puruboyo, Ki Bagus Hadikusumo dan Dr. Sukiman. Berdasarkan golongan atau kelompoknya, anggota KNID Yogyakarta dapat dikelompokkan menjadi: kelompok *Kooti Hookookai* yang dipimpin oleh Sultan, kelompok Perkumpulan Kawula Ngayogyakarta (PKN), kelompok polisi, kelompok Taman Siswa, kelompok Islam, kelompok wartawan, kelompok politik, kelompok Promotor Pemuda Nasional, kelompok BPU dan kelompok Angkatan Muda Pathook. Anggota terbanyak berasal dari kelompok *Kooti Hookookai* (16 orang) dan kelompok politik (16 orang).

Setelah ikut serta dalam pembentukan KNID, pada awal September 1945, Sultan mengadakan pertemuan dengan Sri Paku Alam VIII, Ki Hajar Dewantara dan beberapa tokoh lain seperti Purwokusumo. Pertemuan ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa rakyat Yogyakarta menyambut proklamasi kemerdekaan dengan rasa bahagia dan lega. Melihat kenyataan ini maka atas persetujuan KNID, maka pada tanggal 5 September 1945 Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan amanat. Secara tegas Sultan menyatakan bahwa daerah kasultanan Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia dengan kedudukan Daerah Istimewa. Amanat yang dikeluarkan oleh Sultan ini merupakan awal perebutan kekuasaan dari tangan pemerintah Jepang.

Amanat Sultan tertanggal 5 September 1945 memuat tiga pernyataan pokok yaitu:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Ngayogyakarta Hadiningrat berbentuk kerajaan yang merupakan Daerah Istimewa, bagian dari RI.
2. Segala kekuasaan dalam negeri dan urusan pemerintahan berada di tangan Sultan Hamengku Buwono IX.
3. Hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Sultan Hamengku Buwono IX bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.¹¹⁹

Amanat Sultan Hamengku Buwono IX tanggal 5 September 1945 ini disambut secara positif oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Pada tanggal 6 September 1945 dua utusan pemerintah pusat (Menteri Negara A.A.Maramis dan Sartono) datang ke Yogyakarta dan menyampaikan Piagam Penetapan mengenai kedudukan Yogyakarta yang telah ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Sebenarnya piagam penetapan ini telah disiapkan oleh Presiden Soekarno sejak tanggal 19 Agustus 1945 (sehari setelah Sultan mengirim telegram kepada Sultan).

Piagam penetapan ini menyatakan:

Kami Presiden Republik Indonesia, menetapkan:

Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatulah Ingkang Kaping IX ing Ngayogyakarta Hadiningrat, pada kedudukannya dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 1945

¹¹⁹ Kustiniyati Mochtar dalam Atmakusumah, 1982: *Tahta Untuk Rakyat, Celah- Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Gramedia , Jakarta, hlm.65.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Presiden Republik Indonesia

Ttd
Soekarno¹²⁰

Adanya piagam penetapan kedudukan ini semakin mengukuhkan kedudukan Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia. Sehingga hubungan antara Yogyakarta dengan pemerintah pusat menjadi semakin jelas sekaligus memperkuat kedudukan Sultan sebagai pemimpin pemerintahan Yogyakarta.

Adanya ketegasan sikap dari Sultan untuk merebut kekuasaan RI dari tangan pemerintah Jepang melalui amanat tanggal 5 September 1945 telah berhasil mendorong usaha- usaha dari rakyat pribumi untuk ikut serta mengambil alih kekuasaan dari tangan pemerintah Jepang. Beberapa hari setelah Sultan mengeluarkan amanat tanggal 5 September 1945, para pejuang pers di bawah pimpinan Samawi dan Sumantoro membongkar segel percetakan Sinar Matahari yang terletak di Hotel Garuda (Jalan Malioboro). Dalam gerakan ini para pejuang pers berhasil menguasai alat- alat percetakan dan mereka menggunakannya sebagai modal awal untuk menerbitkan Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Gerakan pengambilalihan kekuasaan ini juga dilakukan oleh Sumarmadi. Sumarmadi beserta teman- temannya telah berhasil mengambil alih radio Jepang dan menggantinya dengan nama RRI (Radio Republik Indonesia).¹²¹ Setelah pemerintah Yogyakarta berhasil mendapatkan

¹²⁰ Nurdyanto, *op.cit*, hlm 36. Adanya piagam penetapan kedudukan yang dibuat oleh Presiden Soekarno ini menandai bahwa mulai saat piagam itu dikeluarkan, daerah Yogyakarta resmi sebagai bagian dari Republik Indonesia.

¹²¹ Tashadi,dkk,1987: *Sejarah Revolusi Kemerdekaan di DIY (1945- 1949)*,Depdikbud, Yogyakarta,hlm.80.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kedua media pemberitaan tersebut maka semangat perjuangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan dapat dengan mudah disebarluaskan.

Sultan Hamengku Buwono IX bersama- sama dengan Paku Alam VIII berhasil menjalin kerjasama dengan para pemuda dan rakyat untuk melakukan gerakan perebutan kekuasaan dan perebutan senjata. Pada tanggal 21 September 1945 rakyat dan para pemuda yang terdiri dari BPU (Barisan Penolong Umum), Polisi Istimewa(PI) dan BKR (Badan Keamanan Rakyat) bergerak bersama- sama menuju ke gedung *Cokan Kantai* (sekarang dikenal dengan nama Gedung Negara) yang terletak di jalan Malioboro untuk menurunkan bendera *Hinomaru* (bendera Jepang) dan menggantinya dengan Sang Saka Merah Putih.¹²² Salah satu pemimpin pemuda yang berhasil memanjat tiang bendera dan menurunkan bendera *Hinomaru* dan menggantikannya dengan bendera Merah Putih adalah seorang pemuda yang bernama Rusli. Setelah berhasil menurunkan lambang kekuasaan pemerintah Jepang massa melakukan pawai keliling di jalan Malioboro dengan pengawalan PI (Polisi Istimewa).

Melihat insiden penurunan bendera *Hinomaru* dan digantikan dengan bendera RI, pemerintah Jepang tidak tinggal diam. Pada tanggal 23 September 1945 tentara Jepang melucuti senjata kesatuan polisi istimewa yang terletak di Gayam dan dikumpulkan digudang milik pemerintah Jepang. Setelah mengetahui kejadian ini, Komisaris Polisi Sudarsono berusaha melakukan perundingan dengan pemerintah Jepang untuk meminta kembali senjata milik kesatuan polisi istimewa yang telah

¹²² Djamal Marsudi, *op.cit*, hlm.52.

disita. Akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Komisarisi Polisi Sudarsono ini tidak berhasil dan berakhir dengan gerakan pemuda, polisi dan rakyat Yogyakarta yang mengepung markas tentara Jepang. Akhirnya senjata- senjata milik kesatuan polisi istimewa ini berhasil direbut kembali dan digunakan sebagai modal awal untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan.¹²³

Keberhasilan pasukan rakyat Yogyakarta merebut kembali senjata polisi di Gayam telah berhasil memicu timbulnya berbagai macam gerakan yang dilakukan oleh rakyat Yogyakarta untuk melakukan perebutan kekuasaan dan perebutan senjata milik pemerintah Jepang di Yogyakarta. Akan tetapi agar keamanan dan ketertiban tetap terjamin, penertiban dan pengamanan berada ada dalam tangan Sultan Hamengku Buwono IX sendiri.

Pada tanggal 26 September 1945 seluruh pegawai kantor dan pabrik- pabrik di Yogyakarta melakukan gerakan untuk mengambil alih kekuasaan yang masih berada di tangan pemerintah Jepang. Gerakan ini berakhir dengan penyerahan kekuasaan dari tangan pemerintah Jepang ke tangan pegawai Indonesia. Kantor dan perusahaan yang berhasil dikuasai kembali di antaranya adalah: Pusat Nanyo Kohatsu Yogyakarta dan cabang- cabangnya, Jawatan Kehutanan, pabrik gula Tanjung Tirta, Padokan, Beran, Cebongan, Gondanglipuro, Plered, Gesikan, Rewulu, Medari dan Pundong .¹²⁴

Gerakan- gerakan masa yang dilakukan oleh rakyat Yogyakarta ini berlangsung turut menurut karena rakyat menyadari bahwa kekuatan Jepang semakin

¹²³ P.J.Suwarno,1994: *Yogyakarta di Awal Kemerdekaan (Pertempuran Kotabaru Prolog dan Epilognya)*, Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, hlm.51.

¹²⁴ Tashadi,dkk, *op.cit*, hlm.83.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melemah. Semakin melemahnya kekuatan pemerintah Jepang memberikan peluang yang besar bagi rakyat Yogyakarta untuk mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Jepang.

Pada tanggal 27 September 1945 KNID (Komite Nasional Indonesia dan Daerah) Yogyakarta mengeluarkan pengumuman kepada seluruh rakyat Yogyakarta bahwa pada tanggal 26 September 1945 kekuasaan Pemerintah Daerah Yogyakarta seluruhnya telah berada di tangan bangsa Indonesia dan kekuasaan pemerintah daerah berada di tangan Sultan Hamengku Buwono IX. Selain itu pada tanggal 27 September 1945 kawula kasultanan yang tergabung dalam Pemuda Kita Kasultanan (Pekik) juga mencetuskan suatu pernyataan bahwa mereka akan setia kepada Sultan, anti imperialisme dan akan membantu menjaga dan mempertahankan kemerdekaan.

Perebutan senjata kembali terjadi pada tanggal 7 Oktober 1945. Pelucutan senjata dilakukan di tangsi *Mase Butai* Kotabaru (gudang senjata dan markas tentara Jepang). Sebelum perebutan senjata dilaksanakan, beberapa kelompok pemuda Yogyakarta seperti: Angkatan Muda Pathook yang dipimpin oleh Kusumo Sunjoyo, Pemuda Jagalan Paku Alaman yang dipimpin oleh Faridan, Pemuda Jetis yang dipimpin oleh Parmadi Joy dan Pemuda Gowongan yang dipimpin oleh Wagiyono telah terlebih dahulu melucuti senjata tentara militer Jepang.

Selain melucuti senjata- senjata tentara militer Jepang, kelompok- kelompok pemuda juga menangkap tokoh- tokoh golongan tua Indonesia yang *kooperatif* dengan pemerintah Belanda. Hal ini dikarenakan setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan , dalam perkembangannya menimbulkan kelompok- kelompok yang pro

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan kontra. Ada beberapa pihak yang memberikan dukungan (sebagian besar rakyat Indonesia) terhadap proklamasi kemerdekaan dan ada beberapa pihak yang meragukan proklamasi kemerdekaan karena merasa lebih percaya kepada pemerintah Belanda. Kelompok yang kontra terhadap proklamasi kemerdekaan muncul dari golongan tua.

Kelompok yang kontra terhadap proklamasi kemerdekaan berusaha membentuk Panitia yang diketuai oleh K.R.T.Notonegoro untuk menerima dan mengurus tawanan Belanda dan tenaga- tenaga *Romusha* yang dikembalikan ke desanya masing- masing. Akan tetapi dalam perkembangannya panitia ini memeberikan perlakuan khusus terhadap tawanan Belanda. Tawanan Belanda mendapatkan perlakuan yang lebih baik jika dibandingkan dengan tenaga- tenaga *Romusha*.

Melihat adanya perlakuan khusus terhadap tawanan Belanda tersebut, kelompok- kelompok pemuda Yogyakarta merasa curiga dan berunding dengan Sultan. Setelah berunding dengan Sultan dan KNID mereka sepakat untuk menangkap beberapa orang yang dicurigai, di antaranya Salamun (Salamun pernah menerima uang Rp 20.000,- dari Van Der Plas menjelang kedatangan Jepang); K.R.T.Notonegoro (mantan pembantu utama *Pepatih Dalem*); Dr.Abdulkadir; Sujono Tirtokusumo; R.M.Purbosumitro; R.M.Wisnutoyo dan Sayid Edrus.¹²⁵

Gerakan kelompok pemuda Yogyakarta mencapai klimaksnya ketika perundingan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1945 yakni antara Mohamad

¹²⁵ P.J.Suwarno, *op.cit*, hlm.64.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Saleh (Ketua KNID), Soedarsono, Sundjojo dan Bardosono (perwakilan dari BKR) dengan pihak Jepang yang diwakili oleh Mayor Otzuka, Ken Pei Taico Sasaki, Kapten Ito dan Kianbuco yang membahas mengenai penyerhan senjata gagal Perundingan ini diadakan di rumah Mayor Otzuka (sekarang berada disebelah barat SMAN III).

Dalam perundingan ini Soedarsono meminta agar Mayor Otzuka menyerahkan senjata Jepang kepada pemerintah Indonesia. Pada saat perundingan ini sedang berlangsung, ribuan rakyat Yogyakarta yang dikoordinir oleh KNID, BKR dan Polisi bergerak menuju Kotabaru. Sesampainya di Kotabaru, rombongan massa ini tidak langsung menyerang gudang milik tentara Jepang, akan tetapi mereka masih menunggu hasil perundingan.

Sebelum perundingan selesai, kelompok- kelompok pemuda seperti kelompok pemuda Pathook, Jagalan, Jetis dan Gowongan mengadakan perundingan dan mereka sepakat akan menyerbu *Mase Butai* Kotabaru jika perundingan gagal. Sebelum rencana penyerbuan ini dilaksanakan, kelompok pemuda telah mengadakan pembagian tugas. Sunjoyo dari Pathook mendapat tugas untuk merencanakan tehnik penyerbuan, Faridan dari Jagalan mendapat tugas untuk mengatur penyerbuan, Parmadi Joy dari kelompok Jetis mendapat tugas untuk mengadakan hubungan dengan atasan dan persenjataan, Wagiyono dari kelompok Gowongan mendapat tugas untuk mempersiapkan pemuda.

Selain mengadakan pembagian tugas, kelompok- kelompok pemuda tersebut juga mempersiapkan pangreh praja dengan dibantu oleh BKR. Sore harinya sebelum

perundingan dilaksanakan, Umar Slamet (ketua BKR) menemui Mangkuhadiningrat dan memberitahukan bahwa pada malam harinya pada pukul 24.00 akan diadakan perundingan dengan pihak Jepang dan jika perundingan gagal akan diberi tanda dengan suara letusan pistol sebanyak tiga kali dan meminta agar Mangkuhadiningrat segera mempersiapkan rakyat sebanyak mungkin untuk melakukan penyerbuan.

Setelah mendapatkan perintah dari Umar Slamet, Mangkuhadiningrat segera bertindak dan mengumpulkan pemuda- pemuda yang tinggal di sekitarnya dan menghubungi pabrik paku di Jalan Klitren Kidul dan meminta agar menyiapkan truk untuk mengangkut para pemuda di sekitar Umbulharjo, Danurejan dan Kotagede.¹²⁶

Berita akan diadakannya penyerbuan terhadap *Mase Butai* Kotabaru jika perundingan gagal dilaksanakan dengan mudah menyebar dari mulut ke mulut. Sehingga sebagian besar pemuda di seluruh penjuru kota Yogyakarta mempersiapkan diri untuk ikut serta melakukan serangan. Pemuda- pemuda di daerah Sentolo, Semarang dan Godean berbondong- bondong menuju Kotabaru. Ketika sampai di Pingit, mereka ikut melucuti orang- orang Jepang yang berkeliaran di jalan- jalan. Rombongan pemuda dari Godean ini diangkut dengan truk milik Polisi Istimewa (PI) dan diturunkan di jalan Gondokusuman(Jalan Jenderal Sudirman).

Setelah mereka mengetahui bahwa pihak Jepang tetap bersikukuh dan tidak mau menyerahkan senjata kepada pemerintah Indonesia, pertempuran tidak dapat dihindarkan lagi. Rombongan massa yang telah berkumpul dengan membawa berbagai macam senjata menyerang gudang tentara Jepang dan berakhir dengan

¹²⁶ *Ibid*, hlm.67.

kekalahan dari pihak Jepang. Beratus- ratus tentara Jepang ditawan dan dimasukkan ke penjara Wiragunan. Semua senjata milik tentara Jepang berhasil dikuasai oleh pemuda Yogyakarta. Berakhirnya pelucutan senjata ini ditandai dengan berkibarnya bendera putih diatas markas tentara Jepang.¹²⁷ Massa berhasil merampas berbagai macam jenis senjata dalam jumlah yang cukup besar dan senjata tersebut akan digunakan sebagai modal untuk menghadapi Sekutu dan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*).

Peristiwa perebutan senjata di tangsi *Mase Butai* Kota Baru telah mengorbankan 21 pemuda Republik Indonesia dan 32 orang luka- luka. Untuk mengenang jasa- jasa para pejuang tersebut, nama- nama pahlawan yang gugur itu dipakai untuk menamakan jalan- jalan di kawasan Kotabaru, misalnya jalan Abu Bakar Ali, Ahmad Ghozali,dll.

2. Yogyakarta Ibukota RI

Sesaat setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, situasi di ibukota Republik Indonesia, Jakarta masih diliputi ketegangan. Pada awal kemerdekaan keadaan Jakarta masih labil karena masih terdapat unsur- unsur yang saling bertentangan. Di satu pihak masih ada pasukan Jepang yang memegang status quo dan di pihak lain adalah Sekutu.

¹²⁷ Bendera putih mempunyai makna “ menyerah ‘. Jika dalam suatu peperangan salah satu pihak menyerah maka pihak tersebut akan mengibarkan bendera putih. Gerakan rakyat Yogyakarta dalam melaksanakan perebutan kekuasaan dan perebutan senjata dari tangan pemerintah Jepang ini tidak terlepas campur tangan Sultan Hamengku Buwono IX. Senjata- senjata yang telah berhasil diperoleh rakyat dijadikan sebagai odal untuk mengadakan perlawanan kepada penjajah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tentara sekutu masuk ke Jakarta pada tanggal 29 September 1945 dengan diboncengi oleh NICA. Kedatangan tentara sekutu ini dipimpin oleh Angkatan Perang Inggris. Kedatangan tentara sekutu semakin membuat genting situasi Jakarta. Sedangkan tentara Belanda (NICA) bersikukuh ingin mengembalikan Indonesia menjadi Hindia Belanda. Tentara Belanda melancarkan berbagai macam teror dan ancaman pembunuhan terhadap para pejabat republik yang masih baru terjadi dimana- mana. Para pemimpin RI selalu berada dibawah ancaman tentara Belanda. Salah satu pejabat yang mendapat ancaman akan dibunuh adalah Sutan Syahrir. Akan tetapi Sutan Syahrir berhasil lolos dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh serdadu Belanda.¹²⁸

Sultan Hamengku Buwono IX juga mengetahui keadaan Jakarta yang genting karena terror terjadi dimana- mana. Oleh sebab itu pada tanggal 2 Januari 1946 Sultan mengirimkan kurir ke Jakarta dan menyarankan agar pemerintah pusat dipindahkan ke Yogyakarta karena keadaan Yogyakarta lebih aman jika dibandingkan dengan keadaan Jakarta.

Pemerintah pusat menyambut dengan baik saran dari Sultan Hamengku Buwono IX dan pada tanggal 3 Januari 1946 mengadakan sidang kabinet dan memutuskan untuk memindahkan kedudukan pemerintah pusat RI dari Jakarta ke Yogyakarta. Keesokan harinya sederetan gerbong kereta kosong dari stasiun Manggarai bergerak perlahan- lahan menuju jalan Pegangsaan Timur No.56 Jakarta, tepat berada dibelakang rumah presiden Soekarno.

¹²⁸ Suhartono, dkk, 2002: *Yogyakarta Ibukota RI*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.60.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Secara sembunyi- sembunyi presiden Soekarno dan wakil presiden Moh. Hatta beserta keluarganya dan para pemimpin- pemimpin RI menuju belakang rumah presiden Soekarno dan perlahan- lahan menaiki gerbong kereta. Setelah menempuh perjalanan selama semalam, pada tanggal 4 Januari 1946 presiden beserta rombongan sampai di stasiun tugu, Yogyakarta. Sultan Hamengku Buwono IX beserta segenap lapisan masyarakat menyambut dengan hangat kedatangan para pemimpin RI.¹²⁹. Perpindahan ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta ini dilakukan secara diam- diam tanpa sepengetahuan pihak Belanda.

Sehingga sejak saat itulah Yogyakarta menjadi pusat perjuangan politik dan militer bangsa Indonesia. Adanya perubahan ibukota ini membawa pengaruh yang cukup besar terhadap keadaan Yogyakarta. Dalam waktu yang cepat, kota Yogyakarta dibanjiri oleh penduduk yang berasal dari berbagai daerah. Pada awalnya kota Yogyakarta hanya mempunyai 170.000 penduduk dan tiba- tiba mengalami peningkatan sehingga menjadi 600.000 jiwa.¹³⁰

Adanya pertambahan jumlah penduduk di Yogyakarta menimbulkan sejumlah persoalan, di antaranya adalah masalah perumahan. Melihat kenyataan yang ada, Sultan mengambil inisiatif untuk memberikan semua fasilitas untuk menunjang roda pemerintahan Republik Indonesia. Sultan menyiapkan gedung- gedung milik pemerintahan kasultanan dan bagian- bagian dalam *keraton* untuk dijadikan sebagai kantor pemerintahan RI.

¹²⁹ Atmakusumah, *op.cit*, hlm.69.

¹³⁰ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977: *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Depdikbud, Yogyakarta, hlm.319.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kondisi pemerintahan RI pada saat itu masih sangat memprihatinkan karena belum mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung jalannya pemerintahan. Akan tetapi Sultan Hamengku Buwono IX tidak tinggal diam melihat keadaan tersebut, ia memberikan sesuatu yang ia punya demi kelancaran pemerintahan RI.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan Sultan Hamengku Buwono IX rela memberikan Yogyakarta sebagai ibukota sementara RI, di antaranya: 1) Adanya rasa malu (*Minderwaardigheid-complex*). Hal ini dikarenakan sebagian besar para cendekiawan dan tokoh politik menganggap raja-raja seperti Sunan, Sultan, Mangku Ngoro dan Paku Alaman merupakan *antek* dari penjajah (Belanda dan Jepang). Untuk menghapus pandangan para cendekiawan dan tokoh politik tersebut maka Sultan rela memberikan segala sesuatu yang ia punya untuk pemerintah RI; 2) Teladan dari nenek moyangnya seperti Sultan Agung, Sultan Hamengku Buwono I, Sultan Hamengku Buwono II Pangeran Diponegoro yang dengan gagah berani terus menerus melawan Belanda. Sultan Hamengku Buwono IX sangat terkesan melihat keberanian sikap Sultan Agung yang mengusir Belanda dari Batavia pada abad XVII dari berbagai macam literatur yang dibacanya dan cerita turun temurun dalam keluarganya; 3) Berdasarkan pengalaman pribadinya sewaktu ia tinggal bersama keluarga Belanda dan menempuh pendidikan dasarnya di sekolah *Kidul Ngloji*. Pada saat Sultan Hamengku Buwono IX tinggal bersama keluarga Belanda, ia menyaksikan bagaimana pembantu Jawa diperlakukan seperti budak oleh keluarga Belanda yang menjadi majikannya. Selain itu ketika Sultan Hamengku Buwono IX menempuh pendidikan dasarnya di Sekolah Kidul Ngloji dia melihat adanya

diskriminasi antara anak orang pribumi dengan anak orang asing. Pengalaman pribadi Sultan inilah yang telah menumbuhkan semangat nasionalismenya.¹³¹

3. Agresi Belanda

Setelah bangsa Indonesia berhasil mendapatkan kemerdekaannya, bangsa Belanda tetap berusaha untuk mendapatkannya kembali dengan tujuan agar Hindia Belanda selalu ada. Sadar akan adanya ancaman dari pihak Belanda ini maka bangsa Indonesia berusaha memperkuat diri untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih.

Salah satu usaha untuk memperkuat pertahanan bangsa Indonesia adalah dengan membentuk laskar rakyat atau badan perjuangan yang akan menghimpun seluruh kekuatan rakyat untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan diberbagai daerah. Laskar rakyat yang telah dibentuk dengan tujuan untuk menanggulangi serangan musuh. Pembentukan laskar rakyat ini dilaksanakan diberbagai daerah, tak terkecuali di Yogyakarta.

Laskar rakyat di Yogyakarta pada awalnya dikenal dengan nama BKR (Badan Keamanan Rakyat). BKR terbentuk dari BPKKP (Badan Penolong Keluarga Korban Perang). Di Yogyakarta BKR berhasil dibentuk tanpa didominasi oleh suatu golongan, melainkan merupakan gabungan dari semua laskar rakyat. BKR Yogyakarta berada dibawah pimpinan Mayor Jenderal Sudarsono. Akan tetapi pertumbuhan BKR tidak berlangsung lama karena digantikan oleh TKR (Tentara

¹³¹ P.J.Suwarno,*op.cit*, hlm.87.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keamanan Rakyat). TKR merupakan suatu tentara kebangsaan yang berada di bawah pemerintah pusat dan mempunyai tugas untuk menjaga keamanan RI. TKR (Tentara Keamanan Rakyat) berada di bawah pimpinan Urip Sumoharjo. Kota Yogyakarta dipilih sebagai Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat (MTTKR).¹³²

Sebenarnya pemerintah RI sudah mengadakan berbagai macam diplomasi dengan pemerintah Belanda maupun Sekutu (Inggris) untuk menyelesaikan masalah politik yang tidak ada henti- hentinya. Akan tetapi pertempuran antara pihak RI dengan pihak Sekutu berakhir dengan dicapainya persetujuan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober 1946. Ternyata adanya persetujuan gencatan senjata ini justru dimanfaatkan oleh pihak Sekutu. Secara perlahan- lahan tapi pasti, pemerintah Inggris bergerak dan berhasil menduduki daerah- daerah penting di Jawa maupun Sumatera. Daerah- daerah tersebut di antaranya adalah: Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Padang. Selanjutnya daerah- daerah yang berhasil diduduki ini diserahkan kepada pihak Belanda.¹³³

Sedangkan penyelesaian secara diplomatis juga pernah dilaksanakan antara pemerintah Belanda dengan pemerintah RI melalui berbagai macam perundingan, di antaranya adalah: persetujuan Linggarjati, persetujuan Renville dan persetujuan KMB. Akan tetapi pada umumnya ketiga persetujuan ini tidak berhasil mengatasi konflik politik antara pemerintah Belanda dengan pemerintah RI. Pemerintah Belanda tetap bersikukuh untuk menanamkan kekuasaannya di wilayah Republik Indonesia.

¹³² G. Moedjanto, 1988: *Indonesia Abad Ke-20 jilid I*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 121. Tentang uraian lengkap mengenai perubahan nama dari BKR- TKR lihat tulisan Djamal Marsudi, *op.cit*, hlm.61- 65.

¹³³ *Ibid*, hlm.181.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sedangkan untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia, pemerintah Inggris berusaha membantu menyelesaikan konflik politik antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Pemerintah Inggris mengirimkan diplomatnya, Lord Killearn ke Indonesia untuk dijadikan sebagai perantara perdamaian antara pihak Indonesia dengan Belanda. Kedatangan Lord Killearn ke Indonesia berhasil membuahkan Persetujuan Linggarjati. Persetujuan Linggarjati ini dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946 di kota Linggarjati (daerah Cirebon).

Persetujuan Linggarjati ini memuat 17 pasal ketentuan yang isi pokoknya adalah: 1) Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan RI secara *de facto* yang meliputi daerah Jawa, Sumatera dan Madura; 2) Antara pemerintah Belanda dan pemerintah RI akan bekerjasama membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama RIS (Republik Indonesia Serikat) yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia; 3) Antara RIS dan Belanda akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda.¹³⁴ Meskipun persetujuan Linggarjati ini telah disetujui oleh kedua belah pihak, isi pokoknya tidak pernah terlaksana. Sehingga hal inilah yang pada akhirnya memicu timbulnya aksi militer dari pihak Belanda. Akan tetapi pada dasarnya tujuan dari Belanda melakukan aksi militer ini adalah untuk menghancurkan RI baik dalam bidang politik, ekonomi maupun militer.

Aksi militer dari pihak Belanda ini dikenal dengan nama Agresi Belanda I. Pada tanggal 21 Juli 1947 sekitar pukul 07.00, empat buah pesawat Belanda mengelilingi kota Yogyakarta selama 15 menit dan menjatuhkan bom di Maguwo (sekarang

¹³⁴ Ginanjar Kartasasmita,dkk, *op.cit*, hlm.119.

lapangan terbang Adisucipto. Sore harinya sekitar pukul 15.00 Belanda kembali menjatuhkan bom di lapangan terbang Maguwo.

Pihak Republik Indonesia pada saat itu tidak menyangka bahwa pihak Belanda akan mengadakan serangan secara membabi buta di kota Yogyakarta. Sehingga hal ini mengakibatkan pemerintah RI tidak dapat segera melakukan serangan balasan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta pasukan- pasukan bersenjata lainnya yang dibantu oleh rakyat hanya dapat menahan serangan dari pihak Belanda dengan perang gerilya. Untuk menggalang semangat persatuan dan menguatkan rakyat, beberapa pemimpin RI menyerukan pidato- pidato di hadapan pers. Pemimpin- pemimpin tersebut diantaranya adalah Presiden Soekarno, Jenderal Soedirman dan Perdana Menteri Sutan Syahrir.¹³⁵

Untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas keamanan di daerah Yogyakarta, Presiden Soekarno mengangkat Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Gubernur Militer dengan pangkat Letnan Jenderal untuk memperkuat pertahanan di Yogyakarta.

Pada tanggal 21 Juli 1947 itu juga, Sutan Syahrir secara diam- diam meninggalkan Yogyakarta dengan menaiki pesawat terbang Patnaik berangkat menuju luar negeri dengan membawa pesan dari pemerintah RI. Negara- negara yang

¹³⁵ Djamal Marsudi, *op.cit*, hlm.119.

akan dikunjungi oleh Sutan Syahrir di antaranya adalah Amerika Serikat, Inggris dan India.¹³⁶

Setelah sampai di lapangan terbang Singapura, Sutan Syahrir disambut oleh beberapa wartawan luar negeri. Dalam sebuah wawancara, Sutan Syahrir membuka kelicikan pemerintah Belanda selama berunding dengan pemerintah Indonesia. Sejak saat itulah maka dunia internasional mengetahui keadaan yang sebenarnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah Belanda selalu menutup- nutupi keadaan di Indonesia.

Setelah dunia internasional mengetahui keadaan di Indonesia, timbul reaksi yang bermacam- macam dari beberapa negara, di antaranya adalah India dan Australia. Pada tanggal 30 Juli 1947 pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia dengan Belanda segera dimasukkan dalam daftar pembicaraan Dewan Keamanan PBB.

Pada tanggal 31 Juli 1947 permintaan dari India dan Australia ini diterima oleh Dewan Keamanan PBB. Sebagai tindak lanjut setelah diterimanya laporan ini maka pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dimulai pada tanggal 4 Agustus 1947. Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dibentuk komisi konsuler yang anggota- anggotanya terdiri dari para konsul jenderal yang ada di Indonesia. Komisi konsuler ini diketuai oleh konsul Jenderal Amerika Dr.Walter

¹³⁶ A.H.Nasution,1979: *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 5*, Penerbit Angkasa, Bandung, hlm .238.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Foate dan beranggotakan konsul Jenderal Cina, konsul Jenderal Belgia, konsul Jenderal Perancis, konsul Jenderal Inggris dan konsul Jenderal Australia.¹³⁷ Komisi konsuler ini diperkuat oleh Amerika Serikat dan Perancis.

Dalam perkembangannya, komisi konsuler ini menghasilkan sebuah Komisi Jasa- jasa Baik (*Committee of Good Offices*) untuk mengawasi penghentian permusuhan. Pihak Indonesia dan pihak Belanda disuruh untuk memilih satu negara yang masing- masing dipercaya untuk mengawasi penghentian tembak menembak. Pihak Indonesia memilih Australia dan pihak Belanda memilih Belgia kemudian kedua negara itu memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. Komisi ini dikenal dengan KTN (Komisi Tiga Negara). Akan tetapi dalam perkembangannya, komisi yang telah terbentuk ini tidak mampu menyelesaikan masalah antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia dan masalah diantara keduanya semakin menjadi- jadi.

Gagalnya berbagai macam usaha Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda memicu Belanda melakukan aksi militer untuk kedua kalinya. Aksi militer ini dikenal dengan Agresi Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948.

Pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 06.00 WIB ketika semua unit kelaskaran, dapur umum dan unit palang merah berkumpul untuk mempersiapkan latihan militer. Tiba- tiba terdengar terdengar rentetan letusan senjata dan pesawat meraung- raung di atas Yogyakarta. Rakyat Yogyakarta menganggap bahwa suara

¹³⁷ Tashadi,dkk, *op.cit*, hlm.121.

letusan senjata dan pesawat- pesawat tersebut adalah bagian dari latihan semua unit laskar rakyat.

Akan tetapi lama kelamaan mereka menyadari bahwa suara letusan senjata dan pesawat- pesawat itu adalah serangan dari pihak Belanda. Sejumlah pesawat bertanda asing mulai menyerang lapangan terbang Maguwo (Adisucipto).¹³⁸ Pesawat- pesawat Belanda (Mitchel B.25) menjatuhkan bom di lapangan terbang Maguwo. Selain itu pesawat- pesawat tersebut juga menerjunkan satu batalyon pasukan Baret Hijau di bawah pimpinan Kolonel Van Langen.

Pasukan Baret Hijau yang diterjunkan mendapat tugas untuk merebut lapangan terbang Maguwo. Beberapa pesawat Belanda yang lainnya seperti pesawat Spitfire, Mustang, Lookhead melayang- layang diatas kota Yogyakarta untuk menembaki dan menjatuhkan bom di berbagai penjuru kota Yogyakarta.¹³⁹

Ketidaksiapan laskar rakyat meyebabkan keadaan menjadi tidak seimbang. Di satu pihak Belanda dengan persenjataan yang cukup lengkap dan di lain pihak penjagaan keamanan Maguwo dengan persenjataan minim dan kondisi yang tidak siap. Sehingga hal ini mengakibatkan pasukan Belanda dengan cepat menguasai lapangan terbang Maguwo.

Setelah Belanda berhasil menguasai lapangan terbang Maguwo, tentara Belanda bergerak menuju pusat kota Yogyakarta dan berusaha menguasainya. Karena keadaan pada waktu itu sangat tidak seimbang, maka pasukan Belanda dapat dengan mudah

¹³⁸ Pesawat asing ini dikenal dengan sebutan cocor merah dan serangan pasukan Belanda ini dikenal dengan Agresi Militer Belanda II.

¹³⁹ Djamal Marsudi, dkk, *op.cit*, hlm.130.

menguasai kota Yogyakarta. Adanya serangan dari pasukan Belanda ini membuat rakyat Yogyakarta ketakutan dan berduyun- duyun untuk mengungsi ke dalam *keraton* untuk memohon perlindungan dari Sultan Hamengku Buwono IX.¹⁴⁰

Ketika Belanda menyerang dan menduduki kota Yogyakarta, kondisi kesehatan Sultan Hamengku Buwono IX sedang terganggu. Akan tetapi karena Republik dalam keadaan terancam maka Sultan segera bertindak. Sultan segera memanggil K.R.T.Honggowongso agar segera ke Gunung Kidul untuk mempersiapkan segala sesuatu karena jika keadaan didalam kota Yogyakarta sudah tidak aman maka pusat pemerintahan akan dipindahkan disana.

Selain menyuruh K.R.T.Honggowongso untuk pergi ke Gunung Kidul, Sultan juga menghubungi beberapa pamong praja kota Yogyakarta melalui pesawat telepon dan menginstruksikan beberapa hal, diantaranya: 1) Kedua Sri Paduka Kepala dan Wakil Kepala Daerah beserta staf tetap berada didalam kota Yogyakarta; 2) Pamong Praja harus mempertahankan kedudukannya agar jangan sampai diperalat oleh pihak Belanda; 3) Pamong Praja termasuk Pamong Desa harus tetap berada didalam wilayahnya masing- masing untuk memimpin dan melindungi rakyatnya; 4) Komunikasi pemimpin daerah harus dilakukan secara sembunyi- sembunyi dengan memakai kode tertentu agar tidak diketahui oleh pihak Belanda; 5) Komunikasi antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lainnya harus memakai bantuan kurir dan tidak diperbolehkan memakai surat agar tidak diketahui oleh Belanda; 6) Pamong Praja akan dijadikan sebagai penghubung utama antara Sultan dengan semua

¹⁴⁰ Nurdyanto, *op.cit*, hlm. 42.

instansi sipil, militer maupun kementerian- kementerian. Selain itu Sultan juga memberitahukan bahwa untuk sementara kantor Kepatihan akan ditutup sampai ada pemberitahuan dari Sultan.¹⁴¹

Instruksi – instruksi dari Sultan ini segera dilaksanakan oleh pamong praja karena pamong praja menaruh kepercayaan yang sangat besar kepada Sultan Hamengku Buwono IX, bahkan seluruh rakyat Yogyakarta. Mereka percaya bahwa setiap perkataan Sultan adalah perintah yang harus diikuti demi keselamatan mereka.

Pada saat terjadinya serangan oleh pasukan Belanda ini, Presiden Soekarno dengan beberapa orang menteri seperti Ir. Djuanda, Mr. Ali Sastroamidjojo dan Kusnan berada di dalam Gedung Negara. Sedangkan Moh. Hatta dalam perjalanan menuju Kaliurang. Setelah mengetahui terjadinya aksi penyerangan oleh pasukan Belanda, Sultan Hamengku Buwono IX segera menemui Presiden Soekarno dan menyarankan agar segera diadakan sidang darurat. Karena Moh. Hatta sedang tidak berada di tempat, maka Presiden Soekarno menyuruh Sultan Hamengku Buwono IX untuk menjemputnya di Kaliurang.

Dalam perjalanan menuju Kaliurang, Sultan Hamengku Buwono IX berpapasan dengan mobil yang membawa Moh. Hatta menuju kembali ke dalam kota. Setelah mengetahui hal ini Sultan segera menuju kembali ke Gedung Negara. Dalam perjalanan menuju Gedung Negara, pesawat Belanda semakin ganas menjatuhkan granat, sehingga Sultan terpaksa melalui jalan- jalan desa. Sesampainya di Gedung

¹⁴¹ Tentang instruksi Sultan Hamengku Buwono IX terhadap pamong praja lihat *Ibid*, hlm 43 dan Kementerian Penerangan, 1953: *Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, hlm.95.

Negara ternyata sidang telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan dua keputusan, yakni: Pemerintah RI tetap didalam kota Yogyakarta dan Mr. Syarifudin Prawiranegara diberi mandat untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera.¹⁴² Setelah mengetahui hasil sidang darurat, Sultan segera kembali ke dalam *keraton* untuk menenangkan rakyatnya yang sedang mengungsi.

Setelah Sultan Hamengku Buwono IX berhasil menenangkan hati rakyatnya, sore harinya sekitar pukul 14.00 WIB, dengan berjalan kaki Sultan berangkat ke Gedung Negara melalui Alun- alun Utara. Akan tetapi pada saat Sultan sampai di Alun- alun Utara, ia bertemu dengan pemuda- pemuda KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, merupakan salah satu organisasi pemuda yang berasal dari Sulawesi) yang memberitahunya kalau pasukan Belanda telah sampai di kantor pos menuju Gedung Negara, mengetahui hal ini, Sultan segera bergegas kembali ke dalam *keraton*.

Pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB, Kolonel Van Langen (Komandan pasukan Belanda yang berfungsi sebagai penguasa militer kota Yogyakarta) bersama dengan Westerhof (pejabat Belanda) menemui Sultan Hamengku Buwono IX didalam *keraton* dan memberitahukan bahwa Sultan hanya dapat bergerak leluasa didalam *keraton* atau dengan kata lain Sultan dijadikan sebagai tahanan rumah, hal serupa juga dialami oleh Paku Alam VIII.

¹⁴² Atmakusumah, *op.cit*, hlm 71.

Karena merasa senasib sebagai tahanan rumah, Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII selalu bekerjasama untuk menyusun rencana. Setelah pasukan Belanda memberitahukan bahwa daerah keraton, Puro Paku Alaman dan Kepatihan Danurejo dijadikan sebagai “daerah imum” (daerah yang tidak akan diganggu-ganggu oleh Belanda), Sultan menganggap bahwa ini merupakan kesempatan emas untuk menyusun rencana.

Dari dalam *keraton*, Sultan mulai menjalankan siasatnya. Siasat pertama yang dilakukan oleh Sultan adalah menyebarkan berita bahwa ia meletakkan jabatan sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyebaran berita ini dilakukan dari mulut ke mulut sehingga dengan cepat menyebar. Tujuan dari Sultan menyebarkan berita mengenai pengunduran dirinya ini adalah agar tanggung jawab mengenai masalah keamanan dipegang oleh tentara Belanda. Dengan cara ini juga maka Sultan tidak akan diperalat atau disuruh untuk melakukan rencana- rencana pasukan Belanda.¹⁴³

Setelah pasukan Belanda berhasil menguasai seluruh kota Yogyakarta, Presiden, Wakil Presiden dan beberapa pejabat tinggi lainnya (Haji Agus Salim, Sutan Syahrir, Mr. Roem, Mr. Ali Sastroamidjojo dan Mr. Asaat) ditawan oleh Belanda dan dikirim ke tempat pengasingan. Presiden Soekarno, Sutan Syahrir dan haji Agus Salim dikirim ke Brastagi dan wakil Presiden Moh. Hatta, Mr. Roem, Mr.

¹⁴³ *Ibid*, hlm 74.

Ali Sastroamidjojo dan Mr. Asaat dikirim ke Bangka. Akan tetapi pada akhirnya mereka semua dijadikan satu di Bangka.¹⁴⁴

Sedangkan para pemimpin pergerakan nasional yang berhasil melarikan diri dan selalu melakukan “gerakan di bawah tanah” untuk melawan pasukan Belanda. Salah satu pemimpin pergerakan tersebut adalah Jenderal Sudirman. Dengan memakai taktik perang gerilya, Jenderal Sudirman mengadakan perlawanan terhadap pasukan Belanda.

Setelah Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan pemimpin-pemimpin RI lainnya dibuang ketempat pengasingan, pemerintah Belanda menganggap bahwa Republik Indonesia yang baru saja terbentuk telah musnah dan merasa telah berhasil mengembalikan kembali Hindia Belanda. Selain itu Belanda juga menyebarkan berita mengenai keberhasilannya menundukkan pemerintah RI. Akan tetapi berita kekejaman Belanda menyerang RI juga langsung menyebar ke luar negeri melalui radio gerilya yang mampu memancarkan berita dari Jawa dikirim ke Sumatera, dari Sumatera dilanjutkan ke New Delhi selanjutnya terus menyebar sampai ke PBB.

Pada tanggal 20 Desember 1948, sehari setelah PBB mendengar berita terjadinya kembali agresi yang dilakukan oleh Belanda, DK Keamanan PBB langsung mengadakan sidang darurat. Pada tanggal 22 Desember 1948 DK Keamanan PBB mulai mengadakan sidang untuk membahas penyelesaian masalah antara pemerintah RI dengan Belanda. Setelah melakukan sidang beberapa kali, akhirnya DK Keamanan PBB sepakat untuk mengeluarkan Resolusi Dewan

¹⁴⁴ Ginanjar Kartasasmita, dkk, *op.cit*, hlm.193.

Keamanan tertanggal 28 Januari 1949 yang isi pokoknya mendesak agar Belanda segera menghentikan konflik politik dengan pemerintah RI. Akan tetapi pemerintah Belanda tidak menggubris Resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 tersebut karena menganggap Resolusi tersebut lebih menguntungkan pemerintah RI.¹⁴⁵ Pemerintah Belanda tetap melanjutkan tujuannya untuk menghancurkan RI dengan menguasai kota Yogyakarta.

Kondisi Yogyakarta setelah dikuasai oleh pasukan Belanda penuh dengan kekacauan berlangsung tanpa ada perubahan. Rakyat hidup dalam penderitaan karena berada di bawah tekanan pemerintah Belanda. Sultan Hamengku Buwono IX menyadari bahwa keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian Sultan menyusun suatu rencana untuk mengembalikan semangat juang rakyat dan memberitahukan kepada dunia Internasional bahwa pemerintah Republik Indonesia masih ada.¹⁴⁶

Setelah berpikir keras, akhirnya Sultan Hamengku Buwono IX mendapatkan ide untuk melakukan serangan balasan yang dilakukan pada siang hari terhadap pasukan Belanda. Kemudian Sultan mengirim surat kepada Jenderal Sudirman untuk memberitahukan rencananya untuk mengadakan serangan terhadap pasukan Belanda. Ternyata rencana dari Sultan ini mendapat dukungan dari Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman menyarankan agar Sultan membicarakan rencana serangan dengan Letnan Kolonel Soeharto.

¹⁴⁵ G. Moedjanto, 1988: *Indonesia Abad Ke-20 jilid 2*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.46.

¹⁴⁶ Nurdyanto, *op.cit*, hlm. 45.

Pada tanggal 13 Februari 1949 Sultan Hamengku Buwono IX mengadakan pertemuan dengan Letnan Kolonel Soeharto untuk mempersiapkan suatu serangan umum. Kontak- kontak selanjutnya dilakukan dengan mempergunakan bantuan para kurir. Setelah melalui berbagai macam pembicaraan, pada awalnya serangan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1948. Akan tetapi karena rencana ini bocor maka rencana serangan akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 yang akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto tepat pada saat sirene berbunyi.

Untuk mempermudah jalannya serangan umum maka dibentuklah sektor-sektor yang mempunyai tugas sendiri- sendiri. Sektor barat dipimpin oleh Mayor Ventje Sumual, Sektor selatan dan timur dipimpin oleh Mayor Sardjono, Sektor utara dipimpin oleh Mayor Kusno dan Sektor kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki.¹⁴⁷

Pada tanggal 1 Maret 1949 pukul 06.00 WIB ketika sirene berbunyi, semua sektor yang telah dibentuk melaksanakan tugasnya masing- masing. Sektor selatan menyerang kedudukan Belanda di Kantor Pos, Gedung Negara, Benteng Vredeburg, Pabrik Anim Wirobrajan, Watson, Kotabaru, Lempuyangan. Kompi Suparno menyerang Barongan, Gesikan, Bantul. Kompi Ali Afandi yang dipimpin oleh Letkol Wasil menyerang Kotagede. Sumarno menyerang Kantor Pos dan Benteng Vredeburg. Kompi Widodo, MB.Musiman dan MB.Kahari serta Tentara Pelajar yang dipimpin oleh Thomas Raharjo menyerang Kotabaru dengan Watson dan berhasil

¹⁴⁷Ginanjart Kartasasmita,dkk, *op.cit*, hlm. 207.

mendapatkan amunisi sebanyak 5 ton. Sudarsono dan Bismo menyerang Alun- alun Utara dan Wirogunan.¹⁴⁸

Sektor barat yang terdiri dari 2 Kompi Andi Matalata, 2 Kompi Palupessy menyerang Malioboro, Hotel Tugu, Hotel Merdeka. Kompi Yatiman mengamankan daerah Lempuyangan sampai daerah Malioboro bagian barat. Sedangkan 2 peleton yang dipimpin oleh Sugiyo dan Jilan menyerang Patuk.

Sektor utara yang berangkat dari Mrican dibantu oleh pasukan A,B,C. Pasukan A yang dipimpin oleh Kadet Sujamadi menyerang kedudukan Belanda di Maguwo. Pasukan B yang di pimpin oleh Mayor Sakri menyerang Hotel Tugu, Hotel Merdeka dan Kewek. Sedangkan pasukan C yang dipimpin oleh Lettu Zidminuri, Suragil dan Letda Sujiman menyerang Pingit, Jetis dan Gondolayu. Kompi TP. Martono and Letda Aliadi menyerang pos Belanda di Beran. MB Sumarjan, Abdul Rahman dan Peleton II Tentara Pelajar yang dipimpin oleh Martono menyerang Beringharjo dan menutup jalan menuju kota Yogyakarta dari arah utara.

Sektor timur menyerang Belanda dari Bantar dengan melalui jembatan Bantar yang dipimpin oleh Nurmunir dan mendapat tugas untuk menghambat bantuan Belanda dari arah barat. Sedangkan Batalyon Suhandoyo dan Sudarno bertugas menghambat bantuan dari arah utara (Salam dan Magelang).¹⁴⁹

Adanya sistem penyerangan dari segala penjuru dan dilakukan pada pagi hari telah berhasil membuat pasukan Belanda kalang kabut. Dalam penyerangan ini rakyat

¹⁴⁸ Tataq Chidmad, 2001: *Pelurusan Sejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm.124.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm.125.

berhasil menduduki kota Yogyakarta selama kurang lebih enam jam. Tanda khas dari pasukan Indonesia yang ikut sereta melakukan serangan umum tersebut adalah kalung *janur kuning*.¹⁵⁰ Akan tetapi setelah Sultan Hamengku Buwono IX mengetahui bahwa bantuan untuk pasukan Belanda telah berangkat dari Magelang, ia segera menyuruh Letnan Kolonel Soeharto untuk segera menarik mundur pasukannya.

Berita dari adanya serangan dari rakyat Yogyakarta ini dengan cepat menyebar. Radio AURI PC2 yang berada di Playen Gunung Kidul menyiarkan berita Serangan Umum 1 Maret ke Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi berita kemudian diteruskan ke India dan akhirnya sampai ke PBB.¹⁵¹ Adanya berita serangan umum ini telah berhasil menghapus propaganda dari pemerintah Belanda yang memberitakan kalau negara RI telah musnah dan membangkitkan kembali semangat perjuangan rakyat Yogyakarta. Sehingga dapat dikatakan bahwa rencana dari Sultan Hamengku Buwono IX telah berhasil.

Setelah berhasil menduduki kota Yogyakarta selama kurang lebih enam jam, kelompok gerilyawan ditarik mundur oleh Letnan Kolonel Soeharto dan segera kembali ke pangkalan mereka masing-masing. Ketika bantuan untuk pasukan

¹⁵⁰ Adanya tanda khas kalung janur kuning dalam Serangan Umum I Maret ini diabadikan dalam film yang berjudul *Janur Kuning*.

¹⁵¹ Nurdyanto, *op.cit*, hlm.46.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Belanda sampai di Yogyakarta, para gerilyawan telah lenyap dan kota Yogyakarta menjadi sepi kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa.¹⁵²

Serangan Umum 1 Maret 1949 telah berhasil mengubah pandangan Dewan Keamanan PBB terhadap Belanda dan menganggap pemerintah Belanda tidak bisa memelihara keamanan di daerah yang telah mereka duduki dan lebih bersimpati kepada Indonesia.

Menyadari bahwa kedudukannya mulai terancam, pemerintah Belanda tidak dapat berbuat apa-apa selain menyetujui Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 yang semula disepelekan. Sebagai tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah antar pemerintah RI dan Belanda, Dewan Keamanan PBB berusaha mempertemukan pihak RI dan pihak Belanda dalam suatu perundingan.

Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan antara Mr. Moh. Roem (wakil dari pemerintah RI) dan Dr. Van- Royen (wakil dari Belanda) yang dipimpin oleh Cockran (anggota komisi PBB untuk masalah Indonesia). Meskipun perundingan antara pihak RI dengan pihak Belanda berjalan alot, pada akhirnya perundingan dapat menghasilkan suatu persetujuan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Persetujuan ini ditanda tangani oleh pihak Indonesia dan pihak Belanda pada tanggal 7 Mei 1949 yang dikenal dengan nama Persetujuan Roem- Royen yang

¹⁵² Sejarah singkat dari jalannya serangan Umum 1 Maret ini dapat dilihat dari surat Sultan Hamengku Buwono IX yang ditulis pada tanggal 26 Maret 1949 dan ditujukan kepada rekannya di Jakarta yang bernama Mr. Sudjono. Kutipan surat tersebut terdapat dalam tulisan Kustiniyati Mochtar dalam *Atmakusumah*, *op.cit*, hlm.84.

isinya: penghentian tembak- menembak, penarikan mundur tentara Belanda dari Yogyakarta dan pemimpin- pemimpin RI dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta.¹⁵³

Dengan adanya persetujuan ini maka Sultan Hamengku Buwono IX segera menyusun rencana untuk pengunduran tentara Belanda dari Yogyakarta. Pada tanggal 16 Mei 1949 Komisi Indonesia Belanda datang ke Yogyakarta untuk mengadakan perundingan di Kepatihan dengan tujuan membicarakan mengenai penarikan mundur tentara Belanda.

Selain itu Sultan Hamengku Buwono IX juga menerima tanggung jawab atas pengembalian Yogyakarta dari tangan Belanda atas mandat yang diberikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Mei 1949. Mandat Presiden Soekarno ini berbunyi sebagai berikut:

“ Kami, Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, memberi tugas kewajiban kepada yang Mulia Hamengku Buwono IX, Menteri Negara dan Koordinator Keamanan, disamping pekerjaan sekarang, untuk menerima kembali kekuasaan sepenuhnya baik sipil maupun militer atas Daerah Istimewa Yogyakarta dari tangan Belanda dan mengatur pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta. Untuk menyelenggarakan pekerjaan itu beliau kami beri kuasa sepenuhnya untuk mempergunakan segala alat pemerintahan yaitu misalnya tentara, polisi negara, pamong praja dan lain- lain pegawai yang sudah berada dan akan datang di Daerah Istimewa Yogyakarta”.¹⁵⁴

Dengan adanya mandat dari Presiden Soekarno ini maka Sultan Hamengku Buwono IX mempunyai tanggung jawab secara penuh terhadap pengembalian Yogyakarta dari pemerintah Belanda. Setelah menerima mandat tersebut, Sultan segera mengambil tindakan. Pada tanggal 18 Juni 1949 Sultan sebagai Menteri

¹⁵³ Sartono Kartodirjo, 1977: *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.70.

¹⁵⁴ Nurdyanto, *op.cit*, hlm.47.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Koordinator Keamanan menyampaikan perintah kepada para gerilyawan agar segera menghentikan tembak menembak dengan pasukan Belanda.

Pada tanggal 29 Juni 1949 secara perlahan-lahan pasukan Belanda meninggalkan Yogyakarta dan para gerilyawan dan pasukan TNI kembali masuk kota Yogyakarta. Untuk memperingati mundurnya pasukan Belanda dan kembalinya para gerilyawan ini maka tanggal 29 Juni ditetapkan sebagai Hari Yogya Kembali. Kuatnya pemeritahan sipil yang berada di tangan Sultan Hamengku Buwono IX menyebabkan penarikan mundur pasukan Belanda dapat berlangsung dengan tertib.¹⁵⁵

Setelah pasukan Belanda meninggalkan kota Yogyakarta, kondisi kota Yogyakarta kembali aman. Rakyat merasa lega karena tidak lagi hidup dalam tekanan pasukan Belanda. Kondisi keamanan kota Yogyakarta yang telah kembali stabil mendorong Presiden, Wakil Presiden beserta staf untuk segera kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden, Wakil Presiden beserta pemimpin-pemimpin Republik yang diasingkan di Bangka berangkat dari Pangkalpinang menuju Yogyakarta.

Kedatangan para pemimpin Republik ini disambut dengan gembira oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan semua rakyat. Seluruh rakyat menunggu kedatangan mereka di sepanjang jalan dari lapangan terbang Maguwo sampai ke Gedung Negara sambil menyerukan kata” merdeka!”.

Setelah semua pemimpin RI kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta diadakan sidang kabinet antara pemimpin-pemimpin PDRI dengan

¹⁵⁵ Suhartono, dkk, *op.cit*, hlm.129.

pemimpin- pemimpin RI yang dulunya diasingkan di Bangka. Sidang tersebut menghasilkan keputusan bahwa PDRI akan menyerahkan keputusan mengenai Persetujuan Roem- Royen kepada kabinet, BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) dan Pimpinan Angkatan Perang. Pada hari itu juga Mr. Syarifudin Prawiranegara mengembalikan mandat secara resmi kepada Wakil Presiden Moh.Hatta.¹⁵⁶

Pada tanggal 19- 22 Juli 1949 di kota Yogyakarta dan pada tanggal 31 Juli – 2 Agustus 1949 di Jakarta diadakan Konferensi Inter Indonesia antara wakil- wakil pemimpin RI dengan pemimpin- pemimpin BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg* atau Badan Permusyawaratan Federal). Permasalahan yang dibicarakan dalam kedua konferensi tersebut pada dasarnya sama, yakni mengenai masalah pembentukan negara RIS (Republik Indonesia Serikat).

Untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan Konferensi Inter Indonesia mengenai pembentukan RIS maka pada tanggal 14 Desember 1949 pemimpin- pemimpin RI, KNIP dan wakil- wakil Daerah mengadakan pertemuan di jalan Pegangsaan Timur No.56 Jakarta. Pertemuan ini membicarakan dan menyetujui penyusunan Undang- Undang Dasar Sementara yang sebelumnya telah disetujui oleh delegasi RI di Schenveningen, Belanda pada tanggal 29 Oktober 1949 sebagai Konstitusi RIS.

Konstitusi RIS ini dituangkan dalam bentuk Piagam dan ditandatangani oleh wakil- wakil dari RI dan daerah- daerah yang akan menjadi bagian dari RIS pada

¹⁵⁶ Ginanjar Kartasmita,dkk, *op.cit*,hlm.227.

tanggal 14 Desember 1949. Konstitusi RIS ini memuat beberapa hal, diantaranya: 1) RIS berbentuk negara federasi yang terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan; 2) Satuan- satuan kenegaraan yang tegak berdiri sendiri: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Daerah Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur; 3) Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah- daerah bagian.¹⁵⁷

Setelah Konstitusi RIS terbentuk dan telah disetujui langkah selanjutnya adalah dilaksanakannya pemilihan Presiden RIS. Pada tanggal 15 Desember 1949 Dewan Pemilihan Presiden RIS yang terdiri dari wakil- wakil RI dan wakil- wakil negara bagian mengadakan Sidang Pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Keesokan harinya, yakni pada tanggal 16 Desember 1949 Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS yang kemudian dilantik pada tanggal 17 Desember 1949 di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusumah Atmaja. Moh. Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri dan dilantik pada tanggal 20 Desember di Gedung Negara. Sedangkan Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi Menteri Pertahanan RIS.

Pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS yang dipimpin oleh Moh. Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Upacara pengakuan kedaulatan ini dilakukan di dua tempat dalam waktu yang bersamaan, yakni di Amsterdam dari Pemerintah Hindia Belanda

¹⁵⁷ Suhartono, dkk, *op.cit*, hlm.158.

yang diwakili oleh Perdana Menteri Dr.Willem Drees kepada pemerintah RIS yang diwakili oleh Perdana Menteri RIS, Moh.Hatta. Sedangkan di Jakarta, kekuasaan Belanda yang diwakili oleh A.H.J.Lovink diserahkan kepada Sultan Hamengku Buwono IX yang mewakili pemerintah RIS. Adanya penyerahan kekuasaan oleh pemerintah Belanda terhadap pemerintah RIS ini menunjukkan bahwa pemerintah Belanda secara resmi mengakui kedaulatan RIS.¹⁵⁸ Selain itu adanya penyerahan kekuasaan ini telah menandai berakhirnya perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan.

Sehari setelah pengakuan kedaulatan ditandatangani oleh pemerintah Belanda dan pemerintah RIS, yakni pada tanggal 28 Desember 1949 Presiden Soekarno meninggalkan kota Yogyakarta dan kembali ke Jakarta untuk menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Setelah kota Jakarta ditinggalkan selama kurang lebih empat tahun, Jakarta kembali menjadi ibukota pemerintah RI.

B. Bidang Sosial- Ekonomi

Peranan Sultan Hamengku Buwono IX selama pergerakan nasional periode 1945- 1949 tidak hanya berkutat pada masalah ekonomi semata. Akan tetapi Sultan juga memperhatikan masalah sosial dan ekonomi rakyatnya. Sultan menyadari meskipun sedang berada dalam suasana perang untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, pendidikan rakyat perlu diperhatikan agar rakyatnya tidak mudah untuk ditindas.

¹⁵⁸ Sartono Kartodirjo, *op.cit*, hlm.72.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada saat bangsa Indonesia sedang disibukkan oleh berbagai macam perjuangan bersenjata dan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan, di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1946 didirikan balai perguruan tinggi yang diberi nama Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada. Ide pendirian perguruan tinggi ini berasal dari Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada yang dipelopori oleh: Mr. Boediarto, Ir. Marsito, Dr. Prijono dan Mr. Soenarjo. Sedangkan panitia pendiriannya terdiri dari B.P.H.Bintara, H. Faried Ma'ruf, Mr.Mangkujudo, K.R.T.Notojudo, K.H.P.Nototaruno dan Prof.Ir.Rooseno. Selain itu juga dibentuk sebuah dewan pengawas yang diketuai oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai wakil ketua.¹⁵⁹

Gedung yang dipergunakan untuk tempat belajar adalah Pagelaran dan Sitihiinggil yaitu bagian *keraton* kasultanan Yogyakarta yang dipinjamkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Selain itu Sultan juga meminjamkan ruang- ruang disekitar keraton, di antaranya: bangsal Mangkubumen, Pugeran, Mangkuwilayan dan Wijilan yang dipergunakan sebagai tempat untuk perkuliahan. Pada awal pendiriannya, balai perguruan tinggi Gajah Mada hanya terdiri dari dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Sastra. Balai perguruan tinggi Gajah Mada merupakan lembaga pendidikan partikelir.

Dalam perkembangannya, yaitu pada tanggal 19 Desember 1949 jumlah fakultasnya mengalami peningkatan yang terdiri dari: Fakultas Hukum, Fakultas

¹⁵⁹ Tentang sejarah pendirian balai perguruan tinggi Gajah Mada lihat tulisan Tjokrosiswojo dalam Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 Tahun, 1956: *Kota Yogyakarta 200 Tahun, 7 Oktober 1756- 7 Oktober 1956*, hlm.101-107.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Teknik, Fakultas Kedokteran gigi dan Farmasi, Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada dinyatakan sebagai universitas negeri pertama di Indonesia dengan nama Universitas Negeri Gajah Mada dan kepengurusannya diserahkan kepada pemerintah.

Selain memperhatikan masalah sosial, Sultan juga ikut serta berperan dalam kemajuan ekonomi Republik Indonesia. Ketika ibukota Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1946, pemerintah RI mengeluarkan uang kertas yang disebut ORI (Oeang Republik Indonesia). Mata uang ORI mulai berlaku pada tanggal 29 November 1946.

Sesaat setelah mata uang ORI beredar, harga-harga bahan makanan sangat murah. Akan tetapi lama-kelamaan harga-harga menjadi sangat mahal. Mahalnya harga-harga barang disebabkan karena adanya blokade ekonomi dari pemerintah Belanda. Blokade ekonomi ini mengakibatkan hubungan RI dengan dunia luar menjadi terputus sehingga bahan-bahan kebutuhan pokok tidak dapat masuk ke Indonesia. Selain mengadakan tekanan politik dan ekonomi, bangsa Belanda juga menekan kebutuhan ekonomi rakyat pribumi dengan cara menutup semua jalur perhubungan ekonomi RI dengan tujuan agar RI jatuh.¹⁶⁰

Rakyat pribumi tidak mampu lagi menikmati beras karena harga beras sangat mahal. Mereka hanya makan jagung dan ketela sebagai pengganti beras. Semua harga bahan makanan sangat mahal sehingga rakyat tidak mampu membelinya. Melihat keadaan rakyatnya yang sangat memperihatinkan Sultan Hamengku Buwono IX tidak

¹⁶⁰ Nurdyanto, *op.cit*, hlm .49.

tinggal diam. Dengan penuh keikhlasan ia menyumbangkan kekayaan pribadinya kepada pemerintah Republik yang sedang mengalami krisis ekonomi dan krisis politik akibat dari penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Pada saat itu keuangan negara kosong karena banyak pengeluaran untuk membiayai perang.

Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan sebagian tabungan kasultanan untuk membiayai kelangsungan hidup Republik. Selain itu Sultan juga membagikan uang secara diam- diam untuk menunjang kehidupan para pemimpin maupun pegawai pemerintah yang sudah lama tidak menerima gaji. Sikap Sultan ini berhasil mencegah pihak- pihak Belanda yang akan memanfaatkan para pemimpin dan pegawai pemerintah RI untuk dijadikan sebagai *antek- anteknya*.¹⁶¹

Selain memberikan uang pribadinya untuk membantu para keluarga pemimpin dan pegawai pemerintah, Sultan juga memberikan uangnya untuk membiayai keperluan pasukan gerilya yang sedang berjuang melawan penjajah. Dengan adanya dukungan dari Sultan Hamengku Buwono IX inilah maka pasukan gerilya berhasil mengusir penjajah dari Republik Indonesia.

¹⁶¹ Tentang Sultan Hamengku Buwono IX yang secara diam- diam membagikan uangnya kepada para pemimpin dan pegawai pemerintah RI, lihat tulisan Ny.R.Mohamad Hatta dalam Atmakusumah, *op.cit*, hlm .211.

BAB V

KESIMPULAN

Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat terwujud berkat jerih payah para pejuang pergerakan nasional Indonesia. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia adalah Sultan Hamengku Buwono IX.

Dalam skripsi yang berjudul “ Peranan Sultan Hamengku Buwono IX Pada Masa Pergerakan Nasional (1940-1949)” terdapat beberapa permasalahan pokok yang harus dibahas dan dianalisa, diantaranya:

1. Apakah yang melatarbelakangi keterlibatan Sultan Hamengku Buwono IX dalam pergerakan nasional Indonesia; dalam bagian ini dijelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong keterlibatan Sultan Hamengku Buwono IX dalam pergerakan nasional.
2. Bagaimanakah peranan Sultan Hamengku Buwono IX selama pergerakan nasional 1940- 1945 dalam bidang politik dan sosial- ekonomi; dalam bagian ini dijelaskan tentang peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam bidang politik dan sosial- ekonomi yang meliputi usaha- usaha untuk melepaskan bangsa Indonesia dari tangan penjajah (Belanda dan Jepang).
3. Bagaimanakah peranan Sultan Hamengku Buwono IX pada masa awal kemerdekaan 1945-1949 dalam bidang politik dan sosial- ekonomi; dalam bagian ini dijelaskan tentang peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam

bidang politik dan sosial- ekonomi yang meliputi usaha- usaha untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Dari permasalahan- permasalahan tersebut maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 1) Kalau Sultan Hamengku Buwono IX mempunyai semangat nasionalisme maka dia akan terlibat dalam pergerakan nasional ; 2) Kalau Sultan Hamengku Buwono IX sudah menjabat sebagai kepala Daerah Istimewa Yogyakarta maka dia akan terlibat dalam bidang politik dan sosial- ekonomi selama pergerakan nasional 1940-1945 di Yogyakarta; 3) Kalau dari awal kemerdekaan RI sampai terjadinya Agresi Belanda, Sultan Hamengku Buwono IX masih menjabat sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta maka dia akan terlibat dalam pergerakan nasional 1940- 1945 di Yogyakarta.

Dari penjelasan di atas maka dapat dikemukakan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan kalau Sultan Hamengku Buwono IX mempunyai semangat nasionalisme maka dia akan terlibat dalam pergerakan nasional setelah diuji ternyata hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan tersebut.

Hal ini dikarenakan salah satu faktor utama yang mendorong keterlibatan Sultan Hamengku Buwono IX dalam pergerakan nasional adalah semangat nasionalisme yang ada dalam dirinya. Benih nasionalisme dalam diri Sultan Hamengku Buwono IX mulai tumbuh saat ia masih kecil ketika bersekolah di *Sekolah Kidul Ngloji*. Di sekolah ini dia melihat adanya diskriminasi terhadap anak orang pribumi dan anak orang asing. Kelemahan anak pribumi dibesar- besarkan sedangkan anak Belanda yang bodoh sekalipun dapat diterima disekolah ini. Melihat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keadaan tersebut, Dorojatun (nama kecil Sultan Hamengku Buwono IX) menyadari bahwa orang- orang pribumi di sekitarnya tidak mempunyai suatu kebebasan didaerah mereka. Benih nasionalisme dalam diri Sultan Hamengku Buwono IX tumbuh semakin pesat ketika ia menempuh pendidikan di negeri Belanda. Meskipun Dorojatun tinggal dalam lingkungan keluarga Belanda, ia selalu ingat dan menjunjung tinggi bangsanya. Salah satu buktinya adalah pada saat ia di Belanda ia memasang bendera merah putih di mobilnya. Adanya semangat nasionalisme yang besar dalam diri Sultan Hamengku Buwono IX membuatnya rela melakukan apa saja untuk bangsa Indonesia..

Hipotesis kedua yang menyatakan kalau Sultan Hamengku Buwono IX sudah menjabat sebagai kepala Daerah Istimewa Yogyakarta maka dia akan terlibat dalam bidang politik dan sosial- ekonomi selama pergerakan nasional 1940-1945 di Yogyakarta setelah diuji ternyata hasil penelitian juga sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan tersebut. Hal ini dikarenakan berbagai macam kebijakan politik dan sosial- ekonomi yang diambil oleh Sultan Hamengku Buwono IX selama pergerakan nasional 1940-1945 yang terbagi dalam dua masa yaitu masa pemerintahan Belanda dan masa pendudukan Jepang merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala daerah Yogyakarta. Sebagai seorang pemimpin beliau berusaha untuk melindungi dan menjaga rakyatnya agar keadaannya tidak semakin parah. Sultan Hamengku Buwono IX menganggap jika keadaan politik dan sosial-ekonomi rakyat tidak diperhatikan maka penjajah akan semakin mudah memperlakukakan dan menguasai bangsa Indonesia.

Hipotesis ketiga yang menyatakan kalau dari awal kemerdekaan RI sampai terjadinya Agresi Belanda, Sultan Hamengku Buwono IX masih menjabat sebagai kepala Daerah Istimewa Yogyakarta maka dia akan terlibat dalam pergerakan nasional 1945-1949, setelah diuji ternyata hasil penelitian juga sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan tersebut. Hal ini dikarenakan selama pergerakan nasional periode 1945-1949 kota Yogyakarta dijadikan sebagai ibukota revolusi. Sehingga sudah sewajarnya kalau Sultan Hamengku Buwono IX yang pada waktu itu masih menjabat sebagai kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ikut terlibat dalam pergerakan nasional 1945- 1949. Sultan Hamengku Buwono IX mengambil berbagai macam kebijakan politik dan sosial- ekonomi selama pergerakan nasional 1945-1949. Pergerakan nasional 1945-1949 terbagi dalam tiga periode yaitu setelah proklamasi kemerdekaan RI, Yogyakarta menjadi ibukota RI dan Agresi Belanda. Meskipun kemerdekaan bangsa Indonesia telah berhasil diraih, akan tetapi Sultan Hamengku Buwono IX menyadari bahwa masih ada pihak- pihak yang ingin menguasai kembali bangsa Indonesia. Oleh karena itulah maka Sultan Hamengku Buwono IX mengambil berbagai macam kebijakan politik dan sosial- ekonomi dengan tujuan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Adanya berbagai macam kebijakan dari Sultan Hamengku Buwono IX tersebut telah berhasil menjaga dan mempertahankan kemerdekaan RI.

Dengan demikian dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian skripsi yang berjudul “Peranan Sultan Hamengku Buwono IX Pada Masa Pergerakan Nasional (1940-1949)” sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

Atmakusumah,

1982: *Tahta Untuk Rakyat, Celah- celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Gramedia .Jakarta.

Bambang Suwondo,

1978: *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Depdikbud .Yogyakarta.

Berchover, Robert F,

A Behaviorial Approach to Historical Analysis. A Free Press Paperback. New York.

Dahana,dkk.,

1988: *Sri Sultan: Hari- hari Hamengku Buwono IX*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.

Djamal Marsudi,dkk.,

1985: *Sejarah Perjuangan Yogya Benteng Proklamasi*. Badan Musyawarah Musea.Yogyakarta.

Ginanjari Kartasmita,dkk,

1986: *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945- 1949*. PT. Citra Lamtoro Gung Persada. Jakarta.

Gottschalk, Louis,

1975: *Mengerti Sejarah*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Kartini Kartono,

1983: *Pemimpin dan Kepemimpinan*. CV.Rajawali.Jakarta.

Koentowijoyo,

1995: *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Budaya .Yogyakarta.

Kohn, Hans,

1961: *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*. PT.Pembangunan. Jakarta.

Moedjanto,G,

1989: *Indonesia Abad ke- 20 jilid I*. Kanisius .Yogyakarta.

_____ ,

1988: *Indonesia Abad Ke-20 jilid 2*. Kanisius. Yogyakarta.

_____ ,

1994: *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*. Kanisius.
Yogyakarta.

_____ ,

1987: *Konsep Kekuasaan Jawa , Penerapannya oleh Raja-raja
Mataram*. Kanisius. Yogyakarta.

Nasution, A.H,

1979: *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid V*. Penerbit
Angkasa.Bandung.

Nurdiyanto,dkk.,

1998: *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwono IX*. Depdikbud
.Jakarta.

Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 Tahun,

1956: *Kota Yogyakarta 200 Tahun, 7 Oktober 1756- 7 Oktober 1956.*

Poerwadarminta,W.J.S ,

1976: *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka .Jakarta.

Pringgodigdo,

1977: *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia.* Dian Rakyat. Jakarta.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah,

1977: *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta.* Depdikbud. Yogyakarta.

Renan, Ernest,

1986: *Apakah Bangsa Itu ? (Terjemahan).* Erlangga. Djakarta.

Sartono Kartodirjo,

1995: *Seputar Yogyakarta Dan Beberapa Tokoh
Kepemimpinannya.*Yogyakarta.

_____ ,

1977: *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI.* Balai Pustaka. Jakarta.

_____ ,

1990: *Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme
Jilid 2.* Gramedia. Jakarta.

_____ ,

1984: *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial.*Penerbit LP3S.Jakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sasmito,H.T,

1998: *Pemimpin Agung Binatara*.Yayasan Gita Budaya.Jakarta.

Selo Soemardjan,

1986: *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Gajah Mada University Press.Yogyakarta.

Soedarisman Poewokoesomo,

1985: *Kasultananan Yogyakarta Suatu Tinjauan Tentang Kontrak Politik (1877- 1940)*. Gama Press. Yogyakarta.

_____,

1984: *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Gajah Mada University Press .Yogyakarta.

Suhartono, dkk,

2002: *Yogyakarta Ibukota RI*. Kanisius. Yogyakarta.

_____,

1994: *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Suwarno, P.J,

1994: *Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942- 1974*.Kanisius.Yogyakarta.

_____,

1994: *Yogyakarta di Awal Kemerdekaan (Pertempuran Kotabaru Prolog dan Epilognya)*. Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tashadi,dkk,

1987: *Sejarah Revolusi Kemerdekaan di DIY (1945- 1949)*.Depdikbud.

Yogyakarta.

Tataq Chidmad,dkk,

2001: *Pelurusan Sejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949*. Media Pressindo.

Yogyakarta.



